

# AGAMA

Transformasi dari Ritus ke Substansi



Rumusan Hasil  
Kongres Kebudayaan Desa  
1 Juni-15 Agustus 2020





# **AGAMA**

**Transformasi dari Ritus ke Substansi**

**Webinar Seri 9**  
**Kongres Kebudayaan Desa 2020**  
**1-10 Juli 2020**



**AGAMA**

**Transformasi dari Ritus ke Substansi**

**© Sanggar Inovasi Desa 2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**Diterbitkan oleh Sanggar Inovasi Desa 2020**

**Kampoeng Mataraman, Jl. Ringroad Selatan, Glugo No. 93, Panggungharjo,  
Yogyakarta**

**Web: [www.sanggarinovasidesa.id](http://www.sanggarinovasidesa.id)**

**Penanggung jawab : Faiz Ahsoul**

**Editor : Irfan Afifi**

**Penyelia aksara : Chusna Rizqati**

**Tata letak isi : Fitriana hadi**

**Desain dan ilustrasi sampul : Ketjilbergerak, Arif Gunawan, Agus Teriyana**

**Cetakan pertama, Agustus 2020**

**xxxiv+124 hal., 13x19cm.**

**ISBN :**

**Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, dan advokasi diperkenankan dalam batas ketentuan yang berlaku.**



## Pengantar Editor

**K**asus Gereja Shincheonji di Korea Selatan; Synagogue Young Israel di New Rochelle, Amerika Serikat (AS); dan Jamaah Tabligh di India adalah contoh populer bagaimana komunitas agama menjadi pusat penyebaran virus Corona. Tidak jauh dari praktik itu, di Indonesia, awal persebaran Covid-19 di Indonesia justru didominasi dari aktivitas keagamaan. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Majelis Sinode selesai menggelar Persidangan

Sinode Tahunan pada 26-29 Februari 2020 di Bogor dan acara jemaah tablig di Kecamatan Bontomarannu, Gowa, Sulawesi Selatan, Maret lalu. Mereka berencana mengikuti sebuah acara bernama “Ijtima Dunia Zona Asia 2020” yang digelar 19 hingga 22 Maret 2020. Sejumlah daerah melaporkan kasus positif Covid-19 dari orang-orang yang sempat datang ke acara ini. Penularan bahkan berlanjut ke orang terdekat yang tidak mengikuti kegiatan.

Di Indonesia, orang-orang yang *nekat* mudik ini mungkin menggunakan keyakinan teologis yang jamak ditemui di berbagai komunitas agama, yaitu wabah adalah azab bagi orang kafir dan karenanya kaum beriman selalu dilindungi Tuhan. Sebagian muslim sempat percaya bahwa air wudu bisa mencegah virus Corona.

Mencermati itu, negara kemudian melakukan pembatasan: larangan saolat Jum’at di masjid, anjuran salat Id di rumah. Dan pembatasan-pembatasan aktivitas keamanan, baik di gereja, masjid, vihara, dan tempat-tempat berkumpulnya umat untuk aktivitas keagamaan.

Banyak negara menghadapi pertanyaan itu sebagai respons terhadap penyebaran virus yang oleh WHO telah dinyatakan sebagai pandemi global. Mengingat tingkat penyebarannya yang parah dan mengkhawatirkan, WHO telah menyeru setiap pemerintah untuk mengambil tindakan mendesak dan agresif. Sejak itu, beragam kebijakan yang membatasi hak-hak sipil diterapkan oleh banyak negara untuk mengendalikan penyebaran virus tersebut. Salah satu isu yang disorot dalam kaitannya dengan Covid-19 adalah pembatasan hak atas kebebasan untuk menjalankan agama atau



keyakinan. Apakah negara boleh membatasi kebebasan menjalankan agama atau keyakinan (*freedom to manifest religion or belief*) atas nama memerangi penyebaran penyakit virus Corona (Covid-19) dalam hukum HAM internasional? Dan bila iya, sejauh mana? (Saraswati, 2020).

Sebagai guncangan hebat, krisis ini bisa dilihat sebagai momentum transformasi. Dalam kehidupan beragama, ia bisa menjadi peluang untuk reformasi dan mempromosikan doktrin yang lebih terbuka, membantu berbagai lembaga menjadi responsif, dan komunitas yang lebih adaptif terhadap tuntutan alam modern.

Bagi miliaran manusia, agama menawarkan bantuan praktis dan spiritual terutama di tengah wabah. Untuk kesekian kali kita menyaksikan bagaimana gereja, masjid, kuil, rumah ibadah, dan organisasi agama di seluruh dunia menawarkan bantuan, bahan pangan, akomodasi, uang sumbangan, atau layanan kesehatan. Solidaritas semacam itu dibutuhkan karena jutaan manusia menderita oleh dampak psikologis, ekonomi, dan emosional dari pandemi Corona. Namun agama dan pemuka agama memainkan peranan yang lebih penting: mereka mampu atau harus membantu mencegah krisis serupa terjadi di masa depan dengan memanfaatkan pengaruh mereka yang besar untuk menggandakan perlindungan bagi planet Bumi dan peradaban manusia.

Jawaban jangka panjang atas Covid-19 selayaknya berpusar pada bagaimana kita mereparasi hubungan kita dengan planet Bumi. Mandat pemulihan ini harus menjadi jawaban dari semua bagian kehidupan dan sebabnya terdiri atas ragam bagian. Paket stimulus



ekonomi misalnya, harus mendukung investasi di sektor energi terbarukan, teknologi konstruksi dan infrastruktur yang cerdas, dan moda transportasi massal yang ramah lingkungan. Kita harus pula mengubah kebiasaan konsumsi atau praktik produksi: kurangi berbelanja, kurangi pemborosan dan lebih banyak memanfaatkan ulang barang bekas, seperti yang sudah dilakukan oleh banyak di antara kita selama masa karantina. Kita harus menghijaukan ulang hutan-hutan dan berinvestasi di kawasan suaka alam. Dan kita harus memerangi perdagangan gelap satwa liar atau sumber daya hutan, serta memperbaiki tingkat kebersihan dan higienitas di pasar-pasar.

Pemimpin dan komunitas agama terbukti penting untuk mengawal sebuah perubahan karena institusi mereka termasuk yang paling tua dan memiliki tradisi panjang, serta menyediakan jenis layanan yang krusial bagi kehidupan miliaran manusia di seluruh dunia. Sebab itu agama menjadi mitra yang tidak bisa dikesampingkan, baik dalam situasi normal ataupun di tengah bencana.

Dengan begitu, agama tetap relevan sebagai pedoman moral dan orientasi makna bagi para pemeluknya sehingga mereka pun bisa terus berkontribusi dan memainkan peran sentral di tengah pusaran perubahan zaman yang sering terlihat membingungkan. Terlebih di tengah wabah.

Webinar seri ke 9 tentang agama ini mencoba menilik lebih jauh tentang bagaimana peran agama di era dan pascapandemik Covid-19 terutama dalam hal pendidikan kepada umat. Bagaimana meninjau pembatasan-pembatasan tersebut bisa dilakukan tanpa melanggar



hak atas praktik agama dan keyakinan? Petanyaan-pertanyaan di bawah ini bisa digunakan untuk menyusun kerangka teoritis dan praktik beragama dalam masa pandemik dan sesudahnya:

1. Bagaimana wajah agama di era pandemik dan sesudahnya? Bagaimana agama terlibat merumuskan tatanan baru dalam era pandemik dan sesudahnya?
2. Bagaimana menjembatani pembatasan-pembatasan dalam praktik-praktik keagamaan dan berkeyakinan agar tidak melanggar hak atas praktik atau manifestasi agama dan kepercayaan? Prasyarat dan ketentuan hukum seperti apa yang dibutuhkan agar pembatasan itu tidak melanggar hak-hak peragama?
3. Arah kebijakan strategis apa yang bisa dirumuskan dalam pengembangan kehidupan beragama dan kepercayaan yang menjadi rahmat seluruh alam di tingkat desa?
4. Program-program dan kegiatan apa saja yang bisa diusulkan untuk penguatan kehidupan beragama di tingkat desa? Bagaimana mengimplementasikannya?
5. Apa dan bagaimana peran yang diharapkan dari pemuka agama untuk mewujudkan tatanan hidup baru di masa pandemik Covid-19 dan sesudahnya?
6. Bagaimana rumusan praktik beribadah secara komunal yang bisa dilakukan oleh agama-agama di tingkat desa?
7. Praktik kerja sama seperti apa yang bisa didorong antara pemerintahan desa, komunitas desa, dan para pemuka agama?



Dalam rangka itu, pada webinar Seri 9 Kongres Kebudayaan Desa 2020, Hari Kelima (dari rangkaian webinar seri 1 hingga seri 18, antara tanggal 1-10 Juli), pada Senin, 6 Juli 2020: 09.00 s.d. 12.00 WIB, bertempat di Kampung Mataraman, Jl. Ringroad Selatan, Glugo No. 93, Panggunharjo, Yogyakarta, kami mengundang 6 narasumber untuk memaparkan sumbang gagasan mereka dengan tema:

**“Agama: dari Ritus ke Substansi (Transformasi Peran Agama dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru)”**

1. Gus Hilmy Muhammad (DPD RI)
2. Engkus Ruswana (MLKI/Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan YME Indonesia)
3. Kiai M. Mustafid (UNU Yogyakarta)
4. Hilman Latief (UMY)
5. Hj. Masriyah Amva (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islamy, Cirebon)
6. Sabrang Damar Panuluh (Maiyah).

**Moderator:** Kiai Jadul Maula (Pesantren Budaya Kaliopak)

Kami mendorong keenam narasumber di atas untuk menyampaikan sumbang gagasan pada webinar tersebut dan juga meminta mereka untuk menuliskan gagasan mereka dalam bentuk *paper*, tulisan, ataupun makalah. Sebagaian dari narasumber ini berkenan menulis makalah dan menyerahkan ke panitia, tetapi ada sebagian dengan alasan satu dan lain hal belum bisa



menyampaikannya dalam bentuk tulisan. Oleh karenanya, kami terpaksa merekam sumbang-gagasan mereka dalam bentuk notulensi yang kemudian kami olah menjadi tulisan yang utuh.

Buku ini merupakan hasil dari kumpulan antologi sumbang-gagasan tulisan para narasumber di acara webinar di atas, baik dari makalah yang mereka tuliskan sendiri maupun tulisan yang bisa kita rekam dari webinar seri ke-9 pada tema “Agama” dari rangkaian Kongres Kebudayaan Desa 2020. Semoga tulisan-tulisan yang terekam maupun tertulis pada rangkaian webinar Kongres Kebudayaan Desa, yang telah menjadi kesatuan buku yang Anda pegang ini bisa memberi sumbang-gagasan atas Arah Tatanan Baru Indonesia, terutama berangkat dari desa dalam mengeja Indonesia, terutama setelah peristiwa pandemik Covid-19 yang bukan hanya melanda bangsa ini, melainkan juga melanda dunia secara keseluruhan. Terakhir, selamat membaca.

Kampung Mataraman, 18 Juli 2020





# Sekapur Sirih

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Ada ungkapan Jawa tentang desa yang menyatakan: “Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata”. Dalam UU Otonomi Desa No. 6/2014, ada kewenangan desa secara luas untuk mengatur cara dan mengurus rumah tangga sendiri, tetapi tidak berarti keluar dari tata ketatanegaraan NKRI. Sebelumnya, khusus untuk desa-

desa di Yogyakarta, sudah ada landasan UU Keistimewaan DIY No. 13/2012 sehingga UU Desa menjadi lebih spesifik dalam arti ada perubahan mendasar dari *Pangreh Projo* menjadi *Pamong Praja*. Termasuk penyesuaian nomenklatur Jabatan Camat pada level bawah maupun nama beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di provinsi dan kabupaten/kota. Bukan hanya perubahan nama, tetapi pelayanannya pun menjadi lebih berbudaya Jogja. Oleh karena itu, semua perangkat wajib mengikuti *short course* di Pawiyatan Pamong sehingga sesanti *desa mowo coro negara mawa tata* lebih tampak nuansanya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara tematik, membaca desa adalah sebuah introspeksi atas eksistensinya selama ini. Mengeja Indonesia dengan melafalkan per huruf membentuk kata I-n-d-o-n-e-s-i-a, merupakan bentuk evaluasi perannya sebagai wadah keragaman desa se-Nusantara. Semuanya itu harus ditempatkan pada era “normal baru” daripada aspek kebudayaan.

“*New normal*” adalah *back to normal* karena kehidupan kemarin justru *abnormal*, menandai sebuah *hiper realita*, seperti ketika kita harus membeli *image* sebuah produk air yang—seolah—meningkat statusnya setelah menjadi produk kemasan. Sebuah kondisi mental yang membuat sesuatu tidak substansif, menjadi melebihi kebutuhan dasar kita sendiri. “*New normal*” adalah sebuah terapi psikis dan kultural *healing*, berefek kejut untuk merefleksikan dan mengintrospeksi betapa rapuhnya kehidupan kita kemarin, untuk itu kembalilah ke jati diri dan fungsi diri kita yang nyata. Dunia kemarin sudah mati. Dunia hari ini ibarat sebagai sebuah

rumah sakit besar, kita tergeletak di dalamnya dan hanya berpikir sehat dan agar tetap bisa hidup.

Di situlah kini desa berada, yang berimbas pada tata pergaulan dan tata pemerintahan desa. Akhirnya kita menjadi bagian dari generasi yang dipertemukan oleh situasi terbaru dengan perubahan relasi sosial, dinamika organisasi kerja, dan berbagai hal yang selama ini telah kita lalui. Konsekuensinya, Kongres Kebudayaan Desa harus membahas pergeseran budaya desa yang tentu tidak mudah.

Menurut pakar kebudayaan August Compte, Disanayake, maupun Alvin Tofler, setiap pergeseran peradaban ditandai oleh tahapan yang selalu mengedepankan rasionalitas. Bahwa iptek merupakan komponen utama majunya peradaban. Semakin baik penguasaan akan beragam iptek, masyarakat akan semakin mendekati tahap adaptif terhadap kemajuan dan perkembangan zaman. Cara berpikir fungsional inilah yang harus kita hidupkan dan kembangkan di setiap desa agar sejalan dengan konsep *townbie*, membangun kelompok kreatif berbasis kebudayaan seperti contoh *Jogja gumregah*.

Pada masa awal, tentu canggung dan getir, bahkan sakit untuk *melakoninya*. Sebagaimana watak perubahan, harus melewati proses bertahap, terasa ada ketidaknyamanan yang mau tidak mau kita harus hadir menjadi bagian dalam proses tersebut. Potret perubahan dan ketidaknyamanan tersebut, tampak jelas dalam proses Kongres Kebudayaan Desa yang salah satunya menghasilkan 21 buku rumusan Indonesia Menuju Tatanan Baru dari Desa.



Dampak Covid-19 berkelindan dengan disrupsi teknologi menuju era Industri 4.0 yang belum mapan. Itu pun sudah dibayang-bayangi era Sosial 5.0 yang segera menyusul. Perubahan total ini juga berkejaran dengan pergeseran budaya desa yang belum teridentifikasi secara cermat. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah, termasuk desa, harus bersinergi memastikan pemeriksaan kesehatan masyarakat: tersedianya sarana medis, tersedianya jaring pengaman sosial untuk melindungi—mereka—yang paling rentan, dan tersedianya perlindungan kesehatan. Selebihnya, berhentilah menjadi provokator dan menyebarkan energi negatif yang tidak bermanfaat bagi siapa pun dan berpotensi menimbulkan kecemasan publik.

Gambaran strategis lingkungan desa yang telah berubah harus diikuti perubahan tata masyarakat, antara lain dengan relokasi dan *refocusing* Dana Desa. Dampak ekonomi membawa dampak sosial yang positif dalam meningkatkan peradaban empati, diikuti kesediaan saling belajar, menghargai, dan berbagi sebagai penguat modal sosial dan partisipasi publik. Penguatan ini berdampak positif pada peningkatan daya tahan ekonomi warga karena terbangunnya jaringan kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan. Kebijakan “normal baru” atau adaptif menghadapi realitas perubahan, tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan kehendak membangun hidup *guyub* di tengah keragaman perbedaan yang didasari oleh *mutual trust* untuk memperoleh *mutual benefit*. Untuk itu kita harus siap mengubah *mindset* budaya dalam mengelola kehidupan bersama.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, lurah atau kepala desa, harus memiliki wawasan adaptasi dan kapasitas daya tahan.



Bekal kompetensi dalam dunia yang kompleks dan penuh kejutan serta perubahan yang tidak terduga merupakan syarat utama. Harus mampu melakukan lompatan *non-linier* bahkan *out of the box*. Dari *Terra Firma*, daratan yang dikenal dengan baik, ke *Terra Incognita* atau dunia masa depan. Demikianlah, semoga buku rumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa ini bermanfaat bagi desa, bangsa, dan negara Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan selamat dan semoga sukses. Sekian, terima kasih. *Wassalam*.

Yogyakarta, 5 Agustus 2020

**Hamengku Buwono X**  
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta





# Sekapur Sirih

## Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

### **Melawan korupsi dari desa**

Pergeseran nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan menjadi “pekerjaan rumah” kita bersama. Semakin banyak anak-anak muda kota yang meski tumbuh di desa, tetapi terjangkit penyakit materialisme. Tercerabutnya suasana dan pikiran desa membuat banyak orang berpikir: apa yang ada dalam pikiran mereka hingga tercerabut dari budaya desanya, padahal berasal dari desa?

Kira-kira apa masalahnya di Indonesia? Keteladanan kepala desa dan orang tua menjadi sangat penting. Guru agama pun tak kalah penting. Di kota semakin hilang keteladanan dan sikap apresiasi sehingga muncul materialisme di masyarakat kota. Tentu butuh obat dengan sikap keteladanan dan orang yang sudah harus selesai dengan dirinya. Sikap spiritual ini banyak ditemukan di desa, harmonisasi alam dan manusia di desa baiknya tidak sekadar jadi inspirasi, tetapi harus dipraksiskan.

Materialisme yang menghantui pikiran orang kota bukan pepohonan dan sawah, melainkan mengumpulkan logam-logam. Bentley, Lamborghini, dan mobil-mobil mewah lainnya semua ada di parkir Komisi Pemberantasan Korupsi, sitaan dari kasus korupsi. Kumpulan mobil itu menjadi tidak penting. Namun, mengapa masih ada orang-orang yang ingin memilikinya dengan cara salah: korupsi? Apakah ada yang salah dengan pikiran orang kota? Kita perlu rekonstruksi bagaimana pikiran orang desa yang simpel: naik angkot, truk, dan moda transpor publik lainnya yang lebih fungsional.

Mari kita tengok pemikiran ekonom peraih Nobel: *When enough is not enough, a hedonist is born*. Ketika cukup sudah dianggap tidak cukup maka penyakit cinta dunia materialistis akan tumbuh. Pemenang Nobel ini sangat spiritual, seperti ajakan kembali ke desa dan mendalami pemikiran sederhana orang-orang desa. Namun pada prinsipnya, urusan menimbun kekayaan adalah penyakit semua orang, baik orang kota maupun orang desa.

Tantangan yang tidak kalah besar di desa, salah satunya *money politic*. Ternyata sistem politik yang kita pilih kemudian



menular. Pemilihan bupati, gubernur, sampai tingkat pusat penuh syarat *money politic*. Berharap untuk pilkades tidak ada *money politic*. Namun, harapan itu membentur kenyataan. Bahkan saling menularkan, baik dari desa ke kota maupun sebaliknya. Jadi, apakah desa menjadi inspirator korupsi karena *money politic* pilkades?

Sebenarnya sumber permasalahan ada pada politik yang tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kepala desa tidak ada gaji, tetapi dibayar dengan bengkok. Bengkok untuk pembangunan desa kemudian diasosiasikan menjadi milik kepala desa. Kalau panen padi tiga kali dalam setahun, dihitung paling tidak pendapatan 200 juta. Kemudian dikalikan berapa ton pemimpin ketemu angka, kalau dikeluarkan 1 miliar maka untung sedikit. Itu dari bengkok. Sementara dari dana desa maupun beberapa bantuan pembangunan infrastruktur dari pusat bisa menjadi bumerang dan jebakan pikiran koruptif. Ini harus kita pecahkan bersama karena tantangan di desa hari ini berbeda dengan dahulu.

Sistem politik yang kita pilih mahal, sistem terbuka. Sementara pendanaan negara untuk partai politik rendah. Konversi suara ternyata sering kali tidak berbanding lurus dengan pendanaan secara rasional kepada partai politik. Contohnya, gaji bupati 6,5 juta, gubernur 8,5 juta, dan wakil presiden 40 juta yang dinilai tidak laik dengan proses ketika mereka terpilih. Negara harus sudah mulai memikirkan kepala desa digaji yang cukup. Di Surabaya contohnya: lurah digaji 30 juta, camat bisa 50 juta, tetapi di desa-desa lain bagaimana? Sehingga yang terjadi, tidak sedikit kasus kepala desa hasil pemilihan secara *money politic*, kemudian melakukan upaya-upaya yang merusak perilaku masyarakat desa itu sendiri.



Mengapa 36 persen pelaku korupsi yang ditahan KPK adalah kader politik, anggota DPR, dan kepala daerah? Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Angka politik sangat memengaruhi angka persepsi indeks korupsi Indonesia, jadi varietas demokrasi proyek angkanya 28, sementara dari lulusan ekonomi ratingnya 59. Jadi angka-angka ini merupakan perbandingan korupsi yang diperbandingkan setiap negara. Untuk kasus Indonesia cukup menarik karena terus menanjak, ini jarang terjadi di negara lain.

Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, terbaik di dunia untuk pergerakannya. Dari 17 ke 40, naik 23 poin. Cina memberantas korupsi dengan hukuman mati naik 7 poin. Kemudian Malaysia di bawah kepemimpinan Mahathir bisa *reborn* setelah di zaman Najib turun 47. Itu pun hanya menaikkan Malaysia di angka 2 poin saja. Jadi, Indonesia sudah benar dalam pemberantasan korupsi, tetapi terlalu kaya dengan isu kota sehingga di desa juga perlu dilibatkan pemberantasan korupsi. Untuk itu, ada tiga strategi yang dilakukan KPK: Penindakan agar koruptor jera, pencegahan agar orang tidak melakukan korupsi, pendidikan agar orang tidak ingin korupsi. Demikian sekapur sirih dari kami untuk 21 judul buku hasil rumusan Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih.

Jakarta, 5 Agustus 2020

**Giri Suprardiono**

Direktur Dikyanmas KPK





# Sekapur Sirih

**Menteri Desa, PDTT**

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Pertama-tama, mari kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan Kongres Kebudayaan Desa tahun 2020. Ini adalah satu momentum yang sangat luar biasa, titik pijak atau titik tolak dari kebangkitan desa-desa yang memiliki akar budaya, di mana

perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan desa jangan sekali-kali lepas dari tumpuan akar budaya desa setempat. Mudah-mudahan kongres ini merupakan awal untuk kongres kebudayaan desa tahun-tahun berikutnya. Kedua, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang memberi cetak tebal kebudayaan manusia di muka bumi.

Melalui kongres desa, kita semua sudah diberikan pandangan dan paradigma baru dalam melihat dunia, termasuk kebudayaan. Kita tentunya semakin sadar bahwa di balik pandemi Covid-19 terdapat ujian sekaligus hikmah. Kita belum tahu kapan tuntasnya, tetapi kita harus mengambil langkah konkret dan strategis, salah satunya dengan merumuskan tatanan baru. Dan tentu saja kita berharap pandemi segera berlalu.

Sebagaimana dijelaskan selama kongres, pandemi Covid-19 sudah sampai pada level mendekonstruksi tataran budaya manusia. Tidak hanya kebudayaan semata, tetapi ekososial politik juga terdekonstruksi. Untuk itu, ada beberapa hal terkait rumusan kongres agar bisa berkontribusi terhadap paradigma baru Indonesia pascapandemi.

Pertama, melalui kongres kita berharap bisa mengidentifikasi nalar tebal kebudayaan masyarakat desa, seperti gotong royong atau holopis kuntul baris, saling peduli antarsesama masyarakat desa, sekaligus membaiknya ekosistem politik di mana masyarakat desa mampu berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Kedua, kongres diharapkan mampu berkontribusi untuk pemikiran nalar kebudayaan baru yang otentik, unik, dan inovatif



yang hari-harinya dijalankan masyarakat desa. Dengan kata lain, di balik keriuhan negara mengurus problem bangsa, masyarakat desa punya model dan modul pendekatan khas yang berasal dari cara mereka menghadapi persoalan. Ini problem solving yang spesifik khas desa, contoh ketika ada masalah tidak terlalu berat, cukup selesai di desa. Hukum positif tidak selalu menjadi rujukan. Misalnya, ada pencuri ayam, tidak serta-merta diurus ke kantor polisi, dimasukkan sel. Melainkan diselesaikan di desa dengan sanksi sosial yang diputuskan oleh kepala desa, yang karena kemampuan dan kewibawaan yang dimilikinya sehingga keputusan diterima oleh masyarakat.

Ketiga, forum Kongres Kebudayaan Desa yang melibatkan beragam unsur keterwakilan: akademisi, praktisi, seniman, budayawan, pemangku adat, dan elemen pemerintahan dari pusat sampai desa. Untuk itu, saya berharap agar semua unsur saling berkolaborasi. Para praktisi menceritakan bagaimana desa melaksanakan kenormalan baru di desa. Akademisi bisa mereformulasi dan meredesain bagaimana kebijakan yang adaptif bagi desa. Sebagai keterwakilan pemerintah, kami berharap ada perhatian khusus pascakongres agar lebih serius dan terelaborasi dengan kebijakan untuk kesejahteraan desa di Indonesia.

Terakhir, kami dari Kemendesa PDTT terus mencari dan mengidentifikasi narasi tentang desa, masyarakat desa, dan dinamikanya mengikuti perkembangan zaman yang bisa kita formulasikan menjadi kebijakan. Tagline “Desa untuk Semua Warga atau Desa Surga” merupakan inti sari pemajuan kebudayaan desa, pemajuan masyarakat desa dengan memperhatikan kearifan



lokal. Dana desa jangan hanya dirasakan elite desa, tetapi dirasakan kehadirannya oleh seluruh masyarakat desa, itu inti dari surga, desa untuk semua warga desa.

Terima kasih kepada Sanggar Inovasi Desa, pemerintah Desa Panggungharjo, dan Jaringan Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kongres dengan segala risiko dan konsekuensinya. Semoga kongres dengan hasil rumusannya yang terbingkai dalam 21 judul buku ini menjadi momentum berarti bagi perubahan dan penguatan budaya desa di masa yang akan datang. Demikian sekapur sirih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, salam budaya desa.

Jakarta, 5 Agustus 2020

**Abdul Halim Iskandar**

Menteri Desa, PDTT





# Pidato Kebudayaan

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud

*A*ssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastyastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

**Revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.**

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Terima kasih telah mengundang saya dan memberi kesempatan bicara di depan Kongres Kebudayaan Desa. Saya baca kerangka acuan dengan saksama, saya melihat kebudayaan tidak dipahami semata kesenian atau warisan budaya. Namun, juga sebagai keseluruhan

cara hidup, cara berpikir menyangkut kebiasaan kita, ritual, dan praktek yang terkait kebudayaan. Jadi kebudayaan dalam pengertian luas, sama seperti semangat dari UU No. 5/2017, tentang pemajuan kebudayaan Indonesia.

*Pertama*, kita paham bagaimana Pandemi Covid-19 mengubah cara hidup kita secara drastis. Kita membatasi pertemuan dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, menjaga jarak, dan kita juga punya beberapa keseragaman. *Physical distancing, lockdown*, dan seterusnya, semua masih dalam bahas Inggris, bahasa asing. Ini menunjukkan respons kita pada situasi pandemi masih cenderung datang dari luar, belum sepenuhnya menjadi sesuatu yang berakar pada masyarakat kita, dari dalam. Padahal kita mempunyai khazanah pengetahuan luar biasa menghadapi situasi pandemi. Tidak sedikit orang mengatakan, situasi yang kita hadapi tidak ada bandingannya.

*Kedua*, pada situasi luar biasa, kita perlu langkah-langkah luar biasa juga. Pemikir Inggris mengatakan, untuk mengatasi situasi Covid-19, kita perlu sebuah revolusi perdesaan. Revolusi ini landasan kita untuk tatanan masa depan. Karena revolusi bukan sesuatu luar biasa. Dalam sejarah Indonesia, kita sering mendengar seruan revolusi, terakhir revolusi mental. Jadi, tidak ada yang luar biasa dengan gagasan revolusi. Yang luar biasa adalah ketika gagasannya diutarakan oleh seorang bankir. Orang terkaya kedua di desa.

Gagasan mengenai revolusi perdesaan bisa kita tengok dalam sebuah tulisan yang dimuat di situs *World Economic Forum*. Ini keluar dari kebiasaan lain, forum ekonomi dunia dikenal oleh kepala pemerintahan dunia sebagai kumpulan para pebisnis, ekonom, yang membentuk sistem untuk mendominasi, jelas bukan forum untuk



revolusi. Kita tidak mungkin kembali ke masa sebelum Covid-19, ke masa yang sebelum normal lama, dan kita perlu sebuah tantangan baru, tantangan yang lebih manusiawi, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena kata kunci tatanan baru adalah keselamatan.

Bisa dibayangkan, ketika semua orang mendapat kesempatan mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Kita akan mudah sekali bersepakat untuk hal tersebut. Namun, bagaimana caranya? Jawaban paling jujur kita berikan pada pertanyaan mendasar yang kita belum ketahui bersama. Belum ada yang mengetahui bagaimana caranya untuk bisa sampai ke sana, karena tidak ada atau tepatnya belum ada cetak biru siap pakai. Namun, coba kita pastikan titik tolaknya ada pada desa. Perjalanan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, dimulai dari desa. Sekitar 1550 tahun lalu, asal mula pengelompokan masyarakat dalam jumlah besar yang kemudian membentuk bangsa Indonesia. Periode selanjutnya ketika kita ingin membangun negeri modern, tetapi desa dilupakan, diabaikan. Seluruh sumber daya kita keluarkan untuk membangun sektor modern yang oleh Covid-19, diingatkan untuk kembali ke asal usul, kembali ke dasar, kembali ke akar, kembali ke desa, itu alasan utama.

Alasan berikutnya, desa telah menyiapkan kebutuhan dasar untuk normal baru, terutama pangan dan kesehatan. Dua hal pokok ini tidak boleh diserahkan semua pada pasar. Ketika pembatasan sosial diberlakukan, kemudian ada orang panik memborong bahan pangan dan obat-obatan, termasuk yang tidak diperlukan. Sementara yang memerlukan tidak bisa membeli. Penyelesaian masalah seperti ini tidak sesederhana menangani penyelewengan, tapi ada kelemahan



dalam sistem yang harus diperbaiki. Ini semata bukan soal mafia impor beras maupun gas—yang memang harus disingkirkan. Namun, ada yang lebih penting, yaitu menata ulang sistem yang berpihak, yang bisa menegakkan kedaulatan di atas sistem itu sendiri sehingga mengembalikan kemampuan kita mengelola sumber daya yang ada. Fokus utamanya untuk pemenuhan kebutuhan kita semua, terutama kebutuhan di dalam negeri. Selebihnya, bolehlah berbagi dengan negara tetangga, negara sahabat.

Dan saya kira, yang berkumpul sekarang di kongres, adalah para pejuang akar rumput yang sudah lama menekuni masalah ketimpangan dan penyelewengan, yang bergerak mengurus memuliakan kembali benih-benih lokal. Ada yang terlibat praktik agro ekonomi, ada yang mengurus pasar lokal dan nasional untuk melayani kebutuhan masyarakat, penggerak koperasi usaha kecil, BUMDes, semua elemen yang diperlukan dalam tatanan mendatang. Saatnya, kita belajar kembali dari kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi baik lisan maupun tulisan. Hemat saya, ini kerja-kerja kebudayaan.

Pengetahuan tradisional di masa pandemi terlihat memiliki keunggulan. Kasus Covid-19 banyak sembuh karena obat tradisional. Balitbang pertanian sudah identifikasi 50 tanaman herbal untuk penangkal virus. Beberapa perusahaan jamu sudah memproduksi ramuan daya tahan tubuh untuk menghadapi Covid-19. Semua bukan sekadar romantisme, tapi pikiran rasional. Kita tidak mungkin diam menunggu vaksin datang. Sekarang, di banyak tempat, orang-orang mulai menggali pengetahuan dari naskah-naskah, tradisi lisan, dan berbagai praktik lainnya untuk memperkuat daya



tahan terhadap virus. Dan dalam prosesnya, kita menyadari betapa pengetahuan lokal yang selama ini diabaikan ternyata memiliki potensi pengembangan yang luar biasa.

Covid-19 telah memaksa kita melihat kembali jejak dan perjalanan kita. Covid-19 sudah mendesak kita memanfaatkan kekayaan budaya dan intelektual yang kita miliki. Memanfaatkan teknologi mutakhir, bermacam teknologi terbaru, temuan di berbagai bidang, kesehatan, pangan, energi terbarukan, dan pada akhirnya seluruhnya diharapkan bisa menghasilkan pengetahuan sebagai landasan untuk tatanan baru.

Kalau kita tengok lebih jauh, seluruh praktik baik tatanan baru, mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar. Sebagai contoh, pengobatan berbasis pengetahuan lokal sekarang disebut pengobatan integratif dengan nilai total di dunia mencapai 360 Miliar Dolar. Padahal pengetahuan integratif hanya bagian kecil saja dari industri yang disebut *wellness industry* yang mencakup banyak hal: ada perawatan diri, makanan sehat, pariwisata, dan total nilainya diperkirakan sudah 4,2 Triliun Dolar. Itu data sebelum Covid-19. Dan menurut hemat saya, di masa Covid-19 justru industri berbasis pengetahuan lokal di bidang kesehatan, bidang keselamatan akan semakin berkembang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik mengenai kesehatan.

Dalam sebuah studi dan riset, telah memperlihatkan bahwa 40% dari nilai total 4,2 Triliun Dolar atau 1,7 Triliun Dolar Amerika, sama besarnya dengan 25 Ribu Triliun Rupiah. Dan pada tahun 2023 kelak, nilai tersebut akan berada di Asia Pasifik. Jadi, kue yang cukup besar dari industri *Wellness* tersebut akan ada di Asia Pasifik.



Pertanyaannya kemudian, Indonesia sebagai sektor perekonomian terbesar keenam di Asia Pasifik apa rencananya? Padahal, relatif kita punya semua. Keanekaragaman hayati luar biasa, salah satu yang paling besar dan lengkap di dunia. Pengetahuan lokal mengelola alam juga luar biasa. Dan jangan lupa, banyak penemuan di bidang kesehatan modern pun dilakukan di Indonesia. Para peneliti dari berbagai belahan dunia datang ke Indonesia, berinteraksi dengan orang desa, mencatat kebiasaan mereka, kemudian menghasilkan temuan yang sampai sekarang masih punya pengaruh besar dalam kedokteran modern.

Itu semua kita punya, tapi pertanyaannya, apa rencana kita? Saya percaya bahwa fokus para pengembang *Wellness* di Indonesia akan membawa angka pertumbuhan kembali bergerak naik, tapi hendaknya harapan besar ini jangan sampai mengalihkan fokus kita. Kita membangun tatanan baru bukan untuk menjadi yang paling besar. Presiden Jokowi dalam sidang IMF mengingatkan dengan sebuah pertanyaan retoris, untuk apa menjadi yang paling besar di tengah dunia yang tenggelam?

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Tatanan baru yang kita rumuskan memang seharusnya mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan, itu kata kuncinya. Bukan angka pertumbuhan, bukan uang. Covid-19 mengingatkan kita semua bahwa uang bukan segalanya. Punya uang tapi tidak ada yang bisa dibeli, itu pelajaran berharga di masa krisis pandemi. Semua tidak mudah. Kita terbiasa dengan peralatan modern, termasuk uang. Mengubah cara pandang dan kebiasaan memerlukan perubahan



mendasar, perubahan kebudayaan. Karena itu revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Benih-benih kebiasaan baru, kebudayaan baru sudah mulai bertumbuhan. Di tengah pembatasan sosial, kita mulai melihat orang kembali ke alam, bercocok tanam. Kita menangkap ada kerinduan untuk kembali belajar sejarah, kembali belajar kebudayaan, tradisi spiritual dan praktik dalam bermasyarakat. Gerakan sosial juga bertumbuhan di mana-mana. Di Yogyakarta contohnya, ada gerakan Solidaritas Pangan Jogja: membangun dapur umum untuk membantu masyarakat kesusahan. Kita mencatat para seniman memproduksi alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan *face shield* yang terjangkau.

Revolusi perdesaan sudah dimulai. Tugas kita dan tugas kongres kita ini, untuk merajut inisiatif menjadi gerakan efektif. Merajut science mutakhir dengan pengetahuan tradisional. Kita merajut teknologi digital dengan pranata lokal. Gerakan ini adalah gerakan interdisipliner, karena tidak ada bidang ilmu atau sektor masyarakat yang bisa menjalankan tugas besar sendirian. Di sinilah semangat gotong royong akan mendapatkan wujud nyata.

Terakhir sebagai penutup, saya memohon bantuan para pegiat desa, para aktivis kepala desa, kepala daerah yang hadir dalam kesempatan kongres ini, untuk memperhatikan balai kebudayaan di desa. Sebagian dari kita punya padepokan, sanggar, dan seterusnya. Saya sangat memohon bantuan kita semua agar seluruh institusi ini bisa bertahan di masa sulit. Bagi yang belum punya padepokan, sanggar, mohon bantuan agar kantor desa juga bisa berfungsi sebagai balai kebudayaan pusat pemajuan kebudayaan, bukan soal gedung



fisik, tapi program dan kegiatannya. Di sinilah harapan saya kita bisa mulai melancarkan revolusi kebudayaan melalui musyawarah, lumbung pengetahuan. Di sinilah saya berharap kreativitas dan energi pembaruan bisa berkonsolidasi. Perangkat desa bisa menjadi agen pemajuan kebudayaan di wilayah setempat, kami siap kerja sama dengan seluruh unsur. Semoga setelah kongres, kita bisa menghasilkan agenda aksi konkret di tatanan baru. Terima kasih. Wassalam.

Jakarta, 1 Juli, 2020

**Dr. Hilmar Farid**

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud





## Daftar Isi

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Pengantar Editor.....</b>                                      | <b>v</b>    |
| <b>Sekapur Sirih</b>  |             |
| <b>1. Gubernur DIY .....</b>                                      | <b>xii</b>  |
| Hamengku Buwono X   |             |
| <b>2. Direktur Dikyanmas KPK.....</b>                             | <b>xvii</b> |
| Giri Suprpdiono   |             |
| <b>3. Menteri Desa, PDTT .....</b>                                | <b>xxi</b>  |
| Abdul Halim Iskandar  |             |
| <b>Pidato Kebudayaan Dirjen Kebudayaan,<br/>Kemendikbud .....</b> | <b>xxv</b>  |
| Dr. Hilmar Farid  |             |
| <b>Pandemi dan Desa Sebagai Solusi.....</b>                       | <b>1</b>    |
| Hilmy Muhammad  |             |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Dari Ritus ke Substansi: Transformasi Peran Agama/ Kepercayaan dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru.....</b>                        | <b>10</b>   |
| Engkus Ruswana  |             |
| <b>Peran Agama di Era dan Pascapandemi Covid-19.....</b>  | <b>30</b>   |
| Muhammad Mustafid   |             |
| <b>Dari Ritus ke Substansi: Transformasi Peran Agama/ Kepercayaan dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru.....</b>                        | <b>. 40</b> |
| Hilman Latief   |             |
| <b>Peran Pemuka Agama dalam Masa Pandemi.....</b>   | <b>50</b>   |
| Nyai Masriyah Amva  |             |
| <b>Agama dan Paradigma Baru dalam Membentuk Ketahanan Pangan dan Resiliensi Masyarakat Desa.....</b>  | <b>60</b>   |
| Sabrang Mowo Damar Panuluh  |             |
| <b>Implementasi Konsep Tri Tangtu oleh Masyarakat Adat Desa Cirendeudeu (Studi pada Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Cirendeudeu).....</b> | <b>70</b>   |
| Satria Adhitama   |             |
| <b>Epilog .....</b>   | <b>89</b>   |
| Ketua Panitia Kongres Kebudayaan Desa 2020  |             |
| <b>Deklarasi Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa.....</b>   | <b>117</b>  |
| <b>Kerabat Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020.....</b>  | <b>120</b>  |





# Pandemi dan Desa Sebagai Solusi

**Hilmy Muhammad**

*(Anggota DPR RI sekaligus Pengasuh PP Krapyak, Yogyakarta)*

Pandemi Covid-19 tak dipungkiri mengubah tatanan sosial masyarakat. Berbagai kebiasaan yang sudah berlangsung lama harus ditinggalkan dan disesuaikan dengan nilai-nilai baru. Umat Islam misalnya, harus berlapang dada untuk tidak salat berjemaah di masjid sementara waktu demi mencegah penyebaran virus Corona. Bahkan kebiasaan bersilaturahmi di Hari Raya Idul Fitri juga harus diubah demi menaati protokol kesehatan.

Para ulama pun turut merumuskan protokol *new normal* seperti tidak bersalaman saat bertemu, tetapi tetap menyambut dengan

tersenyum dan saling mendoakan, tidak salat Jumat di masjid atau salat dengan saf yang jarang-jarang. Semua itu merupakan syariat baru atau *pakulinan enggal* yang diperbolehkan dengan cara yang benar sesuai dengan prinsip perundangan yang berlaku.

Prinsip yang diterapkan adalah *adl-dlararu yuzalu*, yakni yang berbahaya mesti dihindari dan dihilangkan. Kebiasaan-kebiasaan yang berpotensi menimbulkan bahaya pada masyarakat perlu dihindari. Salat berjemaah di masjid memang lebih utama dibandingkan dengan salat di rumah, tetapi jika hal itu malah memperburuk keadaan, boleh dihindari untuk sementara waktu. Begitu juga dengan kebiasaan lainnya. Keselamatan manusia adalah yang utama. Hal ini sesuai dengan prinsip *ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh*, bila tidak bisa diambil semua, jangan ditinggalkan semua.

Tak hanya menciptakan *pakulinan enggal*, kondisi pandemi ini juga berpengaruh dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk perekonomian. Masyarakat mengalami “kemiskinan” nasional, jutaan orang terkena PHK dan kehilangan sumber nafkahnya. Di tengah kondisi yang tidak menentu, desa bisa menjadi solusi berbagai persoalan di masyarakat, utamanya melalui tiga hal, yaitu gotong royong, ketahanan pangan, dan religiositas.

## **Gotong Royong, Bentuk Kesetiakawanan Sosial**

Meski masyarakat sedang dilanda “kemiskinan” yang terjadi dalam skala nasional, satu hal yang membuat mereka bertahan, yaitu gotong royong. Konsep gotong royong, saling bahu-membahu



satu sama lain sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Bahkan di desa nilai luhur ini selalu dipupuk dan terus diamalkan dalam berbagai kesempatan.

Nilai luhur inilah yang membuat masyarakat desa mempunyai kepekaan sosial dengan kondisi di sekitarnya. Kesetiakawanan sosial antaranggota masyarakat terasah lewat interaksi yang erat. Saling tolong-menolong bukan hal baru di desa. Kegiatan seperti bersih desa, tahlilan, arisan, dan juga ronda menuntut peran aktif seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, menghadapi situasi pandemi seperti sekarang ini, desa sudah mempunyai bekal yang cukup. Ketika salah satu anggota masyarakat terkena dampak Covid-19, tetangga di sekitarnya tak segan untuk mengulurkan tangan untuk meringankan beban. Kesukaran bersama ditanggung bersama, sebab masyarakat desa sadar mungkin lain waktu merekalah yang akan butuh bantuan. Bentuk kesetiakawanan sosial inilah yang menjadi bekal utama desa bisa *survive* menghadapi pandemi. Antarindividu saling menghormati dan menghargai keberadaan mereka sebagai anggota dari sebuah masyarakat.

## **Ketahanan Pangan sebagai Kekuatan Utama Desa**

Selain gotong royong, desa juga mempunyai kekuatan utama yang sangat diperlukan, yaitu ketahanan pangan. Pandemi Covid-19 memukul wilayah-wilayah urban yang nampak kokoh, tetapi rapuh. Roda perekonomian berbasis produksi dan teknologi memang berlangsung di wilayah urban, tetapi instrumen penyokongnya yang utama, terutama pangan masih bergantung pada pasokan dari desa.



Ketika pandemi memukul sektor transportasi, pasokan pangan yang selama ini lancar menjadi terhenti. Masyarakat di wilayah urban kebingungan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang selama ini diabaikan. *Urban farming* pun mulai menjadi tren untuk memenuhi kebutuhan. Kelangkaan pangan yang dikhawatirkan dapat terjadi, menuntut pemerintah segera mencari solusi. Usulan untuk mencetak sawah-sawah baru digulirkan. Masyarakat wilayah urban mulai menoleh ke desa yang selama ini terabaikan.

Desa memang mempunyai benteng pertahanan pangan yang kokoh. Sawah dan lahan produktif masih banyak tersedia. Bahkan Al-Qur'an sendiri memberikan kriteria desa yang baik dengan ungkapan, "*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*". Secara harfiah ungkapan ini berarti negara yang baik dengan Tuhan Yang Maha Pengampun. Dan dapat diartikan sebagai negeri yang selaras antara kebaikan alam dan kebaikan perilaku masyarakatnya serta negeri yang subur dan makmur, tetapi masyarakatnya tidak pernah lupa untuk bersyukur.

Di desa hal itu sangat mudah ditemukan. Desa subur dan makmur dengan lahan persawahan yang menghampar luas. Masyarakat desa berdaya untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Karenanya kelangkaan pangan tidak menjadi isu sentral di desa. Bahkan dengan karakter tersebut, desa bisa menjadi *role model* bagi wilayah urban perkotaan agar tetap bisa bertahan di tengah kondisi pandemi.



## Religiositas sebagai Kunci Pertahanan

Ketahanan pangan yang dimiliki oleh desa juga semakin kokoh dengan religiositas masyarakatnya. Membicarakan tentang agama di tengah pandemi sesungguhnya telah berulang kali agama membuktikan diri bisa *survive* dalam berbagai kondisi. Dalam situasi konflik, bencana alam, maupun perubahan era yang penuh guncangan dan diikuti dengan berbagai penyesuaian baru. Dengan demikian, agama telah mampu menjadi sebuah sistem nilai yang kokoh dan teruji. Agama disiapkan sebagai pranata sosial agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai dan bahagia, bahkan di tengah kondisi tidak menentu seperti saat ini.

Jika agama menjadi sarana agar manusia tetap hidup damai maka para nabi dan kemudian para kiai sebagai penyambung lidah ajaran “langit” ke bumi adalah budayawan. Sebagai budayawan, kiai harus mampu menerjemahkan ajaran agama dalam keadaan apa pun dan bagaimanapun seperti saat kekeringan, saat paceklik, saat gempa, saat pemilu, atau saat terjadi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Kiai harus mampu membahasakan “bahasa langit” menjadi “bahasa bumi” yang praktis dan bisa dipahami serta langsung dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya untuk membuat manusia bisa sepenuhnya berakhlak, rendah hati, *tepa selira*, dan saling menjaga satu sama lain di tengah pandemi.

Kiai harus bisa hadir di tengah masyarakat, menenangkan atau *ngeyem-yemi* (Bahasa Jawa). Dalam bahasa Arab hal itu dinyatakan dengan ungkapan, “*himmatul ulama ar-ri’ayah*”. Artinya, fokus



perhatian ulama adalah *ngrekso* atau menjaga harmoni dalam kehidupan masyarakat. Kiai wajib memahamkan masyarakat kondisi pandemi seperti ini harus dijalani dengan tenang, tetap berusaha yang terbaik, dan berserah diri kepada Allah atas segala yang terjadi. Bukannya malah panik dan melupakan nilai-nilai gotong royong yang selama ini sudah dipupuk dengan baik. Jika hal itu yang terjadi maka kasus penolakan jenazah korban Covid-19 masih bisa terjadi karena masyarakat belum sampai pada pemahaman bahwa setiap nyawa manusia berharga. Mereka mementingkan ego dan tidak menghargai nyawa setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini. Namun, dengan pemahaman agama yang baik, meski berada dalam kondisi yang sulit, harmoni dalam masyarakat akan tetap terjaga dan kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi. Inilah pentingnya peran kiai dalam masa pandemi.

Kiai juga harus bisa mendukung program maupun langkah-langkah baik yang diambil oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain agar Indonesia cepat pulih dari pandemi. Bukannya *ngompori* dan membuat kondisi yang sudah nyaman menjadi tidak nyaman karena konflik yang tidak perlu.

## **Merumuskan Solusi Bersama**

Dengan ketiga modal yang telah disebutkan, yaitu gotong royong, ketahanan pangan, dan religiositas desa bisa menjadi solusi untuk menghadapi kondisi pandemi. Seluruh masyarakat perlu kembali merangkul desa dengan nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya, kemudian mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-



hari. Desa tidak lagi dijadikan pelengkap, tetapi kiblat. Ketiga modal yang sudah dimiliki desa harus dirumuskan agar Indonesia mampu segera bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.

Kesetiakawanan sosial yang mungkin sudah terkikis dalam kehidupan masyarakat urban harus kembali dipupuk. Nilai gotong royong yang ada di desa bisa menjadi contoh yang bisa ditiru dan dipraktikkan dengan penyesuaian agar cocok dengan kondisi dan situasi masyarakat urban perkotaan. Sikap individualis perlu dipertimbangkan kembali karena tidak relevan lagi di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Antartetangga harus saling peduli, tidak hanya mementingkan ego sendiri. Sebab bagaimanapun tetangga akan menjadi orang terdekat yang bisa membantu jika terjadi kondisi darurat seperti saat ini. Contoh yang paling mudah adalah ketika seseorang harus menjalani isolasi mandiri akibat Covid-19 maka tetangga terdekatnyalah yang bisa lebih leluasa membantunya mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Begitu pula dengan model ketahanan pangan di desa yang sangat bermanfaat ketika semua sektor, termasuk pangan terdampak pandemi. Masyarakat dapat mulai memberdayakan diri dalam memenuhi kebutuhan pangannya dengan memanfaatkan tiap jengkal tanah yang tersedia. Sehingga setiap masyarakat, baik di desa maupun kota bisa mencukupi kebutuhan pangannya secara mandiri tanpa harus membeli. Selain lebih mudah dan hemat, kesehatan bahan makanan juga lebih terjamin karena masyarakat menanam dan merawat sendiri apa yang akan mereka konsumsi. Kelangkaan pangan yang dikhawatirkan akan juga bisa dicegah jika



langkah mandiri ini segera dilakukan oleh masyarakat. Tidak perlu menunggu kondisi makin parah dan terlambat ditangani. Masyarakat tidak bisa mengandalkan pihak lain, tetapi harus mampu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Bahkan jika memungkinkan membantu orang lain yang membutuhkan.

Tidak hanya antarmasyarakat, para pemuka agama juga perlu untuk saling bekerja sama untuk menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis. Kebijakan-kebijakan baik yang diambil pemerintah perlu didukung, caranya dengan memahamkan kepada masyarakat dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kebijakan yang kurang tepat perlu dikritisi, diperbaiki, dan dicari solusinya bersama serta tidak saling menyalahkan satu sama lain. Sehingga para pemuka agama bisa satu suara dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Pasalnya dalam kultur masyarakat Indonesia, sosok pemuka agama masih jadi figur sentral yang perkataan maupun perbuatannya masih dihormati dan diikuti sebagai panduan. Sehingga para pemuka agama perlu bersikap bijak dalam menghadapi kondisi ini. Koordinasi yang baik antara pemerintah, pemuka agama, dan seluruh anggota masyarakat bisa menjadi kunci utama keluar dari masa sulit seperti saat ini.

Pandemi harus bisa menyadarkan kita semua jika beban berat ini akan menjadi lebih ringan jika dihadapi dengan semangat kebersamaan, saling asah, saling asih, dan saling asuh antarsesama. Gotong royong, ketahanan pangan, dan religiositas adalah kata kuncinya. Dan desa sudah menyediakan semuanya.



## Profil Penulis

Ada kutipan unik Hilmy Muhammad yang legendaris. Bahkan sampai disematkan di media sosial Yayasan Ali Maksum, “Guru ngaji, kaum rois, modin, dan kiai kampung itu juga budayawan”. Lontaran tersebut sejatinya merupakan ajakan pada masyarakat agar lebih menghargai peran-peran sosial untuk mempertahankan kearifan lokal. Pemikiran ini tentu tak lepas dari kesadarannya tentang relasi agama dan budaya yang telah panjang kesejarahannya.

Lahir, tumbuh, dan besar di lingkungan Pondok Pesantren Krapyak membuat Gus Hilmy dekat dengan santri dan responsif pada dinamika pesantren, santri, dan lingkungannya. Salah satunya adalah saat bulan Ramadan 2020, ia mengampu “Program Ngaji Ramadhan Kitab Qashidah Burdah” secara online. Ini merupakan respons terhadap pandemi Covid-19 agar meski para santri di rumah saja, tetapi intensitas mengajinya tetap terjaga.

Beragam gagasan juga ia tuangkan dalam berbagai tulisan. Salah satunya di kata pengantar buku karya kakeknya yang berjudul *Argumentasi Ahlussunnah Wal Jamaah*. Kini, cucu K.H. Ali Maksum ini juga mengemban tanggung jawab di Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 2019. Selain itu, ia juga menjadi dosen sekaligus Wakil Rektor III di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta.





# Dari Ritus ke Substansi: Transformasi Peran Agama/ Kepercayaan dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru

Engkus Ruswana

## Pendahuluan

Kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kehidupan beragama selama ini seolah-olah berjalan sendiri-sendiri, walaupun terjadi perjumpaan sifatnya *artificial* yang nampak hanya sebagai labelisasi keabsahan atau legalisasi negara atas agama atau sebaliknya

legalisasi agama atas negara. Hal ini terlihat dari praktik-praktik penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang masih jauh dari kandungan nilai-nilai religius spiritual yang seharusnya mengutamakan kejujuran, keadilan, kasih sayang, kebijakan, dan kebajikan.

Kalangan masyarakat keagamaan seolah asyik dengan dirinya sendiri untuk mengejar obsesi nikmat akhirat dengan pikiran teologis dan filsafat ilmunya, nyaman dengan kekerabatan dalam lingkungan internalnya, dan terkadang tidak peduli dengan keadaan di luar lingkungannya, termasuk abai terhadap ketidakadilan dan kepongahan manusia yang telah memperlakukan alam dengan sewenang-wenang. Di sisi lain pemerintah asyik untuk mempertahankan eksistensinya dalam persaingan global mengejar ketertinggalan dari negara lainnya dengan cara menggenjot pertumbuhan ekonomi, serta mendapatkan pemasukan bagi negara melalui pajak dan kerja sama dengan para investor yang sering kali dengan cara mengeksploitasi alam secara berlebihan, yang berdampak kerusakan berat ekologis dan tercerabutnya masyarakat pedesaan dan masyarakat adat dari akar kehidupan dan budayanya.

Munculnya pandemi Covid-19 seakan menjadi tamparan kepada umat manusia atas arogansi dan kesombongan serta keserakahannya dalam mengeksploitasi alam, yang ternyata tidak berdaya terhadap penyebaran virus ini. Manusia seakan terbangun dan disadarkan dari pikiran yang selama ini merasa paling kuasa di bumi dengan seenaknya mengeksploitasi alam dengan alasan ekonomi, tanpa memperdulikan keseimbangan dan kelestarian alam untuk generasi yang akan datang sehingga banyak



kalangan masyarakat keagamaan yang berpendapat bahwa wabah pandemi Covid-19 adalah merupakan teguran keras dari Tuhan atas kepongahan manusia yang melupakan tugas hidupnya, atau memandang pandemi ini sebagai konsekuensi atas kesewenang-wenangan (arogansi) manusia terhadap makhluk lain dan terhadap alam yang telah mengganggu keseimbangannya sehingga ketika sudah melewati batas ketahanannya alam pun akan melakukan perubahan untuk keseimbangan baru.

Menghadapi kebingungan dan kegamangan terhadap pandemi Covid-19, timbul kesadaran atas ketidakberdayaan manusia dan kembali memohon pertolongan Tuhan, serta menyerahkan pada kuasa-Nya. Sehingga marak di mana-mana gerakan masyarakat maupun pemerintah melakukan doa-doa bersama dan ritus-ritus keagamaan, baik di perkotaan maupun di perdesaan, di samping terus berupaya mendorong para ilmuwan untuk segera menemukan vaksin pencegahan dan obat untuk penyembuhannya. Namun, tentunya bukan hanya ritus-ritus saja yang dibutuhkan, melainkan juga harus diimbangi dengan aksi-aksi nyata sebagai pengejawantahan nilai-nilai luhur agama.

Atas dasar tersebut maka dibutuhkan transformasi dari ritus ke substansi, khususnya terkait peran kepercayaan yang diyakini memiliki berbagai nilai kearifan lokal dalam mengawal tatanan nilai Indonesia Baru.



## Wajah Agama/Kepercayaan dan Tatanan Nilai Indonesia Baru

Kondisi pandemi Covid-19 yang telah berjalan lebih dari 6 bulan sejak ditemukannya kasus telah banyak memakan korban di berbagai belahan dunia yang saat ini dilaporkan ada 216 negara yang tertimpa wabah Covid-19, dengan kondisi jumlah korban di dunia per tanggal 24 Juni 2020 sebanyak 9.341.861 kasus positif, dengan jumlah korban meninggal sebanyak 478.908 orang, dan 3.828.892 orang pasien aktif dalam perawatan. Sedangkan kondisi di Indonesia di hari yang sama pada pukul 12.00 WIB tercatat 49.009 pasien positif dan 2.573 di antaranya meninggal dan 19.658 pasien sembuh, sehingga jumlah yang masih dalam perawatan sebanyak 26.778 orang (*kompas.com*).

Belum ditemukannya vaksin Covid-19 dan obat yang tepat untuk penyembuhannya hingga kini menjadi keprihatinan dunia karena berdampak pada aspek lainnya dan dikhawatirkan akan menyebabkan krisis ekonomi yang merembet ke krisis sosial akibat pemutusan hubungan kerja dan pengangguran yang ditimbulkannya. Sehingga muncul gagasan-gagasan untuk berdamai dengan Covid-19 melalui penerapan tatanan Indonesia Baru atau populer disebut “*new normal*”.

“Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan. Itulah yang disebut sebagai *new normal* atau tatanan kehidupan baru”, demikian dinyatakan Presiden Joko Widodo, yaitu menjalankan aktivitas normal dengan menerapkan



protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19, yang secara garis besarnya meliputi:

Menjaga jarak antara 1-2 meter di mana pun, baik di dalam transportasi publik, pasar, pertokoan, tempat pariwisata dan hotel, lingkungan sosial, tempat peribadatan, serta fasilitas publik lainnya.

Selalu menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah dan berada di tempat-tempat publik.

- Menjaga daya tahan tubuh dengan makanan sehat dan tetap berolahraga.
- Pengecekan suhu tubuh dengan indikator normal  $< 37,5^{\circ}\text{C}$ .
- Menyiapkan tempat cuci tangan/*hand sanitizer* di tempat umum.
- Membatasi jumlah kapasitas pengunjung di sarana umum.
- Adapun panduan dari WHO bagi negara yang akan menerapkan *new normal* maka harus dipastikan:
- Terbukti bahwa transmisi Covid-19 telah dikendalikan.
- Kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina.
- Mengurangi risiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan pemukiman padat.
- Pencegahan di tempat kerja ditetapkan, seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, etiket penerapan pernapasan.



- Risiko penyebaran *imported case* dapat dikendalikan.
- Masyarakat ikut berperan dan terlibat dalam transisi.

Adanya protokol kesehatan tersebut jelas berdampak pada pembatasan-pembatasan yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan ditegakkan oleh pemerintah. Ketentuan tersebut tentu dapat berakibat pada pembatasan praktik-praktik keagamaan, untuk itu para tokoh agama dalam era pandemi dan sesudahnya perlu melakukan pengkajian kembali secara lebih mendalam terhadap pemaknaan ritus-ritus dan praktik keagamaan yang selama ini menjadi ikon atau ekspresi keagamaannya, dengan mempertimbangkan aspek keilmuan bidang kesehatan dan bidang sosial ekonomi dan aspek lainnya secara lebih bijaksana. Dengan demikian, maka wajah kehidupan keagamaan dan kepercayaan di masa pandemi Covid-19 dan sesudahnya di Indonesia akan mengalami perubahan dibandingkan sebelum munculnya pandemi, karena itu agama akan dituntut untuk betul-betul mampu memberikan jalan keluar atau memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang terjadi dan membuktikan hakikat tujuan luhur agama/kepercayaannya, dalam arti harus mampu mentransformasikan ritus-ritus ke dalam substansi agama/kepercayaan dalam mengawal tatanan nilai Indonesia Baru.

Kegiatan-kegiatan keagamaan harus mampu mengimplementasikan atau mewujudkan nilai-nilai luhurnya (substansinya) dalam kehidupan yang nyata sesuai tugas mulia keagamaan untuk menyejahterakan alam semesta dan segala pengisinya yang dalam Islam dikenal sebagai *Rahmatan lil alamin*, atau dalam kalangan penghayat kepercayaan di Jawa dikenal dengan istilah *Memayu*



*hayuning bawana* (Bs. Kawi), atau dalam Bahasa Sunda Kuna disebut dengan *Ngertakeun bumi lamba*. Jelas di sini terkandung muatan dan tugas untuk menjaga, memelihara, serta melestarikan alam demi untuk kesejahteraan pengisi alam (manusia, hewan, dan tumbuhan) di samping untuk keseimbangan alam itu sendiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka agama/kepercayaan harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan tatanan hidup baru di masa pandemi dan sesudahnya agar tidak terjadi konflik kepentingan antara pertimbangan kesehatan, ekonomi, sosial kemsyarakatan, dan aspek keagamaan/kepercayaan, dengan cara pelibatan para pemuka dan tokoh agama/kepercayaan dalam menyusun rumusan Tatanan Nilai Indonesia Baru, termasuk dalam mengawal penerapannya.

Mengingat tatanan nilai Indonesia Baru tentu akan lebih berorientasi pada pertimbangan ilmiah dari aspek kesehatan, walau juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi dan aspek-aspek lainnya. Maka sebaliknya para pemuka dan tokoh agama/kepercayaan juga harus siap untuk membuka diri (*open mind*) mencari solusi terbaik terhadap pemecahan masalah pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Tatanan nilai Indonesia Baru tidaklah berarti menutup pertemuan antarsesamanya karena manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk yang bersifat religius bagaimanapun tidak mungkin dihalangi untuk melaksanakan “kodratnya” sebagai manusia. Namun, tentu mengingat kondisi dan situasi yang berubah, di mana aspek kebersihan, pertimbangan kesehatan, dan terutama tujuan



keselamatan juga merupakan kewajiban dan tuntunan ajaran semua agama maka kita sebagai makhluk berakal wajib mengikuti dan melaksanakan tatanan nilai baru yang ditetapkan.

Sebagai contoh, tatanan nilai dan norma Indonesia Baru dalam kegiatan perkantoran diatur sebagai berikut:

1. Persiapan sebelum berangkat ke kantor
  - Menghindari pemakaian aksesoris yang tidak benar-benar diperlukan.
  - Selalu kenakan masker dan membawa *hand sanitizer* atau sabun cuci tangan.
2. Menggunakan transportasi publik
  - Jangan menyentuh muka, terutama bagian mata, hidung, dan mulut
  - Hindari berjabat tangan.
  - Jaga jarak dengan penumpang lain.
  - Jika berkendara mobil pribadi maka harus buka jendela mobil untuk sirkulasi udara lebih baik.
3. Saat di ruang publik
  - Hindari tempat kerumunan.
  - Jaga jarak fisik (2 meter).
  - Selalu gunakan masker (masker kain).
  - Lebih baik lagi kalau menggunakan *face shield*.
  - Gunakan tisu ketika bersin/batuk, lalu langsung buang tisu ke tempat sampah.



- Sering cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun selama 20 detik atau *hand sanitizer* dengan alkohol minimal 60%.
4. Saat memasuki kantor
- Cek temperatur suhu badan (normal maksimal 37,5%).
  - Bersihkan alas sepatu dengan disinfektan.
  - Cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun selama 20 detik atau *hand sanitizer* dengan alkohol minimal 60%.
  - Bersihkan meja kerja dan perlengkapan kerja dengan disinfektan.
  - Menghindari berbagi penggunaan alat kerja.
  - Hindari rapat-rapat tatap muka secara langsung jika memungkinkan.
  - Buat alternatif jam dan tempat bekerja yang bisa juga lakukan di rumah.
5. Ketika meninggalkan kantor
- Ganti pakaian dan sepatu yang digunakan saat bekerja dengan pakaian dan sepatu yang baru.
  - Masukkan pakaian dan sepatu yang kotor ke dalam kantong plastik.
  - Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau *hand sanitizer* sebelum dan sesudah menyentuh pakaian kotor.
6. Saat memasuki rumah
- Ganti alas kaki setiba di rumah.
  - Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir.
  - Cuci langsung pakaian yang kotor dengan detergen.



- Mandi dan cuci rambut sebelum berinteraksi dengan keluarga.
- Bersihkan rumah secara reguler dengan disinfektan.

Gambaran tatanan hidup normal baru untuk kegiatan kantor seperti di atas tidak akan berbeda jauh dengan kegiatan-kegiatan menuju ruang publik lainnya, seperti menuju pasar, pertokoan/mal, terminal/stasiun, perkantoran, bank, rumah sakit, termasuk menuju tempat-tempat ibadat/ritual keagamaan. Nampak menyusahkan memang dibanding kondisi sebelum pandemi, tetapi itu norma yang harus dipatuhi. Oleh karenanya, disarankan lebih baik beraktivitas di rumah dan seandainya harus keluar rumah juga harus dibatasi ketat pada hal yang betul-betul mendesak.

Atas dasar kondisi tersebut dan dikaitkan dengan ibadat dan ritus-ritus keagamaan dan kepercayaan maka para pemuka dan tokoh-tokoh agama/kepercayaan perlu mengidentifikasi mana kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara individual atau di rumah dan mana yang bersifat komunal. Untuk yang bersifat komunal diidentifikasi lebih lanjut bagaimana hukumnya, apakah wajib atau tidak wajib, kalau wajib apakah bersifat mutlak atau tidak mutlak, dalam arti apakah masih memungkinkan tidak dilaksanakan dibandingkan hukum/tujuan hakikat keagamaan/kepercayaan dari aspek lainnya.

Agama dan kepercayaan harus menurunkan egonya dengan kesediaan mengurangi ritus-ritus yang sifatnya seremonial yang apabila dilakukan akan berisiko terhadap masalah kesehatan (Covid-19) dan mencari solusi terhadap ritus-ritus yang merupakan akidah (kewajiban agama), tetapi berisiko dengan kajian terhadap



hakikat ritus tersebut. Pertimbangan aspek keagamaan harus sinkron dan berorientasi pada aspek keilmuan bidang kesehatan (harmonisasi ilmu keagamaan dengan ilmu kesehatan).

Untuk itu maka koordinasi antara pemuka dan tokoh-tokoh agama/kepercayaan dengan pemerintah melalui Satgas Covid-19 di semua tingkatan harus dilakukan dalam rangka mengimplementasikan dan mengawal tatanan nilai Indonesia Baru, termasuk memberikan masukan dan mendiskusikannya untuk mencari solusi terbaik. Koordinasi antara pemuka/tokoh dengan pemerintah dibutuhkan agar pembatasan-pembatasan yang ditetapkan tidak sampai melanggar hak-hak beragama. Walaupun terjadi konflik antara kepentingan agama dengan protokol kesehatan maka harus dicarikan kemungkinan solusinya. Atas dasar tersebut maka para pemuka dan tokoh agama/kepercayaan perlu melakukan kajian-kajian lebih mendalam terhadap ritus-ritus dan praktik keagamaan dan kepercayaannya, kajian antara manfaat dan kerugian terhadap praktik keagamaan/ kepercayaan pada masa pandemi dan sesudahnya, serta hakikat dan tujuan beragama. Selanjutnya para pemuka/tokoh agama dan kepercayaan ini diharapkan perannya untuk mengarahkan umatnya.

## **Nilai-nilai Luhur Kepercayaan, Implementasi, dan Eksistensinya**

Kemunculan pandemi Covid-19 tidak bisa dimungkiri memang mengejutkan semua umat manusia di dunia, antara percaya-tidak percaya dan kebingungan. Namun, bagi masyarakat penghayat



kepercayaan, baik yang hidup di perkotaan maupun yang di pedesaan dan pada komunitas adat sebetulnya tidak terlalu mengejutkan, mengingat sudah lama melihat dan merasakan perilaku alam yang berubah sebagai dampak kesewenang-wenangan manusia memperkosa alam, yang dicirikan suhu udara makin terasa panas, cuaca berubah, iklim yang sebelumnya teratur menjadi tidak teratur, ketersediaan sumber air bersih semakin berkurang termasuk di pedesaan yang dahulu sumber airnya melimpah dan banyaknya bencana alam. Masyarakat penghayat, terutama di pedesaan sering kali tidak berdaya untuk mempertahankan kelestarian alam yang mereka jaga ketika berhadapan dengan kekuatan investor dan pemerintah.

Perlu dipahami bahwa di dalam sistem keyakinan/kepercayaan lokal terdapat nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang sangat mendalam dan bermuatan spiritual dalam hubungannya dengan alam, di mana dikenal sebutan bumi sebagai ibu dan langit sebagai bapak, dan anasir alam (api-angin-air dan tanah) sebagai saudara atau *sedulur*. Masyarakat meyakini betul bahwa hidup manusia tidak bisa dipisahkan dengan alam dan mempunyai hubungan yang saling memengaruhi (hubungan kausal) sehingga bila kita menyayangi alam, alam juga akan menyayangi kita, kita merawat alam maka alam akan merawat kita, sebaliknya kalau kita jahat terhadap alam, alam pun akan jahat terhadap kita.

Semua itu berangkat dari hasil kajian terhadap asal-usul diri dan asal-usul hidup dan kehidupan yang melahirkan pemahaman hubungan manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan sesama makhluk hidup lainnya. Sehingga



melahirkan pemahaman akan tugas hidup manusia di dunia untuk menyejahterakan alam dan pengisinya, yang pada masyarakat Jawa dikenal dengan *Memayu Hayuning Bawana* atau di Sunda dengan sebutan *Ngertakeun Bumi Lamba*.

Pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam tatanan hidup (patokan, tuntunan, dan larangan) yang harus dipatuhi dan secara spiritual diwujudkan dalam upacara-upacara tradisi dan simbol-simbol dalam ritus-ritus keagamaan/kepercayaan. Penghormatan terhadap alam juga diterapkan dalam tata krama mengelola dan memanfaatkan alam, seperti pada waktu akan menggarap lahan, menanam bibit/benih, pemeliharaan tanaman, panen dan paska panen di bidang pertanian, tata cara dalam mendirikan bangunan, upacara larungan, ruwatan, bersih desa, dan sebagainya.

Dalam kehidupan bermasyarakat juga melahirkan tuntunan seperti yang dikenal di Sunda: *awak cageur-kalakuan bageur-kanyaho bener-pamilih pinter-laku jujur, tangtu selamat; silih asih-silih asuh-silih asah; ngadek sacekna-nilas saplasna; mipit kudu mipit-ngala kudu bebeja*; dan sebagainya yang mencerminkan nilai-nilai kearifan.

Dalam penataan ruang juga ditetapkan mana lahan yang boleh digarap untuk perkampungan, pertanian, kolam/perikanan, hutan garapan, dan mana yang ditetapkan untuk hutan titipan (cadangan masa depan), hutan tutupan, hutan larangan, dan hutan/tempat keramat yang didasarkan atas pengetahuan tradisi dan kearifan demi kelestarian alam.



Tatanan norma-norma dan kearifan tersebut mencerminkan penghormatan terhadap alam dan larangan untuk berbuat sewenang-wenang terhadap alam.

Contoh-contoh di atas hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kekayaan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia yang kini masih melekat dan menjadi pedoman perilaku hidup masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dikaitkan dengan tatanan nilai Indonesia Baru sangat relevan untuk diangkat dan dihidupkan kembali.

## **Arah Kebijakan Strategis Kehidupan Beragama/Berkepercayaan di Desa**

Tatanan kehidupan Indonesia Baru di masa pandemik dan sesudahnya tentu akan berbeda dengan kondisi Indonesia sebelum pandemik, begitu pun di negara lain akan mempunyai ciri yang tidak berbeda jauh, di mana tatanan dalam kehidupan akan dikenakan pembatasan-pembatasan yang didasarkan atas protokol kesehatan. Kondisi tersebut merupakan momentum terhadap kita untuk melakukan pengendalian diri dan meluruskan kembali orientasi kehidupan dari yang serba material kembali ke spiritual (ketenangan, kedamaian, kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan), serta kembali bersahabat dan menghargai terhadap alam karena alam dengan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Ditinjau dari kehidupan agama/kepercayaan, sekaranglah waktunya untuk mewujudkan hakikat tujuan beragama/



berkepercayaan dengan cara mentransformasikan ritus-ritus keagamaan ke dalam substansi nilai-nilai berupa perbuatan penyelamatan lingkungan sebagai perwujudan *Rahmatan lil alamin* (*Memayu hayuning bawana - Ngertakeun bumi lamba*) dan penerapan *Silih asih-asuh-asah*.

Arah kebijakan strategis kehidupan beragama dan berkepercayaan di desa perlu dikaitkan dengan karakteristik alam, fungsi, serta sistem kehidupan dan penghidupan desa, di antaranya adalah melalui:

- a. Gerakan penyadaran spiritual terhadap peranan desa dan pentingnya menjaga alam dan kelestarian lingkungan bagi kehidupan masa kini dan kehidupan yang akan datang;
- b. Harus mengubah paradigma yang selama ini menempatkan kota sebagai ibu (ibu kota) menjadikan desa sesuai fungsi yang sesungguhnya sebagai ibu karena senyatanya pedesaanlah yang menyusui kota dengan memasok segala kebutuhan dasar hidup perkotaan. Oleh karenanya, ibu harus sehat agar anaknya menjadi sehat, sebaliknya kota sebagai anak harus menjaga agar ibunya tidak sakit/dirusak karena orang-orang dari kotalah yang umumnya “merusak desa”.
- c. Untuk efektivitas perannya dalam penyelamatan dan kelestarian lingkungan alam di desa maka para pemuka agama/kepercayaan sedapat mungkin dapat berfungsi untuk mencegah pembangunan yang mengarah pada pengkotaan desa, yang sekarang marak perubahan kehidupan di desa dengan berbagai kegiatan yang bercirikan kota, seperti tumbuhnya mini market-mini market, pembangunan gedung-gedung megah,



pembangunan sarana publik perkotaan, seperti kolam renang, *water-boom*, penggunaan kemasan, dan alat pembungkus yang tidak ramah lingkungan, serta industri-industri yang mengeksploitasi alam.

- d. Kehidupan spiritual masyarakat di desa perlu diperkuat kembali melalui peningkatan pemahaman dan wawasan keagamaan/kepercayaan yang inklusif, serta merevitalisasi ritus dan kegiatan yang berfungsi penyelamatan dan pelestarian lingkungan.
- e. Untuk memperkuat kehidupan beragama/berkepercayaan di desa yang ditunjang pemahaman dan wawasan keagamaan yang inklusif maka dibutuhkan fasilitasi dan mediasi untuk mengakses perjumpaan-perjumpaan lintas keyakinan melalui media virtual dan sekali-kali perjumpaan langsung secara fisik dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- f. Untuk mengimplementasikan kebijakan strategis tersebut maka jelas dibutuhkan peran pemuka atau tokoh agama/kepercayaan mengingat mereka merupakan orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat, menjadi teladan di masyarakat, diturutir saran dan pendapatnya baik oleh masyarakat maupun pamong desa. Dengan demikian, maka peran yang diharapkan dari pemuka agama/kepercayaan dalam mewujudkan tatanan hidup baru di masa pandemi dan sesudahnya di pedesaan adalah:
- g. Pemuka agama/kepercayaan harus bisa berperan sebagai motivator dan fasilitator masyarakat desa dalam mewujudkan tatanan hidup baru di masa pandemik Covid-19 dan sesudahnya.



- h. Pemerintahan desa harus melibatkan pemuka dan tokoh-tokoh agama/kepercayaan dalam pembahasan menangani tatanan baru masa pandemi dan pascapandemi.
- i. Pemahaman wawasan dan kesadaran terhadap permasalahan pandemi dan keterkaitannya dengan kelestarian lingkungan.
- j. Memahami isi dan maksud dari tatanan hidup baru di masa pandemik dan sesudahnya.
- k. Mampu memberikan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat, termasuk memantau pelaksanaannya terkait penerapan tatanan hidup baru.
- l. Mampu bekerja sama dengan aparat desa dalam memantau kondisi kesehatan masyarakat di desanya dan keluar-masuk pendatang.
- m. Dalam hal pelaksanaan praktik-praktik beribadah yang bersifat komunal dalam masyarakat di desa maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dicermati, antara lain:
- n. Pertimbangan kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam protokol kesehatan normal baru Indonesia harus tetap menjadi dasar pertimbangan utama.
- o. Praktik ibadah keagamaan sedapat mungkin dilakukan di rumah, kecuali yang dalam akidahnya wajib dilakukan ibadah secara komunal maka harus diterapkan secara ketat protokol kesehatan.
- p. Dikaitkan dengan praktik beribadah keagamaan secara komunal di tingkat desa, secara umum tergantung pada akidah/sistem nilai dari masing-masing agama terhadap jenis ibadat dan



ritus-ritus keagamaannya, apakah kegiatan tersebut merupakan kewajiban mutlak atau masih memungkinkan untuk tidak dilakukan secara komunal (tidak melanggar kewajiban ajaran agamanya).

- q. Mengikuti arahan dan kebijakan pimpinan keagamaan tingkat yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat.
- r. Bagi masyarakat penghayat kepercayaan terdapat juga kegiatan ritus-ritus yang bersifat komunal, tetapi tidak terkait dengan hubungan ibadat makhluk dengan Tuhannya, karena pada umumnya kegiatan peribadatan dalam kaitan hubungan manusia dengan Tuhannya bersifat individual (pribadi dengan Tuhan). Sehingga pelaksanaan praktik ritus-ritus kepercayaan memungkinkan secara mandiri dibatasi, dan walaupun ada ritus yang harus dilakukan secara komunal, seperti ruwatan, kegiatan peringatan kematian, kelahiran, perkawinan dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai tatanan hidup baru.

Keberhasilan penerapan tatanan nilai Indonesia Baru di desa-desa akan sangat ditentukan oleh kedisiplinan segenap warga desa serta unsur aparatur desa, dan sebagaimana agama/kepercayaan dalam komunitas masyarakat maka dibutuhkan praktik kerja sama yang sinergis antara pemerintahan desa, komunitas desa, dan para pemuka agama/kepercayaan dalam mengawal penerapan tatanan nilai Indonesia Baru di desa, dengan berpatokan pada prinsip dasar pengamalan tuntunan hidup sesuai agama/kepercayaannya untuk menyejahterakan alam dan pengisinya yang dibarengi dengan



menerapkan *silih-asih*, *silih asuh* dan *silih asah*, sikap tolong-menolong, dan gotong royong, antara lain dengan mendorong praktik kerja sama, melalui:

1. Pemetaan kondisi potensi dan permasalahan terkini di desa.
2. Bekerja sama dengan pemerintahan desa untuk memfungsikan para pemuka agama/ kepercayaan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pandemi Covid-19 dan tatanan nilai Indonesia Baru yang akan/sedang diterapkan di desa.
3. Menyelenggarakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul terkait tatanan nilai Indonesia Baru di desa.
4. Mengembangkan media dialog dan komunikasi virtual di desa untuk media musyawarah, pembinaan masyarakat, sosialisasi kebijakan, penyebaran informasi, dan untuk proses belajar-mengajar murid sekolah maupun pendidikan nonformal selama *physical distancing* diberlakukan.
5. Penguatan peran seluruh pemangku kepentingan dalam upaya revitalisasi dan refungsionalisasi desa dengan paradigma pembangunan berwawasan lingkungan dan kelestarian alam, serta membatasi/menghentikan kegiatan/usaha yang tidak ramah lingkungan

Dengan demikian, maka peran strategis para pemuka agama/ kepercayaan yang dilaksanakan secara maksimal akan dapat mengawal tatanan nilai Indonesia Baru secara optimal.

Terima kasih!

Rahayu!



## **Profil Penulis**

Ia merupakan penghayat kepercayaan Budi Daya, turunan dari Sunda Wiwitan. Lalu, mendirikan Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (MLKI) untuk mengakomodasi penghayat kepercayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2017 menjadi angin segar bagi Engkus dan kawan-kawan. Karena MK mengabulkan permohonan adanya kolom kepercayaan bagi penghayat di beragam keperluan pencatatan sipil, termasuk pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Selain itu, Engkus juga dikenal sebagai ahli tata kota. Banyak kota di Indonesia yang telah ia desain. Meliputi kota-kota di Jawa, Sumatra, Maluku, hingga Papua. Ini tak lepas dari perjalanan studinya di Institut Teknologi Bandung yang mengambil jurusan Urban and Regional Planning. Berkat pengalaman tersebut, Engkus juga dipercaya mendesain Kepulauan Seribu menjadi kawasan wisata unggulan. Saat ini ia merupakan Ketua Presidium-I DMP-MLKI (Dewan Musyawarah Pusat-Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan YME Indonesia).





# Peran Agama di Era dan Pascapandemi Covid-19<sup>1</sup>

Muhammad Mustafid

Pandemi yang sedang melanda seluruh dunia berdampak di berbagai lini. Kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, tradisi, dan agama. Besarnya efek pandemi ini memunculkan banyak wacana besar. Salah satunya adalah dari perspektif agama. Perubahan-perubahan di tingkat ibadah atau tradisi beragama membuat opini publik terbelah. Singkatnya, dua wacana yang kemudian muncul

---

1 Tulisan ini disarikan dari materi yang disampaikan M. Mustafid dalam acara webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020, Seri ke-9, Hari Kelima (dari rangkaian webinar seri 1 hingga seri 18, antara tanggal 1-10 Juli), pada Senin, 6 Juli 2020: 09.00 s.d. 12.00 WIB. Tulisan ini dirangkaikan oleh **Berryll Ilham**.

atas pandemi adalah sebagai *adzaban* (azab) atau sebagai *rahmatan wa syahadatan* (rahmat).

Opini masyarakat yang muncul sangatlah beragam. Pendapat-pendapat ini muncul dari dampak pandemi atas kehidupan seseorang. Bagi yang biasanya rajin melakukan salat berjamaah di masjid, pembatasan fisik akan membuat ketidaknyamanan baru. Kebanyakan orang yang harus keluar rumah untuk mencari nafkah pun akan melihat pandemi sebagai masalah. Akan tetapi, dengan menghabiskan banyak waktu di dalam rumah, masyarakat menemukan makna lain. Kedekatan keluarga yang sebelumnya renggang menjadi sesuatu yang didambakan. Adapun hobi-hobi baru bermunculan dan ditelateni. Kesemuanya ini membentuk opini besar mengenai efek pandemi atas kehidupan masing-masing.

Apabila kita mengkhususkan diri untuk membahas konteks beragama, diskursus yang sering terjadi adalah tentang limitasi hak-hak beragama. Salah satunya adalah perdebatan tentang pelaksanaan ibadah salat Jumat dan pemakaman. Perdebatan ini bisa ditemui di level lokal, nasional, sampai internasional.

Kasus salat Jumat memunculkan kurang lebih tiga pendapat. Pertama, bahwa pelaksanaan ibadah komunal haram hukumnya. Seluruh ritual peribadatan perlu dilakukan di rumah saja. Ini dilakukan untuk memutus rantai persebaran virus yang bisa terjadi saat melakukan salat di masjid. Kedua, tetap mewajibkan ibadah bersama-sama di masjid. Ini merupakan pendapat masyarakat yang merasa bahwa persebaran penyakit tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Sementara yang ketiga berada di posisi tengah-tengah.



Ibadah komunal perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya. Apabila daerah tertentu memiliki kasus tinggi maka diharamkan salat berjemaah, berikut sebaliknya.

Selain peribadatan komunal, terdapat perdebatan mengenai tata cara pemakaman. Prosedur pemakaman pasien Covid-19 sesuai standar pemerintah membuat keluarga tidak bisa melakukan sendiri prosesi pemakaman. Dikarenakan kebiasaan pengurusan jenazah adalah sesuatu yang personal, banyak keluarga jenazah merasa tidak nyaman.

Permasalahan demi permasalahan terus bermunculan karena Covid-19. Lalu, apa yang bisa dilakukan agama dan agamawan dalam era atau pascapandemi nanti? Untuk menjawabnya perlu dirumuskan tantangan agama di masa kini dan mendatang.

## **Peran Agama di Era dan Pascapandemi**

Perubahan drastis kebudayaan menuntut perumusan masalah yang drastis pula. Karenanya diperlukan pemahaman secara mendalam tentang dampak pandemi di berbagai lini. Dalam konteks makro, pandemi ini mengubah banyak sekali realitas sosial kebudayaan. Mulai dari bagaimana orang pergi keluar rumah, melakukan *physical distancing*, dan lain sebagainya. Perubahan tata cara melakukan rutinitas ini perlu dirumuskan untuk dikaitkan dengan tata cara beragama.

Dalam Nahdlatul Ulama (NU) terdapat beberapa tradisi yang mengharuskan pertemuan fisik dan bersifat komunal. Tradisi ini antara lain adalah *Mujahadah*, *Istighosah*, dan lain-lain. Kini, banyak



dari tradisi berkumpul ini akan mengalami rekonstruksi disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Dalam konteks yang lebih spesifik, agama akan berfungsi dalam memahami substansi masalah. Dalam agama Islam terdapat tiga hubungan yang perlu diperhatikan, yakni *hablum minallah* (relasi dengan Tuhan), *hablum minan-naas* (relasi antarmanusia), dan *hablum minal 'alam* (relasi manusia dengan alam). Pandemi Covid-19 merupakan risiko atas globalisasi dan eksploitasi alam yang berlebihan. Maka agama sebagai pandu masyarakat perlu merumuskan permasalahan sesuai *hablum minal 'alam* dan *hablum minan-naas-nya*.

Pola hubungan manusia dengan alam bisa dilihat atas pengelolaannya. Sebagai khalifah yang ditunjuk di muka bumi, manusia bisa saja menjadikan alam semakin makmur atau malah menghancurkannya. Pola globalisasi yang membawa perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain juga bisa menjadi titik tumpu perumusan masalah. Perumusan yang diikuti pemaknaan kembali relasi antarmanusia dan dengan alam ini akan mengembangkan pemaknaan baru dalam hubungan dengan Tuhan.

Perumusan masalah dari berbagai lini ini kemudian akan membentuk sebuah rekonstruksi teologi transformatif yang berbasis realitas baru.

## **Rekonstruksi Teologi Transformatif**

Akidah sebagai dasar agama akan membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak tiap-tiap pemeluknya. Sebagai dasaran,



ketiga hal inilah yang perlu direkonstruksi paling awal. Cara berpikir masa kini harus lebih komprehensif, multiperspektif, integral, interkonektif, dan relasional. Kehati-hatian dalam berpikir ini tentu menjadi senjata dalam menghadapi perubahan terus-menerus yang ada di depan. Cara bersikap masyarakat pun perlu diperbaharui menjadi respek dan apresiatif atas perbedaan. Dengan cara tersebut, masyarakat bisa menghormati berbagai pijakan tradisi, baik baru maupun lama. Selain itu, diharapkan umat memiliki cara bertindak yang dinamis mengikuti perubahan yang terus terjadi. Artinya, keluwesan dalam berpikir menjadi penting mengingat zaman beserta nilai-nilainya berubah dengan sangat cepat.

Dalam usahanya merekonstruksi tiga hal di atas, agama memiliki beberapa sumber kebenaran. Apabila di sains terdapat rasionalisme dan empirisisme maka tradisi pesantren Islam menawarkan 5 jenis kebenaran. Sumber kebenaran tersebut, antara lain: *dalil naqli* atau *nash* yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, *dalil aqli* atau rasio yang berasal dari pemikiran ulama, *dalil waqii* atau empiria, *dalil intuisi* Ilham seperti *musyabadah*, *irfan*, *ru'ya*, serta *dalil urfi* atau tradisi kebudayaan. Sumber kebenaran berupa *dalil urfi* ini masih kental di perdesaan.

Secara lebih spesifik metode berpikir dalam agama dapat ditransformasi lebih jauh. Dalam NU terdapat metode berpikir yang merupakan satu karakter teologi *ahlussunah wal jamaah*. Metode berpikir tersebut, antara lain : *Tawassuth* (moderat), *Tawazun* (seimbang), *I'tidal* (adil), dan *tasamuh* (toleran).



Contohnya, apabila di Islam terdapat akidah *Jabbariyah* yang fatalistik dan *Qodariyah* yang memegang kebebasan berkehendak, maka *ahlusunah wal jamaah* berada di tengah-tengahnya.

Metode berpikir ini bisa diaplikasikan di ranah lain selain keagamaan. Misalnya, di era modern yang terdapat sistem ekonomi sosialis dan kapitalis, maka dengan metode berpikir ini kita bisa menemukan titik dinamis di antara keduanya. Pun di antara sistem negara sentralistik dan otonomi daerah yang kebablasan. Aplikasi dari metode berpikir di tengah-tengah ini memberikan formula dan kebijakan yang berbagai macam. Apabila ditarik ke lingkup kecil seperti perdesaan maka efek yang dihasilkan akan lebih besar.

Apabila metode berpikir ini sudah dimiliki, strategi pengaplikasiannya yang kini jadi tantangan. Di level tata nilai harus ada pribumisasi sebuah nilai. Hal ini merupakan tindak yang penting dilakukan karena setiap daerah memiliki tradisinya masing-masing. Pengenalan suatu nilai baru tanpa penyesuaian akan menimbulkan resistensi yang tidak perlu. Oleh karena itu, proses pribumisasi nilai semacam metode berpikir ini perlu diterapkan sesuai kebutuhan masyarakatnya.

Kemudian strategi selanjutnya yang bisa dilakukan di taraf lokal adalah nasionalisasi tata kelembagaan ekonomi dan politik. Hal ini perlu dilaksanakan untuk mendapatkan kontrol atas perubahan. Tentu hal ini bukan upaya untuk menghambat perubahan itu sendiri. Namun, perubahan yang keterlaluhan akan mengakibatkan goyahnya suatu sistem yang ada dan akan berdampak buruk pada lingkup tertentu.



Hal lain yang perlu dipersiapkan adalah konservasi sumber daya alam. Hal ini adalah efek dari perenungan sebelumnya berupa rekonstruksi hubungan manusia dengan alam. Untuk mengaplikasikan konservasi tersebut diperlukan ahli yang bisa datang dari elemen masyarakat yang sudah paham kondisi lokal. Hal ini penting dalam rangka mengembalikan alam yang telah rusak dalam taraf yang bisa diterima bersama.

Untuk menutup itu semua diperlukan gerakan revitalisasi dan kontekstualisasi tradisi di desa. Pusat dari revitalisasi dan kontekstualisasi desa ada di masyarakatnya. Untuk membangun pusat yang kuat terdapat beberapa unit penting yang perlu diperhatikan. Unit-unit tersebut, antara lain: unit politik yang diwakili pemerintah desa, unit ekonomi yang diwakili pasar, unit agama yang diwakili masjid, pesantren, langgar, dan rumah peribadatan lain, serta unit akademik yang berasal dari sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan lain.

Revitalisasi dan kontekstualisasi tradisi ini perlu ditegaskan dalam masing-masing unitnya. Sebagai contoh, pasar sebagai unit ekonomi perlu memiliki kemampuan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, sebuah pasar yang sudah mengaplikasikan kontekstualisasi tradisi akan mempertimbangkan kebutuhan unit lain. Oleh karena itu, pasar yang berdikari mampu menyuplai segala kebutuhannya dari daerah lokal itu sendiri. Tak lupa pasar tersebut mampu memenuhi kaidah kesehatan serta merupakan produk halal dan *thayyib*. Apabila satu unit mampu menunjang kebutuhan dari unit lain maka sebuah desa tersebut menjadi desa yang sehat dan baik.



Tentu revitalisasi dan kontekstualisasi diperlukan dalam menerjemahkan kebutuhan tiap-tiap unit, termasuk agama dan agamawannya. Dari sudut pandang unit agama, tujuan akhir dari kontekstualisasi ini adalah menciptakan tempat peribadatan yang terintegrasi sebagai sarana penunjang unit-unit lain. Masjid akan menjadi tempat edukasi, perumusan kebijakan, serta penunjang lain yang nantinya memberi manfaat untuk masyarakat

## **Rekonstruksi Hukum Agama**

Selain reformulasi konsep dan nilai agama, fikih (hukum agama) sendiri memerlukan perhatian khusus. Dalam gempuran pandemi, fikih ibadah dan sosial akan berubah. Satu kaidah dasar dalam *fiqh* ibadah menyatakan *al hukmu yaduuru ma'a illatihi*. Artinya kurang lebih adalah hukum ada sesuai dengan *illat*-nya (sebab hukum). Sebab hukum yang dimaksud adalah sumber tertulis (hukum positif) atau tidak tertulis. Seperti yang kita ketahui, pandemi hari ini mengubah banyak sekali sebab hukum tidak tertulis. Oleh karenanya, perubahan hukum adalah keniscayaan.

Menurut Imam Besar Izzuddin bin Abdissalam, segala sesuatu yang disyariatkan atau diturunkan oleh Allah kepada manusia itu bersifat untuk kemaslahatan publik. Kemaslahatan publik yang dimaksud ini merujuk pada lima pokok hukum Islam, yakni: memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

Sebagai contoh, memelihara harta menjadi dasar larangan pencurian. Maka kemudian mencuri menjadi haram karena bertentangan dengan pokok hukum Islam tersebut. Interpretasi



hukum ini perlu diperluas dan diradikalisasi sesuai dengan kondisi. Misalnya semua kegiatan dan kebijakan yang memiskinkan masyarakat adalah haram.

Contoh lain bisa dilihat pada poin memelihara akal yang menjadi dasar haramnya minuman keras. Minuman keras yang merupakan gerbang menuju ketidakmampuan pikiran secara esensi tak jauh dari pembodohan sistemik. Apabila diradikalisasi dalam konteks pendidikan maka akan muncul kebijakan pemerintah dalam membuat pendidikan yang lebih baik.

Dalam konteks pandemi, resesi ekonomi adalah keniscayaan, apabila kesulitan materi bisa menjadikan seseorang merambah ke kejahatan lain maka setiap tindakan yang berpotensi melemahkan ekonomi seperti penimbunan bisa menjadi haram.

Desa sebagai sebuah lingkungan sosial yang memiliki banyak orang perlu melakukan pemetaan dan riset mendalam. Berbagai masalah dan potensi desa yang ada bisa dirawat dan dikembangkan lewat kebijakan. Maka kemudian fikih sosial punya artikulasi di masyarakat. Radikalisasi di berbagai lini ini merupakan implementasi fikih sosial yang berkaitan dengan tujuan dasar syariah.

Dalam hukum agama yang berkaitan dengan ritus, baiknya diserahkan kepada para ahli agama itu sendiri. Gabungan rekonstruksi ritus formal dan substansi/makna ini akan menimbulkan suatu kesinambungan yang dapat menjaga kualitas keimanan dan kemanusiaan masyarakat.



## Profil Penulis

Daerah Mlangi merupakan situs agama Islam tertua di Yogyakarta. Belasan pondok pesantren ada di daerah tersebut. Salah satunya Pondok Pesantren Aswaja Nusantara, asuhan Kiai Muhammad Mustafid. Pesantren ini unik karena selain mengedepankan ajaran keislaman juga memiliki corak akademik yang sangat kental. Sarana belajarnya tidak hanya kajian dan diskusi, tetapi juga dengan membuat *reading club*.

Santri bisa belajar topik apa pun. Mulai sejarah Islam, nilai nasionalisme, toleransi, hingga isu publik terkini. Bahkan mereka sudah biasa membahas tema-tema yang aplikatif. Misalnya, tentang proses membangun kebijakan publik, mulai dari tahap formulasi hingga evaluasi. Diskusi tersebut diadakan berseri sejak awal tahun 2020. Pematerinya para pakar dari luar pesantren. Tujuannya agar para santri kenal dan meleak dengan isu terkini.

Keterbukaannya dengan berbagai kalangan membuat Kiai Mustafid kedatangan 16 pelajar dan mahasiswa dari Amerika Serikat pada tahun 2017. Mereka ingin belajar tentang ajaran agama Islam. Selama di pesantren, mereka dikenalkan dengan nilai toleransi dalam Islam yang menjadi laku keseharian para santri dan pengasuh. Saat ini selain mengelola pesantren, Kiai Mustafid juga menjadi Sekretaris LPP Aswaja Center, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Ia juga merupakan Dosen Universitas Nahdlatul Ulama.





# Dari Ritus ke Substansi: Transformasi Peran Agama dalam Mengawal Tatanan Indonesia Baru (Pengalaman Pergerakan Muhammadiyah)

**Hilman Latief**

(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

**T**opik mengenai transformasi agama dari ritus ke substansi masih menarik untuk dibahas, kendati sudah banyak dibicarakan. Pembahasan tidak hanya berkisar di kalangan agamawan, tetapi juga ilmuwan.

Diskusi tentang topik ini tersulut oleh sebuah pantikan: benarkah sebetulnya agama itu lebih condong kepada aspek substansi (teologi atau kepercayaan)? Pertanyaan inilah yang sering menjadi satu diskusi dengan ritus dan aksi dari keberadaan agama.

Saya ingin menganalisa topik ini dalam konteks Indonesia saat sekarang kita menghadapi satu krisis. Dalam beberapa kajian, kita tahu bahwa selalu ada dua dimensi dalam agama yang dipertentangkan, yaitu ritus dengan teologi; syariah dengan akhlak; syiar dengan substansi; aksi sosial dengan ritual.

Pertentangan dua dimensi ini cukup banyak menyita pikiran dan tenaga untuk berdiskusi atau merumuskan satu kesepakatan. Namun, diskusi tentang hal tersebut sepertinya memicu pula beberapa pertanyaan. Antara formalisasi dan substansi, apakah sesuatu yang berbeda dan harus kita pisahkan? Ataukah kedua hal ini saling melengkapi?

Dalam agama memang terdapat aspek-aspek tertentu berkaitan dengan praktik keagamaan khususnya di kalangan Islam. Dari mulai ibadah salat, puasa, zakat, dan haji tidak lepas dari aspek formalnya.

Praktik yang sifatnya ritual inilah yang tidak terpisahkan dari kalangan muslim sebagaimana pembicaraan mengenai substansi Islam, seperti keadilan sosial, akidah, makna, dan fungsi agama. Pelaksanaan hukum Islam menjadi satu primadona, tetapi di sisi lain ada aspek-aspek yang sukar dilupakan, terutama terkait dengan etika. Beberapa hal ini yang saya kira bisa kita diskusikan.



## **Seperti Apakah Akhlak Mulia?**

Kita tahu bahwa Rasulullah saw. diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Misi Rasulullah tersebut tentu telah menjadi bagian dari ajaran Islam hingga sekarang. Namun, dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik saat ini butuh suatu usaha yang membuat akhlak tidak hanya dianggap bagian dari ajaran Islam. Perlu suatu pantikan untuk memikirkan cara dalam menerjemahkan akhlak Islam sesuai kondisi zamannya.

Hal tersebut dapat dengan membuat rumusan masalah, seperti bagaimana menerjemahkan akhlak Islam? Apa upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk hal itu? Bagaimana komunitas muslim Indonesia menerjemahkan secara kontekstual dan sistematis konsep-konsep dasar yang ada dalam Islam, termasuk menerangkan perkara akhlak mulia? Pertanyaan-pertanyaan ini mempunyai banyak keterkaitan antara ritus dengan substansi.

Al-Qur'an telah memuat banyak sekali keterangan yang membahas tentang keimanan dan tujuan dari seorang mukmin. Kriteria untuk mencapainya biasanya dimulai dengan pelaksanaan ibadah salat, puasa, sampai zakat. Ujung dari praktik tersebut diarahkan untuk menghasilkan orang yang bertakwa. Hal itu juga dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas diri.

Akan tetapi, apabila kita membaca teks al-Qur'an, terutama terkait siapa sebenarnya orang yang bertakwa, rupanya sangat operasional. Satu ayat mengatakan orang-orang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarah, orang yang memiliki jiwa untuk selalu membantu orang lain dalam kondisi lapang maupun sulit



(seperti dalam situasi saat ini), dan orang yang membantu ke sesamanya.

Banyaknya kategori orang bertakwa di dalam Islam atau Qur'an menimbulkan lahirnya berbagai versi tentang ketakwaan. Hal dilakukan dengan pengutipan ayat-ayat tertentu, padahal antara satu ayat dengan ayat lainnya memberikan penjelasan yang berbeda-beda.

Di luar ketidakpastian tersebut, ketakwaan pada intinya mengangkat konsep tentang kebajikan, misalnya imbauan agar kita dapat *berta'awun* satu sama lain. Hal ini saya kira bisa membantu kita untuk menjelaskan sebenarnya apa yang disebut substansi dalam Islam? Dan apakah ritus itu masih penting?

## **Ritus dan Substansi**

Saya kira di Indonesia atau di mana pun kaum muslimin berada, ritus atau ritual merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari Islam. Pendapat ini disertai dengan catatan, sejauh mana orang yang memiliki ketaatan dan kedisiplinan melakukan ritus juga disiplin untuk bisa menerjemahkan Islam dalam konteks yang begitu besar.

Selama ini kedisiplinan menunaikan ibadah ritual sudah sering dialami bersama. Di samping sudah ada salat lima waktu, intensitasnya bisa meningkat saat datangnya bulan Ramadan. Saya kira dari segi kuantitas, ritus di dalam agama Islam lebih unggul dari agama yang lain. Ibadah wajib saja sudah banyak, apalagi ditambah dengan ibadah sunah.

Saya mungkin akan melihat sedikit pengalaman dari Muhammadiyah karena saya memang aktif di persyarikatan ini.



Organisasi ini—dan organisasi masyarakat (ormas) yang lain—saya kira sudah berjalan lebih dari satu abad. Sebagai organisasi mereka telah mencoba memberikan panduan sebagian umat Islam di Indonesia, baik simpatisan, anggota Muhammadiyah, maupun masyarakat umum.

Salah satu panduan yang pokok dilakukan ialah dengan menerjemahkan agama Islam dalam konteks yang lebih besar. Berikut ini adalah poin-poin yang mengemuka sebagai refleksi ketika Muhammadiyah mengadakan muktamar satu abad di Yogyakarta.

- Pergerakan Muhammadiyah dalam lintasan satu abad itu merupakan perwujudan dari pembaruan (*tajdid*).
- Memantapkan proses modernisasi sosial berbasis pembaruan Islam.
- Menghadapi kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.
- Memudarnya rasa dan ikatan kebangsaan, disorientasi nilai keagamaan, memudarnya kohesi dan integrasi sosial, dan melemahnya karakter dan mentalitas positif bangsa.
- Muhammadiyah berkomitmen kuat untuk menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*).

Hal yang sama sebenarnya amat mungkin bisa dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU) ketika menginjak usia satu abad. Setelah mencapai satu abad akan ada refleksi sejauh mana keberislaman kita memberikan satu kontribusi pada aspek sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat kita saat ini.



Dunia dan kondisi sosial politik sangat dinamis. Bahkan kita menyaksikan sendiri kontestasi politik dan keagamaan berlangsung sangat panas, salah satunya saat diselenggarakannya pemilihan umum. Situasi ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi ormas keagamaan, terutama dalam mencari dan merumuskan suatu cara untuk menghadapi dan menanganinya.

Ormas keagamaan perlu ingat bahwa ada kepercayaan yang diberikan pada mereka untuk menemukan suatu proses pencerahan dalam konteks masyarakat. Proses ini tentu dapat dengan melakukan perenungan, misalnya dengan bertanya sebenarnya apa kelebihan kita berislam dengan cara yang selama ini kita pakai?

Muhammadiyah dan NU adalah ormas yang fokus di gerakan. Agama mereka adalah Islam. Sebagai sebuah gerakan, ada satu pemahaman bahwa mereka juga mempunyai upaya untuk menerjemahkan substansi agama. Bukan hanya dari ritus ke substansi, melainkan menginterpretasikan substansi agama dalam konteks yang bisa diterima atau dibutuhkan masyarakat saat ini. Inilah bahan dalam melakukan refleksi setelah berhasil mencapai usia satu abad.

Tentu kita sama-sama paham bahwa tidak mudah untuk menerjemahkan substansi Islam saat ini, meskipun ritus tetap merupakan sesuatu yang penting dan sangat dibutuhkan masyarakat. Ritus bisa dianggap sebagai upaya mengikat keterlibatan pada agama yang dianutnya. Fungsi ritus tersebut tentu sudah disepakati sejak lama.



Akan tetapi, keberadaan ritus tak mungkin berhenti hanya sebagai bagian prosedur dalam beragama belaka. Perlu ada satu langkah untuk mendorong adanya substansi Islam. Ambillah contoh tentang praktik zakat. Zakat dilakukan oleh umat Islam sebagai bagian dari ajaran Islam, salah satunya pada momen-momen tertentu. Namun, perlu dimunculkan satu pertanyaan, memangnya substansi zakat itu apa?

Berbagai contoh jawaban dapat diungkap untuk menanggapi pertanyaan di atas. Misalnya, zakat berguna untuk membersihkan harta, membantu orang lain, atau menumbuhkan rasa kepedulian. Eksplorasi zakat juga dapat dilakukan kembali dengan menggali pemaknaannya lebih jauh. Dimulai dengan memberi penjelasan bahwa zakat mengandung usaha memperjuangkan keadilan sosial, menata pikiran seseorang untuk memiliki sikap yang tidak egois, dan mendidik orang agar mempunyai kepedulian yang tinggi.

Belum lama ini saya baru saja menerbitkan buku mengenai fatwa-fatwa tentang zakat. Selama proses pembuatan buku tersebut saya mempelajari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ormas atau lembaga Islam di Indonesia, antara lain Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan lain-lain.

Dari ratusan fatwa yang sudah saya telaah, diskursus yang berkembang terkait fatwa-fatwa tersebut, bahkan di internal organisasinya, jarang sekali mendiskusikan aspek substantif yang kita definisikan sebagai keadilan. Fatwa yang muncul cenderung mengarah pada ortodoksi, seperti zakat sebagai salah satu ritus.



Ketika kita melihat pembaharuan dalam organisasi apa pun, seperti Nahdliyyin, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam, gagasan-gagasan revolusioner tentang zakat yang diimplementasikan rupanya juga tidak banyak. Hal ini karena terhalang oleh munculnya fatwa yang sangat menjaga betul ortodoksi. Ada pantangan untuk tidak memberi tempat bagi inovasi atau tambahan lainnya.

Akan tetapi, narasi tentang munculnya kecenderungan ortodoksi tak selamanya bertahan. Sebagai sebuah aksi, justru muncul gerakan dari organisasi-organisasi kecil yang lebih berani untuk melakukan inovasi. Ini mungkin satu catatan tentang bagaimana substansi pun harus diterjemahkan lebih jauh.

## **PR di Kala Krisis**

Dalam situasi krisis seperti ini tentu butuh upaya yang tidak kecil untuk dirumuskan. Demikian pula yang terjadi pada kalangan umat Islam. Ada pekerjaan rumah (PR) yang sangat perlu dibereskan, yaitu menerjemahkan substansi Islam dalam konteks Indonesia.

Penerjemahan substansi itu dapat dilakukan dengan menghadapkannya pada kondisi kemiskinan saat ini. Dalam Muhammadiyah sudah ada beberapa upaya yang dicoba untuk melakukan kontekstualisasi tersebut.

Salah satu hasil konkretnya ialah dengan mengesahkan fikih kemanusiaan, fikih kebencanaan, ataupun fikih air. Pada muktamar tahun 2020, rencana serupa sudah digulirkan pula untuk mengesahkan secara operasional interpretasi substansi Islam lewat pengesahan fikih al-Ma'un.



Akhirnya, saya akan menutup makalah ini dengan fakta tentang krisis hari ini. Barangkali—kalau saya tak keliru—kelemahan kita sebagai umat Islam ialah terletak pada usaha menerjemahkan kerangka etik secara lebih operasional dan terstruktur, terutama untuk berbicara mengenai kemiskinan dan keadilan sosial.

Sejauh pengetahuan saya—mohon maaf kalau saya keliru—belum pernah rasanya saya melihat satu dokumen kuat dari ormas Islam tentang konsep dan strategi mereka mengenai penuntasan kemiskinan. Hal yang sama juga dirasakan apabila muncul tuntutan untuk merespons krisis secara tepat, terlebih lagi disertai perhatian terhadap dampak-dampaknya, sebagaimana yang kita alami di Indonesia saat ini.

Oleh karena itu, butuh usaha serius yang harus dilakukan, antara lain pengintegrasian keislaman dan keindonesiaan, menegaskan kepribadian bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila, lantas mengembangkan wawasan keislaman yang bersifat kosmopolitan. Tentu saja usaha itu bisa dilakukan dengan catatan, perlu proses penerjemahan secara sistematis terhadap gagasan-gagasan ini.



## Profil Penulis

Dinamika Muhammadiyah sebagai organisasi berumur lebih dari 100 tahun coba dipotret oleh Hilman Latief melalui bukunya *Post Puritanisme: Pemikiran Gerakan Islam Modernis 1995-2015*. Menurutnya, dalam kurun 20 tahun gerakan Muhammadiyah menunjukkan perkembangan yang dinamis. Baik ditinjau dari model pergerakannya, pemikiran keagamaannya, maupun sikap politiknya.

Ia melihat bahwa ideologi Al Ma'un versi KH. Ahmad Dahlan dikembangkan dan menjadi tradisi pemberdayaan Muhammadiyah sampai sekarang. Karena itu *Post Puritanisme* Muhammadiyah dapat dilihat dari meluasnya pemberdayaan di berbagai sisi kehidupan. Hal senada juga Hilman tuliskan di buku *Melayani Umat* serta *Politik Filantropi Islam di Indonesia*.

Produktivitasnya dalam menulis menjadikan Hilman Latief diganjar Alumni Achievement Award Winner of the College of Arts and Sciences pada 2014. Penghargaan tersebut diberikan oleh Western Michigan University, Amerika Serikat karena ia dinilai produktif menulis akademik di kancah internasional. Salah satunya ditunjukkan dengan 15 kali presentasi gagasan di forum internasional dari 2010 hingga 2014. Kini, Hilman menjadi Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk bagian hubungan mahasiswa dan alumni.





# Peran Pemuka Agama dalam Masa Pandemi<sup>1</sup>

Nyai Masriyah Amva

Ketika pandemik Covid-19 melanda seluruh dunia, Indonesia pun tak luput dari imbasnya. Banyaknya kasus yang ditemukan di Indonesia membawa kekhawatiran tersendiri dalam masyarakat. Berbagai sendi kehidupan terkena dampak dari pandemi. Selain bidang kesehatan, bidang pendidikan dan lembaga keagamaan juga

---

1 Tulisan ini disarikan dari materi yang disampaikan Masriyah Amva dalam acara webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020, Seri ke-9, Hari Kelima (dari rangkaian webinar seri 1 hingga seri 18, antara tanggal 1-10 Juli), pada Senin, 6 Juli 2020: 09.00 s.d. 12.00 WIB. Tulisan ini dirangkaikan oleh **Diah Rizki**.

terkena dampaknya. Salah satu lembaga keagamaan yang terkena imbasnya adalah pesantren.

Banyak pesantren di Indonesia memulangkan para santri mereka ketika pandemi merebak. Ratusan bahkan ribuan santri dipulangkan ke berbagai daerah asal masing-masing secara bertahap. Keputusan memulangkan para santri tersebut menjadi salah satu upaya pesantren untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Selain kehidupan belajar para santri, kehidupan pesantren dan masyarakat di sekitarnya pun tak lebih baik. Banyak pesantren berjuang untuk membiayai beban-beban pesantren yang tidak sedikit. Ada guru pesantren yang harus dihidupi, ada warga yang tinggal di dalam pesantren yang harus juga dicukupi, serta ada kebutuhan-kebutuhan dasar pesantren yang harus dibiayai.

Hal ini merupakan tantangan baru bagi banyak pemimpin pondok pesantren. Covid-19 yang merupakan krisis global menjadi refleksi bagi para pemuka agama mengenai perannya dalam masyarakat. Sebagai pemuka agama, para pemimpin pondok pesantren bukan hanya sebagai pemimpin bagi para santri mereka, tetapi juga sebagai panutan dan motivator masyarakat di sekitarnya. Para pemuka agama dituntut menjadi penerjemah falsafah hidup dari bahasa langit ke dalam bahasa manusia sebagai praktik dalam kehidupan. Ketika pada masa sulit seperti paceklik, bencana, kerusuhan, para pemuka agama hadir dan menggandeng masyarakat untuk melanjutkan hidup, begitu pula selayaknya yang terjadi ketika dalam masa pandemi dan pascapandemi.



## **Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy**

Pimpinan pondok pesantren Kebon Jambu Al Islamy, Kiai Muhammad, meninggal dunia pada tahun 2006. Pondok pesantren yang terletak di Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat ini pun oleng. Pesantren banyak kehilangan santrinya karena banyak santri merasa kehilangan sosok pemimpinnya. Dari 350 santri yang mondok, hanya tersisa sekitar 100 santri yang bertahan. Pesantren yang didirikan sejak tahun 1993 oleh Kiai Muhammad terancam tutup.

Sepeninggal Kiai Muhammad, pondok pesantren mencoba bertahan meski banyak kegamangan. Para pengurus yayasan kebingungan mencari pengganti Kiai Muhammad karena dirasa tak ada yang pantas. Kemudian diputuskanlah bahwa istri Kiai Muhammad, Masriyah Amva, maju sebagai pengganti suaminya, memimpin pesantren yang mereka bangun bersama tersebut. Ada banyak hujatan dan cercaan ketika pondok pesantren dipimpin oleh seorang perempuan. Dengan mengakarnya budaya patriarki, masih sulit bagi masyarakat menerima pemimpin perempuan di lingkungan pesantren, apalagi ketika perempuan tersebut hidup sendiri.

Melewati kepemimpinan dengan penuh kegamangan di awal menjadi pemimpin, Masriyah Amva menemukan kepercayaan dirinya dalam doa dan iman kepada Tuhan. Masriyah memimpin dengan kepercayaan bahwa ia hidup bersama Tuhan. Ia melakukan apa yang ia mampu, meyakinkan masyarakat bahwa pondok pesantren akan menjadi lebih baik. Seiring berjalan waktu,



pesantren Kebon Jambu mulai bangkit. Dari semula tersisa 100 santri lama, kini menjadi sekitar 1700 santri dari segala usia belajar. Pondok pesantren dipimpin dengan prinsip yang sederhana bahwa hidup harus bermanfaat bagi masyarakat, apa pun gendernya.

## **Dampak pandemi dalam kehidupan ekonomi masyarakat**

Dari prinsip kepemimpinan pondok pesantren Kebon Jambu itulah membuat pesantren sadar bahwa mereka tidak bisa tinggal diam ketika dampak pandemi terjadi pada kehidupan masyarakat sekitar pesantren. Banyak warga sekitar kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba dan tidak mampu menghidupi keluarganya. Mereka yang berjualan harus terpaksa kehilangan pelanggan, sedangkan yang bekerja dengan menjual jasa seperti pekerja bangunan contohnya, terpaksa tidak bekerja karena pemilik rumah menghentikan pembangunan.

Begitu pula halnya yang terjadi di sekitar pesantren Kebon Jambu. Pembangunan pesantren di asrama putra dan putri terpaksa dihentikan karena pandemi. Pekerja-pekerjanya tidak dipanggil untuk bekerja karena dana pembangunan dialihkan untuk ketahanan kehidupan pesantren. Selama kurang lebih 3 bulan pesantren terus berusaha untuk menghindari dari keterpurukan. Namun, sebagai perwakilan lembaga keagamaan, pesantren tidak bisa terus menutup mata dari krisis ekonomi tersebut.

Ada 20 pekerja bangunan yang bekerja di asrama putra dan putri sebelum pandemi melanda. Sebelum para pekerja bangunan



yang diberhentikan, pesantren memberi mereka hampir satu karung beras sebagai bekal untuk bertahan hidup selama pandemi. Namun, tidak lama setelah itu mereka datang kembali ke pesantren untuk meminta bekerja. Hal ini membuat bingung para pengurus pesantren, apakah harus dipekerjakan atau tidak. Ini merupakan tantangan besar bagi orang yang hidup berdampingan dengan masyarakat yang membutuhkan.

Bagi masyarakat desa ada hal yang lebih mengkhawatirkan daripada bahaya Covid-19, yaitu tidak bisa bekerja. Jika mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa makan. Maka di tengah pandemi, pesantren berusaha membantu mereka untuk bertahan hidup dengan mempekerjakan kembali para pekerja bangunan tersebut. Para pekerja ini butuh penghidupan. Mereka bekerja hari ini untuk makan hari ini. Mereka tidak terbiasa menimbun bahan makanan karena mereka terbiasa berbagi. Masyarakat desa di sekitar pesantren memiliki kebutuhan hidup. Pesantren pun memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun, bukan berarti kebutuhan pesantren menjadi penghalang untuk turut membantu kebutuhan hidup warga. Pesantren berusaha untuk membantu bukan karena kelebihan dana, tetapi karena kewajiban. Kewajiban dan peran sebagai ulama di tengah masyarakat haruslah menjadi dasar untuk saling tolong-menolong. Selain itu sebagai ulama, pesantren dituntut untuk memiliki empati yang besar kepada masyarakat sekitar. Meskipun tidak dimungkiri, untuk bertahan di tengah terpaan pandemi pun pesantren menghadapi banyak kesulitan untuk menata dan menghidupi kehidupannya.



## **Gotong Royong demi Masyarakat**

Pemuka agama sudah seharusnya bisa menenangkan masyarakat dan memastikan tata kehidupan berjalan damai. Beberapa ibu nyai di sekitar daerah pondok pesantren berinisiatif untuk bekerja sama dalam menghadapi krisis saat pandemi ini, dengan harapan dapat meringankan beban berat pandemi ini. Para ibu nyai bergotong royong membantu para penjual di sekitar untuk berjualan dan mengirimkan barang dagangannya ke rumah-rumah.

Para pemimpin perempuan ini terjun untuk berbagi ke masyarakat untuk membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar. Dagangan yang siap kirim dibeli oleh para ibu nyai dengan tunai, kemudian dijual kembali kepada masyarakat mampu tanpa mengambil untung. Para pembeli dapat menghubungi para ibu nyai jika ada barang atau kebutuhan lain yang mereka butuhkan. Semua jual beli dilakukan secara daring. Hal-hal seperti ini belum pernah dilakukan oleh perkumpulan ibu nyai ini. Dengan adanya jual beli tersebut, bisnis baru muncul di antara warga sekitar. Dengan munculnya bisnis baru ketika pandemi, masyarakat dengan penuh semangat gotong royong saling membantu, saling berbagi rezeki, dan menciptakan keharmonisan baru.

Tidak hanya berjualan, para ibu nyai juga berusaha mendampingi masyarakat dengan mengabdikan harta, tenaga serta pikiran mereka untuk membantu penghidupan orang-orang sekitar. Mereka membuat pasar barang bekas dengan melelang barang-barang yang mereka punya, seperti baju, sepatu, dan barang lain yang sekiranya pantas dijual. Usaha-usaha tersebut dilakukan



untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak hanya untuk bertahan satu atau dua hari. Ide-ide terus digali agar ekonomi warga tetap berjalan dan tidak ada yang kelaparan. Pada akhirnya, ada kepedulian baru yang tercipta seiring dengan meningkatnya empati masyarakat.

## **Membangun Kehidupan Pesantren Pascapandemi**

Setelah hampir 3 bulan para santri dipulangkan ke asal mereka masing-masing, pada tahun ajaran baru bulan Juli ini diputuskan bahwa pesantren akan dibuka kembali. Untuk menghadapi situasi ini, Kementerian Agama RI (Kemenag) menerbitkan panduan pembelajaran di tengah situasi Covid-19 untuk lembaga keagamaan. Ada beberapa ketentuan utama dan khususnya protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh semua kategori pesantren jika ingin membuka pembelajaran kembali.

Berangkat dari aturan dan protokol tersebut, pondok pesantren Kebon Jambu meminta kepada para santri untuk mentaati protokol kesehatan ketika berangkat dari rumah menuju Ciwaringin. Proses pendaftaran santri baru dilakukan dengan protokol kesehatan, yaitu dengan sistem daring, tetapi juga tetap ada sistem luring dengan menjaga jarak dan menggunakan masker. Kedatangan santri ke pondok pesantren juga dilakukan secara bertahap, baik bagi santri lama maupun santri baru. Pengaturan kedatangan dimulai dengan menerima kedatangan santri per daerah, dimulai dari zona aman lebih dulu. Para santri pun diminta untuk membawa surat keterangan sehat dari dokter sebagai syarat masuk pesantren pascapandemi.



Meski ada kekhawatiran tersendiri untuk membuka pesantren dalam situasi seperti saat ini, tetapi pondok pesantren Kebon Jambu pada akhirnya memberanikan diri. Hal ini didorong dengan adanya harapan untuk mampu melakukan perubahan dalam kehidupan *new normal*. Para pengurus serta para santri dan wali santri ingin kembali ke kehidupan normal dengan gaya hidup normal yang baru. Jika dulunya kedatangan para santri tidak dibatasi, sekarang mereka harus berbesar hati menyesuaikan jadwal kedatangan dengan bertahap. Keputusan besar yang diambil para pengurus pesantren didasarkan pada tanggung jawab pendidikan yang harus tetap berjalan.

## **Bertahan dengan Iman dan Doa**

Pandemi Covid-19 merupakan musibah di luar akal manusia. Ada hubungan panjang dari manusia, alam, dan Allah Swt. di dalamnya. Maka tidak ada satu pun yang mampu melawan musibah ini dan hanya Allah yang mampu menyelesaikan. Maka salah satu yang terus-menerus dilakukan pesantren tidak hanya bekerja, tetapi juga berdoa dan beribadah.

Ketika dihadapkan pada situasi yang tidak menentu seperti pandemi seperti ini, tidak ada alasan untuk menjauh dan mengutuki keadaan. Namun, sudah sepatutnya untuk berdoa dan beribadah dengan lebih rajin. Tentu saja dengan mematuhi semua panduan protokol kesehatan Covid-19. Beribadah bersama, berjemaah dengan menjaga jarak, dan menghindari bersalaman sementara waktu. Seperti dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari



iman. Maka dengan adanya pandemi ini memaksa kita untuk lebih sering mencuci tangan, kita seolah diingatkan kembali untuk menjaga kebersihan. Tidak hanya kebersihan diri sendiri, tetapi juga lingkungan. Ketika dulunya kebersihan dan kesehatan sering diabaikan, kali ini kebersihan dan kesehatan terasa krusial untuk diutamakan. Itulah ilmu dan hikmah yang bisa diambil dari pandemi Covid-19 ini.

Prinsipnya, ketika ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan dengan akal maka semua akan mampu diselesaikan dengan keimanan kita kepada Tuhan. Maka dari itu iman kita sangat penting ketika menghadapi keadaan seperti ini, tidak berbeda halnya ketika menghadapi bencana atau musibah lain. Dengan iman, banyak masalah rumit selesai karena adanya kepercayaan kepada Sang Maha Gaib yang mampu menyelesaikan masalah. Semoga keadaan ini menjadi lebih memantapkan keimanan untuk keridaan Allah.

## **Profil Penulis**

Setelah suaminya wafat, kesedihannya justru membuat ia bangkit dan ekspresif lewat beragam gagasan. Ada sekitar 13 buku yang ia jadikan curahan keresahan hatinya. Tentang patriarki kepemimpinan pesantren, masa jandanya, hingga urusan ranjang. Tentu tidak semua pihak sepaham, tetapi Masriyah Amva percaya bahwa yang terpenting adalah makna yang ia sampaikan. Karena bahasa ungkapannya adalah sebuah kejujuran.



Keunikan bahasa tulisnya adalah menghadirkan Tuhan sebagai kawan curhatnya. Puisi “Surat Cinta untuk Tuhan” misalnya, dilatarbelakangi banyaknya wali santri yang memulangkan anaknya dari pesantren setelah suaminya wafat. Seolah-olah mereka tidak percaya pada kepemimpinan perempuan. Namun, dengan berjalannya waktu, Nyai Masriyah memberi teladan bahwa ia mampu mengelola ribuan santri di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Cirebon.

Berkat pengalaman inspiratif tersebut ia mendapat penghargaan Albiruni Award untuk kategori dakwah melalui seni dan budaya, serta penghargaan SK Trimurti sebagai tokoh gender dan pluralis. “Hari ini kuangkat Engkau, ya Tuhan, sebagai kekasih. Hari ini kuangkat Engkau sebagai pendamping. Dan aku berani membuktikan bahwa Engkau lebih baik daripada sebelumnya. Dan aku berani membuktikan bahwa aku akan lebih baik daripada sebelumnya. Saya yakin dengan didampingi Engkau, saya akan lebih hebat lagi.” – Kutipan “Surat Cinta untuk Tuhan” karya Hj. Masriyah Amva.

Ini saat ini merupakan Pimpinan Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat.





# Agama dan Paradigma Baru dalam Membentuk Ketahanan Pangan dan Resiliensi Masyarakat Desa<sup>1</sup>

Sabrang Mowo Damar Panuluh

Agama sebagai sistem di dalam kehidupan manusia sudah hadir ribuan tahun lamanya. Kita sudah tahu bahwa manusia adalah makhluk yang individual. Manusia punya cara pandang sendiri dalam melihat dunia. Namun selain itu, manusia juga makhluk yang hidup secara komunal. Mereka memiliki ketergantungan satu sama

<sup>1</sup> Tulisan ini disarikan dari materi yang disampaikan Sabrang Mowo Damar Panuluh dalam acara webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020, Seri ke-9, Hari Kelima (dari rangkaian webinar seri 1 hingga seri 18, antara tanggal 1-10 Juli), pada Senin, 6 Juli 2020: 09.00 s.d. 12.00 WIB. Tulisan ini dirangkai oleh **Kusharditya Albi**.

lain. Maka dari itu manusia juga perlu cara pandang komunal agar kehidupan sosial dapat menjadi stabil.

Agama hadir sebagai *world view* yang bisa diadopsi secara bersama. Hal ini karena agama dapat menjadi *platform* untuk menstabilkan kehidupan sosial. Sains memang telah hadir sama tuanya dengan agama. Namun, terkadang fungsi keduanya memiliki perbedaan. Misalnya, dalam kasus wabah Covid-19 ini sains memiliki fungsi sebagai pencari kebenaran. Sedangkan agama dapat berperan sebagai penjaga stabilitas masyarakat. Maka jika agama belum dapat menstabilkan masyarakat berarti belum menjalankan fungsi sepenuhnya.

Indonesia juga telah meletakkan agama sebagai pilar-pilar penting dalam undang-undang maupun dasar negara. Agama kemudian menjadi faktor yang penting dalam kehidupan bernegara. Dengan fungsi agama sebagai “penjaga stabilitas” tadi, tentu menjadi penting meletakkannya pada dasarnya.

Desa sebagai bagian dari negara juga harus mengamalkan agama dalam fondasi dasarnya. Mengamalkan sesuai peran dan porsinya. Setelah kestabilan masyarakat bisa dibangun maka kita baru bisa membangun kepentingan-kepentingan yang lain. Mulai dari ketahanan pangan menuju kemajuan desa hingga proses-proses pembangunan yang lainnya. Semuanya dapat dimulai dari kestabilan masyarakat, masyarakat yang dapat saling membantu satu sama lain, dengan mengamalkan nilai keagamaan dan nilai kemasyarakatan setempat.



Saya pikir ketidakstabilan masih dapat terus dirasakan bahkan hingga masuk ke zaman modern. Kita sering melihat modernitas sebagai komponen yang berbeda. Kita menganggap modernitas adalah hal terbaik yang telah terjadi. Namun, ternyata modernitas belum mampu menjawab masalah-masalah yang sifatnya sistemik. Modernitas juga belum bisa menuntaskan masalah-masalah komunitas.

## **Agama dan Paradigma Baru**

Untuk menjawab itu semua perlu adanya sistem berpikir untuk menyelesaikan masalah-masalah komunal. Tentunya kita harus bisa melihat masalah-masalah itu secara keseluruhan. Tidak bisa hanya dilihat sebagai unsur-unsur yang terpecah, semuanya pasti saling terkait. Misalnya, masalah kemiskinan, terjadi ketimpangan dan ketidakstabilan. Maka harus dilihat apa yang menjadi sebab beruntun dari masalah tersebut.

Agama sebenarnya sudah menyediakan sistem berpikir sejak dulu. Agama sudah melihat segala sesuatu secara holistik. Inilah nantinya yang bisa kita pakai sebagai sebuah paradigma. Dan menurut saya, sains belum cukup dewasa melihat agama sebagai sebuah paradigma. Dulu sains belum mampu melihat segala sesuatu secara holistik. Setelah munculnya era teknologi maju, kita baru mulai kembali melihat segala sesuatu secara holistik.

Jika masyarakat desa mau mengambil paradigma agama sebagai fondasinya maka desa dapat bertahan dan dapat mengantisipasi segala masalah yang ada. Dan tentu akan menjadi sebuah gebrakan



di tengah masyarakat dunia yang sedang mudah dibuat bingung. Itu semua terjadi karena tidak adanya fondasi yang kokoh dan tidak adanya “pegangan”.

Masyarakat dunia hari ini sering dibuat bingung. Mereka sering terkaget-kaget dengan dunia yang serba global. *Ujug-ujug* semuanya bisa terhubung, segala informasi dikonsumsi tanpa filter, dan banyak isu tersebar tanpa bisa kita verifikasi secara mudah. Kita seolah-olah diuntungkan dan dirugikan oleh globalisasi dalam waktu yang bersamaan. Atau dengan kata lain kita tidak tahu sedang diuntungkan atau sedang dirugikan.

Dengan adanya wabah Covid-19 ini saya kira kita semua sedang mengalami disrupsi. Semuanya sedang mengalami kesulitan karena telah terbiasa dengan sistem yang ada. Kemudian kita berusaha beradaptasi dengan menciptakan sistem yang baru dan kebiasaan-kebiasaan baru. Covid-19 ini secara seketika menghentikan semuanya. Saya menyebutnya dengan deglobalisasi.

Sejak hadirnya globalisasi, kita terbiasa untuk terlalu sering melihat apa yang ada di luar diri kita. Kita sibuk dengan diri sendiri untuk melihat dunia luar. Kita jarang melihat ke dalam, melihat apa yang terdekat dalam diri kita.

Nah, covid-19 dan deglobalisasi yang terjadi saat ini menurut saya bisa menjadi momentum penting. Kita bisa berhenti sejenak untuk melihat dunia yang sebenarnya. Berhenti sejenak untuk mengetahui apa yang selama ini terjadi dan apa yang telah kita lakukan. Kita juga punya kesempatan untuk melangkah ke belakang, mengambil dua langkah ke belakang sebelum globalisasi muncul.



Dengan adanya deglobalisasi kita bisa mengingat diri kita dan sekitar kita. Kita bisa kembali kepada komunitas terdekat kita untuk menjalin hubungan yang sebelumnya renggang. Dengan mempererat hubungan antarindividu dalam skala komunitas yang terkecil, kita bisa lebih merekatkan komunitas dengan skala yang lebih besar. Dengan begitu maka kita bisa memakai paradigma agama dalam membuat fondasi yang kuat secara bersama.

Dalam konteks Indonesia tentu desa menjadi komunitas terkecil dalam sebuah negara. Menurut saya, masyarakat desa harus mampu berinisiatif untuk merekatkan ikatan yang renggang ini. Jika desa telah berhasil mengambil peran tersebut maka desa dapat menjadi tulang punggung dari kestabilan masa depan. Jadi, desa perlu ditata sedemikian rupa dengan solidaritas dan paradigma agama agar kestabilan dan resiliensi ke depan dapat lebih terjaga.

## **Replikasi untuk Ketahanan Pangan**

Di masa wabah Covid-19 saya kira semuanya sepakat bahwa yang paling penting untuk diperkuat adalah ketahanan pangan kita. Kita semua tahu banyak produksi pangan yang macet. Apalagi negara juga terkadang masih bergantung pada impor untuk beberapa bahan tertentu. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, bahkan beberapa belum memiliki pekerjaan sebelum Covid-19 terjadi.

Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, hal itu bisa kita atasi jika fondasi kita sudah kuat dan sudah menanamkan paradigma agama. Jika hal itu sudah terlaksana maka kita bisa melangkah pada



tahap penguatan ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan ini sifatnya materi maka perlu adanya kesadaran komunal agar semuanya dapat dilaksanakan dengan adil. Memunculkan rasa solidaritas untuk kepentingan bersama. Kunci yang harus kita pegang dalam ketahanan pangan dan resiliensi adalah adanya replikasi dan redundansi.

Dalam hal ini kita bisa belajar dari alam. Saya akan mencontohkan bagaimana ketahanan pangan dapat tercipta melalui lebah. Ketika di suatu tempat ada bunga maka bunga tersebut tidak akan hanya diserbuki oleh satu lebah. Bunga itu akan diserbuki paling tidak oleh sepuluh lebah. Nah, inilah yang disebut dengan replikasi, sepuluh lebah akan melakukan hal yang sama. Kenapa diperlukan sepuluh lebah untuk melakukan hal yang sama? Itu karena jika satu lebah mengalami kepunahan, sembilan yang lain masih bisa melakukannya. Hal itulah yang menjadi ketahanan terhadap mekanisme penyerbukan.

Pelajaran tentang lebah tersebut bisa kita ambil dan kita pikirkan sebagai upaya membangun desa. Ketika salah satu desa sedang menguatkan ketahanan pangannya maka desa-desa lain harus mereplikasi dengan pola-pola unik dari tempatnya masing-masing. Karena inilah yang menjadi sumber resiliensi. Jika salah satu desa memiliki hambatan, desa yang lain masih bisa menjadi *backup* bagi satu sama lain. Dengan demikian, maka akan terjadi *impact* yang besar bagi komunitas yang lebih besar.

Kita bisa ambil contoh lain, misalnya di Amerika hanya ada 43 bank besar. Jika salah satu bank mengalami kerusakan maka hal



itu akan menjadi masalah sistemik karena *resources* hanya dikontrol oleh satu sumber. Jika hal semacam ini terjadi di Indonesia maka akan menjadi sangat berbahaya. *Resources* tidak bisa hanya dikontrol oleh beberapa entitas saja.

Jika kita memiliki kesadaran dalam momentum Covid-19 ini maka hal ini akan menjadi kesempatan yang bagus. Desa perlu menyadari bahwa perlu adanya replikasi *resources*. Cara agar kita bisa melakukan replikasi adalah dengan membuat kontrol *resources* sendiri di masing-masing desa. Selain itu, masing-masing desa juga perlu memiliki independensi dalam mengatur *resources*-nya. Dengan begitu desa akan selalu memiliki inisiatifnya dalam terus membangun tatanan desa. Karena dalam situasi yang sedang terjadi sekarang kita memiliki kesempatan lagi untuk berpikir ulang.

## **Peran Agama dalam Membangun Tatanan Desa**

Lalu, bagaimana peran agama terhadap semua peristiwa ini? Jika melihat agama, menurut pandangan saya tadi, agama telah menyediakan paradigma holistik dalam memandang sebuah sistem dan masalah. Ketika sains secara dominan melihat masalah sebagai penambahan komponen, agama menyediakan cara dalam memandang sistem sebagai relasi antarkomponen. Misalnya, hubungan satu orang dengan orang yang lain atau hubungan *resources* satu dengan *resources* yang lain.

Selanjutnya yang paling utama adalah bagaimana hubungan antarkomponen. Ketika hubungan ini dipertahankan sebagai sesuatu



yang sehat dan sebagai sesuatu yang adil maka akan menghasilkan efek yang baik dan berdampak secara sistemik. Paradigma semacam ini yang belum lama lahir. Dalam dunia sains, paradigma berpikir secara holistik, saya kira baru berumur selama 10 tahun. Sains baru-baru ini melihat sebuah sistem sebagai pandangan holistik, bukan sebagai pandangan reduksionis.

Saya pikir dunia sedang mengalami krisis yang sama. Ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk membalap pada tikungan. Kesempatan ini bisa kita gunakan untuk menata ulang dan menjadi yang terdepan. Untuk bisa melakukan itu kita perlu melakukan hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Karena menurut saya, sangat tidak masuk akal ketika kita mengharapkan sesuatu yang berbeda, tetapi tetap berpikir dalam cara yang sama. Maka dari itu kita perlu memiliki paradigma baru dan berbeda untuk menghadapi hal ini.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam membangun ulang tatanan desa kita memerlukan agama untuk membangun stabilitas. Jika dengan agama justru membuat ketidakstabilan, berarti hal itu tidak dijalankan sepenuhnya. Selain itu, agama juga memberikan paradigma yang selama ini belum pernah kita gali, yakni paradigma holistik sintesis. Meskipun begitu, sains juga perlu berdampingan dalam menyediakan proses analitiknya.

Jika kita bisa melihat agama dan sains sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kita kemudian bisa membalap di tikungan dan menjadi lebih maju. Karena menurut saya, di dunia ini pemahaman yang dapat mengawinkan agama dan sains belum memiliki



formulasinya yang tepat. Saya harap dengan memakai paradigma semacam ini kita bisa melewati segala situasi apa pun ke depannya. Terutama desa agar dapat kembali berpikir ulang dan membangun tatanannya ke arah yang lebih baik.

## **Profil Penulis**

“Teringat kuteringat, pada janjimu kuterikat. Hanya sekejap kub berdiri, kulakukan sepenuh hati. Peduli kupedulikan siang dan malam yang berganti, sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati.” Lirik lagu “Sandaran Hati” yang dipopulerkan oleh band Letto tersebut sekilas seperti gambaran percintaan manusia. Padahal, jika ditilik lebih jauh, kedalaman lagu ini sangat merefleksikan tasawuf tentang ketuhanan.

Lagu-lagu Letto yang sebagian besar ditulis oleh Sabrang Mowo Damar Panuluh atau lebih dikenal Noe memang syarat makna ketuhanan. Bahkan bisa dikatakan lagu pop romantis tersebut adalah jalan dakwah Noe menyebarkan nilai tasawuf bagi generasi muda. Namun menariknya, sebagai lulusan matematika dan fisika ia justru kerap menjelaskan persoalan agama dengan pendekatan sains. Salah satunya saat acara Kenduri Cinta. Ia menjawab pertanyaan jemaah tentang apa pencapaian manusia yang berangkat dari rasio tentang ketuhanan.

Menurutnya, Tuhan itu dapat dibuktikan secara empiris. Di Fisika ada *Double Slit Experiment*, yaitu dua kali percobaan untuk mengetahui cahaya bisa memiliki dua sifat, yakni sebagai



gelombang dan partikel. Dari sana kita jadi tahu bahwa ada “orang yang mengamati” untuk menyerap informasi percobaan tersebut. Jika cahaya tersebut diandaikan sebagai jagat raya maka jagat raya ini bukan lagi gelombang. Namun, merupakan partikel yang sudah bermanifestasi. Lalu, siapa yang mengamati jagat raya ini? Jawabannya ada di agama, yaitu Tuhan.





# Implementasi Konsep *Tri Tangtu* oleh Masyarakat Adat Desa Cirendeu (Studi pada Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Cirendeu)<sup>1</sup>

Satria Adhitama

## Pendahuluan

Indonesia dihuni oleh masyarakat dengan keyakinan yang berbeda-beda (pluralisme) dan juga budaya yang beraneka ragam (multikulturalisme). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi diperlukan kerja keras semua elemen masyarakat Indonesia untuk mempertahankan

<sup>1</sup> Tulisan disajikan untuk Call for Papers "Kongres Kebudayaan Desa" Desa Panggunharjo, 1 Juni-15 Agustus 2020.

persatuan dan kesatuan, mengingat berbagai macam entitas budaya dan agama ini dapat menimbulkan konflik apabila tidak adanya kesadaran masyarakat untuk hidup bersama di Indonesia.

Hal tersebut terlihat dari banyaknya kasus radikalisme keagamaan di Indonesia yang hingga saat ini tidak terselesaikan seperti kasus Tolikara, GKI Yasmin, HKBP Filadelfia, Persekusi terhadap jemaah Ahmadiyah dan Syiah, dan masih banyak lagi. Tindakan-tindakan intoleransi dan radikalisme semakin banyak dan semakin memperkeruh hubungan antarumat beragama di Indonesia. Diskriminasi juga dilakukan kepada para penghayat kepercayaan di Indonesia. Menurut berita yang dilansir oleh [news.detik.com](http://news.detik.com) bahwa pada tahun 2017, tercatat pemerintah sebanyak 187 kelompok aliran kepercayaan dan 12 juta penduduk Indonesia yang merupakan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, para penghayat kepercayaan dapat mencantumkan kolom agama dengan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tetapi stigma negatif sering kali masih dilabelkan kepada para penghayat kepercayaan. Tindakan intoleransi tidak hanya dilakukan secara personal, tetapi juga dilakukan secara terstruktur. Tak jarang aliran kepercayaan dipandang sebagai animisme, dinamisme, tidak bertuhan, menyembah roh halus (setan), dan sering kali dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat mistis atau perdukunan. Secara struktural aliran kepercayaan mendapat perlakuan yang berbeda dengan agama. Perjuangan panjang para penghayat kepercayaan agar keyakinan para penghayat dapat dicantumkan dalam kolom agama di KTP yang berujung



pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Sebelum dikeluarkannya putusan tersebut para penghayat tidak mendapat pengakuan negara atas pernikahan mereka. Mengingat pernikahan para penghayat tidak mendapat pengakuan dari negara maka anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut tidak dapat dicantumkan atas nama bapak kandungnya. Diskriminasi juga dirasakan oleh anak-anak dari para penghayat ketika dipaksa untuk mengikuti mata pelajaran agama yang diakui oleh pemerintah.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila seharusnya hal ini tidak terjadi mengingat kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaan dijamin oleh konstitusi bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 E yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewargaan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Begitu juga di pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Walaupun negara telah mengatur dan menjamin kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaan serta kebebasan melakukan peribadatan, tetapi tindakan intoleransi dan diskriminasi tidak dapat dihindari oleh warga minoritas di Indonesia khususnya para penghayat. Salah satu faktor penyebab terjadinya tindakan intoleransi dan radikal ini adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai apa yang



diajarkan dalam kepercayaan yang ada di Indonesia. Stereotype dan prejudice muncul karena kurangnya informasi yang cukup dan kredibel tentang berbagai kepercayaan di Indonesia. Diperlukan suatu penelitian atau kajian membahas kepercayaan-kepercayaan di Indonesia. Dengan begitu diharapkan stigma negatif masyarakat terhadap para penganut dapat diminimalisasi sehingga tercipta perdamaian dan akhirnya persatuan dapat terwujud sesuai dengan Pancasila Sila ketiga “Persatuan Indonesia”.

Salah satu kepercayaan di Indonesia yang masih bisa bertahan hingga dewasa ini adalah Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah salah satu bentuk kepercayaan atau agama yang hidup dan berkembang di Jawa Barat. Kepercayaan Sunda Wiwitan meyakini adanya kekuasaan tertinggi di bumi dan langit disebut sebagai Sang Hyang Kersa atau Gusti Sikang Sawiji-Wiji (Tuhan Yang Tunggal). Penganut Sunda Wiwitan tersebar beberapa daerah (daerah) di Jawa Barat seperti Kanekes, Cigugur, Cireundeu, Garut, Ciamis, Tasikmalaya, Kampung Naga, dan lain-lain.

Salah satu komunitas Sunda Wiwitan yang ada di Jawa Barat adalah Sunda Wiwitan Cireundeu. Kampung Cireundeu berada di RW 10 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat. Sebagian masyarakat Kampung Cireundeu adalah penganut agama Sunda Wiwitan atau dikenal sebagai masyarakat adat Kampung Cireundeu. Masyarakat adat Kampung Cireundeu adalah bagian dari masyarakat Akur Sunda Wiwitan yang berpusat di Cigugur Kuningan. Masyarakat adat Kampung Cireundeu disebut masyarakat adat karena masyarakatnya hingga saat ini menggunakan hukum-hukum adat yang sudah turun-



temurun dari leluhur. Hingga saat ini masyarakat adat Kampung Cireundeu melaksanakan beberapa upacara adat, seperti upacara kelahiran, kematian, pernikahan, upacara adat tahunan (tutup taun ngemban taun), upacara adat membangun rumah, dan sebagainya.

Hukum yang dianut oleh masyarakat adat Cireundeu adalah hukum yang berasal dari leluhur Sunda yang dikenal dengan kepercayaan Sunda Wiwitan. Warga masyarakat Akur Sunda Wiwitan di Cireundeu kurang lebih terdiri dari 60 Kepala Keluarga yang masih memegang teguh ajaran dari para sepuh Sunda secara turun-temurun. Sunda adalah salah satu suku di Indonesia lebih tepatnya berada di wilayah Jawa Barat. Sedangkan Wiwitan berarti asal mula. Sunda Wiwitan adalah suatu ajaran yang diajarkan secara turun-temurun oleh leluhur atau sesepuh orang Sunda. Masyarakat adat Cireundeu percaya bahwa dilahirkan sebagai manusia di tanah Sunda dan menjadi bagian bangsa Indonesia. Hal itu bukan kehendak para penghayat, melainkan hukum adi kodrati atau hukum ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Masyarakat adat Cireundeu meyakini bahwa sebagai manusia dan bagian dari Bangsa Indonesia wajib menjalankan apa yang menjadi Cara Ciri Manusa dan Cara Ciri Bangsa. Cara Ciri Manusa adalah welas asih, undak usuk, tata krama, budi daya, budi basa, wiwaha yuda na raga dan Cara Ciri Bangsa adalah rupa, basa, aksara, adat, dan kebudayaan. Hingga saat ini masyarakat adat Cireundeu adalah salah satu masyarakat yang masih mempertahankan ajaran leluhur.

Mempertahankan ajaran leluhur Sunda dibuktikan dengan makanan pokok Desa Cireundeu. Di saat sebagian besar masyarakat Indonesia sangat bergantung dengan beras, masyarakat adat



Cireundeu hingga saat ini tidak memakan nasi dari beras, melainkan menggantinya dengan nasi dari singkong (rasi). Kebiasaan ini sudah berlangsung satu abad lebih. Menurut cerita para sepuh sejarah tidak memakan nasi beras itu merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajah (hayang merdeka lahir batin) karena para sepuh dulu memiliki pandangan bagaimana mau mengangkat senjata atau melawan penjajah jika perut rakyat kosong. Karena sistem tanam paksa dan monopoli yang dilakukan penjajah Belanda maka kurang lebih tahun 1918 parasepuh menganjurkan untuk berhenti memakan nasi dari beras dan beralih mencari makanan pengganti. Selama 6 tahun parasepuh dan masyarakat mencoba beberapa alternatif pangan selain beras, seperti jagung, ubi, talas, sorgum, ganyol, dan lain-lain. Tahun 1924 Abu Sepuh atau Ibu Omah Asnamah menemukan cara membuat nasi dari singkong (teknologi pangan lokal) yang dikenal dengan nama lokal *sangueun* atau sekarang disebut *rasi* (beras singkong). Ibu Omah juga menggaungkan bahwa tanda-tanda kemerdekaan sudah dekat, ternyata gerakan ini diketahui oleh penjajah dan antek-anteknya, Ibu Omah ditangkap dan dipenjara di Sukamiskin kurang lebih 3 bulan lamanya. Apa yang dicita-citakan oleh parasepuh dan rakyat Indonesia ternyata terwujud di tahun 1945 Indonesia merdeka dan tahun 1964 Ibu Omah mendapat penghargaan sebagai Pahlawan Pangan dari Kawedanaan Cimahi. Hingga saat ini masyarakat Desa Cirendeuh masih mengonsumsi *rasi* sebagai makanan pokok.

Pada dasarnya esensi dari sebuah agama adalah mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam. Dalam ajaran Sunda Wiwitan ketiga dimensi



hubungan tersebut dikenal dengan istilah konsep Tri Tangtu. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana implementasi konsep Tri Tangtu dalam kehidupan masyarakat adat Cireunde.

## **Implementasi *Tri Tangtu* oleh Masyarakat Adat Cireunde**

Dimensi pertama yang dibahas dalam konsep Tri Tangtu adalah hubungan antara manusia dan Tuhannya. Sesepeuh Sunda selalu menyebutkan Zat Yang Maha Kuasa dengan sifat-Nya seperti Gusti Sikang Sawiji-Wiji, Gusti Nu Maha Tunggal, Gusti Nu Maha Kawasa, Gusti Nu Maha Uninga, dan lain-lain. Kesemuanya hanyalah sifat dari Tuhan dan sesepeuh Sunda tidak memberikan nama khusus kepada Zat Yang Maha Pencipta atau Tuhan. Manusia tidak memiliki kuasa untuk menamakan Zat yang menciptakan manusia. Hal ini sesuai dengan pepatah Sunda yang mengatakan "urang mah manusa teu wenang nganamian Nu Kawasa" yang berarti manusia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan nama atau menamakan Yang Kuasa.

Hubungan antara manusia dan Tuhan dijembatani dengan ritual sembahyang atau peribadatan. Masyarakat adat Cireunde tidak mengenal ruang dan waktu dalam beribadah, seperti petuah Sunda "tiap menit tiap detik kedah emut ka Nu Maha Kawasa" yang berarti setiap menit setiap detik manusia mengingat Yang Maha Kuasa atau dikenal sebagai Surasa. Surasa adalah upaya mengingat Tuhan yang dilakukan oleh penghayat Sunda Wiwitan tidak terbatas pada waktu dan tempat serta gerakan khusus. Kepercayaan Sunda Wiwitan



Cireundeu meyakini bahwa ibadah itu kepada Tuhan, manusia, dan alam sekitar berdasarkan konsep Tri Tangtu yang terdiri dari tata wayah, tata lampah, dan tata wilayah, yaitu tata waktu, tata perilaku, dan tata wilayah. Jadi beribadah dalam Sunda Wiwitan Cireundeu bisa dilakukan dengan cara sembahyang kepada Tuhan, melihat diri manusia, dan memahami gejala-gejala alam. Konsep Tri Tangtu sangat jelas terlihat dalam peribadatan masyarakat adat Cireundeu.

Dalam menjaga kelestarian alam, masyarakat adat Cireundeu membagi wilayah keadatan dengan tata wilayah ada leuweung larangan, leuweung tutupan, dan leuweung baladahan yang berarti hutan larangan, hutan tutupan, dan hutan pertanian. Hutan larangan adalah hutan yang dipercaya sakral dan tidak boleh dimasuki oleh manusia kecuali dalam kondisi tertentu. Hutan tutupan adalah hutan yang boleh diambil hasilnya oleh warga, tetapi warga harus menggantinya. Sedangkan hutan pertanian adalah hutan yang digunakan untuk mencari nafkah masyarakat sekitar. Aturan tentang wilayah hutan ini dijaga ketat oleh masyarakat adat Cireundeu. Masyarakat adat Cireundeu meyakini bahwa keseimbangan alam dijaga dengan mempertahankan ketiga fungsi hutan tersebut.

Selain mempertahankan keberadaan hutan, hubungan manusia dengan alam tetap dijaga berdasarkan konsep “mugia akur rukun repeh rapih sareng saasama hurip” yang berarti semoga rukun, akur, harmonis sesama makhluk hidup. Dalam ajaran Sunda Wiwitan Cireundeu terdapat tiga jenis makhluk hidup, yaitu makhluk cicing atau tumbuhan, makhluk nyaring atau hewan, dan makhluk eling atau manusia. Pada dasarnya manusia sebagai makhluk paling tinggi derajatnya harus bisa menjaga hubungan yang harmonis atau akur,



rukun, repeh, dan raphi dengan sesama makhluk hidup dengan menjaga wilayah, waktu (wayah), dan kelakuan (lampah). Selain itu sebagaimana disebutkan sebelumnya tentang ibadah penghayat Sunda Wiwitan Cireundeu, dengan berbuat baik kepada semua ciptaan Yang Maha Kuasa berarti manusia sudah menjalankan ibadah ke Tuhan, manusia, dan alam sekitar. Hal ini sesuai dengan ajaran “Gusti nu Asih, Alam nu Ngasah, Manusa nu Ngasuh” yang berarti Tuhan mengasihi, alam memintarkan atau mengasah, dan manusia mengasuh.

Masyarakat adat Cireundeu memiliki petuah leluhur, yaitu “kitab tulis titis tulis maca uga na waruga” yang berarti bacalah diri sendiri, ada apa di dalam diri dan alam sekitar. Masyarakat adat Cireundeu memahami sabda Tuhan dengan merasakan, menelaah, menghayati, dan menganalisis diri sendiri dan alam sekitar. Oleh karena petuah ini, hingga sekarang masyarakat adat Cireundeu tetap mempertahankan kelestarian lingkungan termasuk daerah pemukiman dan hutan.

Selain hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan alam, konsep terakhir dalam Tri Tangtu adalah menjaga keharmonisan antar sesama manusia. Konsep dasar ajaran leluhur Sunda pada umumnya dalam menjaga keharmonisan hubungan antarmanusia adalah silih asah, silih asih, silih asuh. Konsep tersebut mengajarkan bahwa sesama manusia harus bisa saling memintarkan atau mengasah, saling menyayangi atau mengasihi, dan saling membimbing atau mengasuh. Masyarakat adat Cireundeu hingga saat ini masih berpedoman dengan ajaran tersebut dan mengimplementasikannya dengan pepatah ”walagri bibit saati waluya kedal ku ucap punahna



ku laku diri” yang berarti manusia dalam menjalani kehidupan harus selaras antara niat, ucapan, dan perbuatan. Sebaik apa pun ajarannya, sehebat apa pun tutur katanya, semuanya akan sia-sia apabila hal tersebut tidak diikuti dengan perilaku yang baik yang sesuai dengan ajaran dan tutur katanya. Pepatah tersebut menggambarkan bahwa pemikiran manusia berbeda-beda yang satu dengan lainnya, tetapi manusia harus saling memahami layaknya tubuh manusia yang tidak pernah memperdebatkan dalam mendefinisikan sesuatu. Misalnya untuk mendefinisikan buah nangka yang matang atau masak, mata manusia akan mendefinisikan dengan buah yang besar dan hijau, telinga mendefinisikan nangka yang masak dengan suara jatuhnya, lidah mendefinisikan nangka yang masak dengan rasa yang manis, sedangkan hidung dengan bau yang wangi, tangan dengan tekstur yang lembek. Setiap anggota tubuh mendefinisikan sesuai dengan perspektif masing-masing, tetapi tidak terjadi perdebatan dan bertengkar untuk memaksakan jawaban, bahkan saling melengkapi dalam mendefinisikan buah nangka yang masak. Perbedaan pendapat atau pemikiran seharusnya mampu menghadirkan suatu ide atau gagasan yang sempurna.

Hubungan antarmanusia diperlihatkan oleh warga Desa Cirendeu secara keseluruhan, di mana warga Desa Cirendeu tidak hanya beragama Sunda Wiwitan, tetapi juga ada yang beragama selain Sunda Wiwitan, seperti Islam dan Kristen. Namun, banyak kegiatan dilakukan secara bersama-sama, seperti kerja bakti bersih-bersih desa, pesta pernikahan, dan lain-lain. Selain itu ketika ada kegiatan keagamaan semua warga terlibat tidak membedakan antara penghayat Sunda Wiwitan atau muslim, seperti ketika warga



Cireundeu yang beragama muslim sedang mengadakan Rajaban atau Mauludan, penghayat Sunda Wiwitan turut membantu, misalnya dalam hal teknis sound system. Hubungan harmonis antara warga muslim dan Sunda Wiwitan juga terlihat dari wilayah pemakaman yang tidak membedakan antara pemakaman muslim atau pemakaman Sunda Wiwitan, semua warga bisa dimakamkan dalam satu kompleks pemakaman tanpa membedakan agamanya. Pada dasarnya warga Cireundeu memiliki hubungan harmonis tersebut karena warga memegang teguh pepatah Sunda yang mengatakan “teu sapangakuan nu penting sapangartian” yang artinya tidak masalah berbeda pengakuan yang terpenting adalah satu pengertian.

Pepatah Sunda tersebut diwujudkan juga dalam upacara adat Kampung Cireundeu atau lebih dikenal dengan “Tutup taun ngembang taun siji Sura taun Saka Sunda” yang biasanya dilaksanakan setiap tahun di awal bulan Sura. Pada tanggal satu Sura pagi hari masyarakat adat Kampung Cireundeu khususnya penghayat Sunda Wiwitan berkumpul di Bale Sarasehan dan kurang lebih pukul sembilan pagi upacara adat dimulai. Upacara diawali dengan berdoa dan lantunan kecapi ‘Rajah’ yang dilanjutkan dengan wejangan dari para sepuh dan diakhiri dengan sungkeman. Acara dilanjutkan dengan melakukan ziarah kubur atau nyekar atau ngembang ke makam sesepuh dan kerabat. Dimulai tanggal 1 Sura sampai akhir bulan Sura, para penghayat Sunda Wiwitan Cireundeu bergiliran memasak makanan, bahkan menyembelih ternak untuk dimasak dan dibagikan ke tetangga tanpa memandang agama maupun suku. Begitu pun yang beragama muslim di Hari



Raya Idul Fitri membagikan makanan kepada semua warga tanpa memandang agama dan suku.

Di penanggalan 10 Sura masyarakat adat Kampung Cireundeu juga berkumpul untuk tradisi makan bubur Sura, sedangkan di penanggalan Lilikuran antara 21-29 Sura (waktu ditentukan oleh gempungan adat atau musyawarah) merupakan puncak bulan Sura yang biasanya dilaksanakan 3 hari 3 malam. Pada waktu puncak tersebut semua elemen masyarakat tanpa membedakan suku dan agama turut terlibat. Pada waktu puncak ini, acara diisi dengan kesenian sekitar Bandung Raya, seperti tahun 2019 hari pertama dibuka oleh 'Damar Sewu' dari masyarakat adat yang dilanjutkan tari-tarian Sunda dengan diiringi gamelan dari Pura Wiraloka Cimahi. Acara dilanjutkan Terawangsa dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Keesokan harinya dibuka pencak silat dari kampung Cireundeu dan dilanjutkan oleh lebih dari 15 perguruan yang datang se-Bandung Raya. Acara selanjutnya adalah Rampak Sekar ibu-ibu PKK RW 10 Karinding dari Batujajar, dan diakhiri dengan Reog dari Garut.

Pada hari ketiga acara dimulai di pagi hari dengan Upacara Ngajayak atau membawa makanan berupa daun, pucuk, kembang, buah beuti, sato darat, sato cai, nu atah nu di asakan dibawa oleh seluruh lapisan masyarakat dengan pakaian adat masing-masing. Acara dimulai dari mumunggang dibawa ke Bale Saresehan tempat berkumpul. Rombongan disambut dengan berbagai kesenian seperti angklung buncis, tari tani, tari merak, permainan tradisional,



gamelan degung yang dipimpin oleh Ki Lengser. Kegiatan ini dilaksanakan secara terbuka, boleh disaksikan oleh siapa pun tanpa memandang suku dan agama.

**Gambar 1** Acara Puncak Bulan Sura Dihadiri oleh Seluruh Warga Desa



Sumber: Dokumentasi Warga Cireundeu



**Gambar 2** Permainan Tradisional Sunda pada Acara Puncak 1 Sura



Sumber: Dokumentasi Warga Cireundeu

Setelah rombongan berkumpul di Bale Saresehan dan makanan diletakkan di tengah Bale, selanjutnya dilaksanakan doa bersama yang dipimpin oleh masing-masing pemuka agama, dimulai dari doa agama muslim, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan pemuka adat atau sesepuh untuk doa Sunda Wiwitan. Setelah pembacaan doa selesai, makanan yang sudah didoakan dimakan bersama oleh seluruh warga Desa Cireunde, baik yang beragama Sunda Wiwitan maupun selain Sunda Wiwitan. Acara 1 Sura telah selesai ditandai dengan pementasan acara kesenian



sampai dengan esok pagi seperti jaipongan, gondang, dan wayang golek.

Berdasarkan penjelasan tersebut tampak bahwa warga Desa Cireundeu sangat menjunjung tinggi keharmonisan hubungan dengan sesama manusia tanpa membedakan suku maupun agama. Hal tersebut sudah dijalankan selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun karena warga Desa Cireundeu masih memegang teguh ajaran leluhur atau sesepuh Sunda.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil peninjauan dan pengamatan peneliti dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Cireundeu hingga saat ini sudah mengimplementasikan konsep Tri Tangtu secara lengkap. Hal tersebut dapat terjadi mengingat masyarakat adat Cireundeu sangat memegang teguh ajaran leluhur atau sesepuh Sunda yang diajarkan dalam kepercayaan Sunda Wiwitan. Kepercayaan Sunda Wiwitan Cireundeu meyakini bahwa ibadah itu kepada Tuhan, manusia, dan alam sekitar berdasarkan konsep Tri Tangtu yang terdiri dari tata wayah, tata lampah, dan tata wilayah, yaitu tata waktu, tata perilaku, dan tata wilayah. Jadi beribadah dalam Sunda Wiwitan Cireundeu bisa dilakukan dengan cara sembahyang kepada Tuhan, melihat diri manusia, dan memahami gejala-gejala alam. Selain itu dimensi hubungan antara manusia dan Tuhan dalam kepercayaan Sunda Wiwitan Cireundeu dijalankan dengan melaksanakan ritual berdoa atau sembahyang dengan setiap saat mengingat Tuhan. Dimensi hubungan yang kedua, yaitu hubungan antara sesama manusia,



di mana Desa Cireundeu memiliki hubungan yang harmonis tanpa membedakan suku dan agama. Warga yang beragama Sunda Wiwitan bisa berbaur dan bekerja sama dengan warga desa yang beragama selain Sunda Wiwitan. Dimensi terakhir adalah hubungan manusia dengan alam di mana masyarakat adat Cireundeu membagi wilayah keadatan dengan tata wilayah, ada leuweung larangan, leuweung tutupan, dan leuweung baladahan yang berarti hutan larangan, hutan tutupan, dan hutan pertanian. Pembagian hutan tersebut agar terjadi keselarasan dan keseimbangan hidup antara manusia dan alam.

## **Daftar Pustaka**

Adnan, Adnan and Solihin, Solihin. 2018. "Keyakinan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Adat Masyarakat Cireundeu Kota Cimahi". <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/16195>

Heriyanto, Ranjet. 2019. Komunikasi Ritual Pada Upacara Adat Satu Sura Di Desa Adat Cirendeu (Studi Deskriptif Tentang Komunikasi Ritual Masyarakat Adat Desa Cirendeu Pada Upacara Adat Satu Sura Dalam Menunjukkan Rasa Syukur Kepada Gusti Sikang Sawijiwijji). Other thesis, Universitas Komputer Indonesia. <http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2354>

Jamil. M. Muhsin. 2008. Agama-agama baru di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Miswanto. 2009. Esensi Falsafah Jawa Bagi Peradaban Umat Hindu. Bali: Paramita.



Mozaika, Lungguh Relifia. 2014. “Tradisi Dan Perubahan Sosial Ekonomi Warga Kampung Adat Cirendeui (1960-2008)”. dalam *Factum: Antologi Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, vol 3(2).

<http://jurnal.upi.edu/factum/view/3461/tradisi-dan-perubahan-sosial-ekonomi-warga-kampung-adat-cirendeui--1960-2008-.html>

Nugroho, Wahyu. Kees de Jong. 2019. *Memperluas Horizon Agama dalam Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia.

Nurhayanto, Puji dan Dadan Wildan. 2016. “Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Cireundeui”. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, vol 6(1). <https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i1.2872>

Pikiran Rakyat. (2019, 14 Maret). “Laporan Khusus: Menilik Kosmologi Tritangtu”. *Pikiran Rakyat*, 14 April 2019, dilihat 21 Juni 2020. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01310222/laporan-khusus-menilik-kosmologi-tritangtu>

Sasmita, Hengki. 2015. “Sunda Wiwitan: Ajaran Asal Orang Sunda”. Dilihat 20 Juni 2020., <https://adoc.tips/sunda-wiwitan-ajaran-asal-orang-sunda27e947c80b483715895f34f2c083c56288440.html>

Saut, Prins David. (2017, 9 November). “Ada 187 Organisasi dan 12 Juta Penghayat Kepercayaan di Indonesia”. *Detik*, 9 November 2017, dilihat 18 Juni 2020. <https://news.detik.com/>



berita/d-3720357/ada-187-organisasi-dan-12-juta-penghayat-kepercayaan-di-indonesia

Susanto, Budi. 2007. *Sisi Senyap Politik Bising*. Yogyakarta: Kanisius.

Syahira, Nina. 2019. Sikap masyarakat adat terhadap nilai-nilai toleransi beragama hubungannya dengan perilaku keberagaman mereka: Penelitian terhadap masyarakat adat Kampung Cireundeu RW 10 Kota Cimahi. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/20496>

Tramontane, P. 2018. “Tinjauan Konsistensi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu Dalam Melestarikan Adat Istiadat Leluhur”. *Ultimart: Jurnal Komunikasi Visual*, vol 10(2), 12-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.31937/ultimart.v10i2.769>

Wahyuni, Adira dkk. 2019. “Kearifan Budaya Lokal Kampung Adat Cirendeudeu Sebagai Wisata Budaya Di Kota Cimahi”. *Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia*. Dilihat 20 Juni 2020. [https://www.researchgate.net/publication/338033457\\_KEARIFAN\\_BUDAYA\\_LOKAL\\_KAMPUNG\\_ADAT\\_CIRENDEU\\_SEBAGAI\\_WISATA\\_BUDAYA\\_DI\\_KOTA\\_CIMAHI](https://www.researchgate.net/publication/338033457_KEARIFAN_BUDAYA_LOKAL_KAMPUNG_ADAT_CIRENDEU_SEBAGAI_WISATA_BUDAYA_DI_KOTA_CIMAHI)

Warass, Dezar Syirod. 2019. *Interaksi sosial keagamaan: Studi terhadap masyarakat penganut Sunda Wiwitan dan Islam di kampung Adat Cireundeudeu, Kota Cimahi, Kelurahan Leuwihpanjang, Kecamatan Cimahi Selatan*. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/23176>



Widyaputra, Fauzan Ahdi. Evi N., dan Iriana B. 2019. “Citra Kampung Adat Cireundeu pada Ritual Suraan”. *Profesi Humas*, vol 3(2). <https://doi.org/10.24198/prh.v3i2.14953>

## **Profil Penulis**

Ia adalah staf pengajar di Politeknik Keuangan Negara STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara). Ia meraih gelar Master Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia. Ia telah mempublikasikan beberapa judul karya di *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, antara lain: “Tinjauan Pengawasan Stuffing Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai”, “Tinjauan Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Subkontrak Barang Impor dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dengan Jaminan pada Wilayah Kerja KPPBC TMP A Bandung”, dan “Tinjauan atas Penyusunan, Pemutakhiran, dan Pendistribusian Database Nilai Pabean (DBNP)”.





# Epilog

**Kongres Kebudayaan Desa**

**Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A:**

**Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa**

*Ryan Sugiarto*

*(Ketua Penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa,*

*Ketua Yayasan Sanggar Inovasi Desa)*

## **Pengantar: Cerita dari Ruang Kendali dan Operasi**

**T**epat dua hari sebelum Idulfitri (24 Mei 2020), ruang Pusdalop (Pusat Data dan Operasi) Balai Desa Panggungharjo masih tampak riuh. Sejumlah anak muda mengoperasikan komputer, mengelola sistem informasi, dan menulis modul mitigasi Covid-19. Ruangan ini merupakan tempat konsolidasi dan mitigasi Covid-19 Desa Panggungharjo. Dari ruangan ini pula beberapa langkah mitigasi klinis dan nonklinis (sosial, ekonomi, keamanan) Desa

Panggungharjo disusun untuk memandu seluruh *stakeholder* desa bersama-sama melawan Covid-19.

Desa Panggungharjo melalui Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) mengajarkan bagaimana desa tidak harus melakukan *lockdown* total, tetapi justru menjadi pemecah masalah Covid-19. Desa Panggungharjo dalam situasi darurat telah melakukan serangkaian pencegahan dengan aksi tanggap melalui identifikasi kondisi klinis harian warganya, baik secara fisik maupun psikologis. Desa Panggungharjo berinisiatif menghadirkan pelayanan dari negara untuk penanganan Covid-19 dengan mengedepankan penggunaan teknologi melalui dua platform utama yakni Platform Laporan dan Platform Dukung.

Selain mitigasi klinis, ekonomi, dan sosial, desa juga mentransformasikan dirinya sebagai representasi negara yang paling depan untuk mengorganisir segala sumber daya. Pemerintah desa aktif menggerakkan kemampuan kerelawanan warga mulai dari logistik hingga bantuan nonfisik. Warga juga didorong menjadi warga negara aktif untuk saling membantu sesama dengan prinsip *tanggung renteng*. Semua dilakukan berbasis data desa.

Dari sisi mitigasi ekonomi, *pasar.desa.id* menjadi platform penting pengelolaan ekonomi di tengah pandemi dan sesudahnya. Pasar desa menjadi *market place*—toko barang-barang warga desa—agar ekonomi terus berputar di desa, alih-alih lari ke luar desa. *Tagline* berbagi belanja menjadi napas lini ini.

Bagaimana dari sisi tata pemerintahan dan pengaturan hidup bersama warga? Kongres Kebudayaan Desa disusun sebagai panduan merevisi rencana pembangunan jangka menengah desa. Tepat



dua hari sebelum lebaran, gagasan ini dilahirkan sebagai respons terhadap pandemi dan bagaimana hidup serta kehidupan warga desa kemudian dirumuskan. Selama 2 minggu awal, konsep dirumuskan, kerangka acuan kerja dituliskan, 18 tema sekaligus *term of reference* disusun, ide digelindingkan. Dan kita tahu gagasan ini menjadi gerakan bersama. Cukup banyak jejaring kemudian turut mengukung gagasan ini, membantu dalam implementasi, pewacanaan gagasan, hingga perumusan-perumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa. Pertanyaannya, kenapa Kongres Kebudayaan Desa?

## **Memahami Situasi di Tengah Pandemi**

Bangunan kebudayaan Indonesia bukanlah sesuatu yang terberi (*given*) begitu saja. Kebudayaan Indonesia adalah hasil interaksi historis pelbagai kebudayaan nusantara, mulai dari Melayu, Jawa, Bugis, Papua, Aceh, dan suku bangsa lain yang hidup dalam ruang kultural dan sosial kepulauan nusantara. Interaksi historis kebudayaan Indonesia itu adalah bukti sejarah kebudayaan kita yang dinamis. Interaksi jalin menjalin antarkebudayaan-kebudayaan nusantara menghasilkan rona kebudayaan yang plural sebagai kekayaan negara bangsa kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau di Indonesia yang terhubung melalui media laut, pelayaran, perdagangan, dan pertukaran-pertemuan antarkebudayaan sejak berabad-abad lalu. Jadi, generalisasi bahwa kebudayaan Indonesia adalah umum dan abadi perlu kita kaji ulang.

Perubahan kebudayaan menempatkan manusia menjadi ekosistem hidup yang sangat berkuasa dengan teknologi yang ia



miliki: mengeksploitasi alam habis-habisan dengan kecenderungan besar merusaknya, alih-alih hidup berdampingan dengan alam dan memeliharanya. Dengan teknologi, manusia memproduksi barang yang tak diperlukan. Nilai barang pun ditentukan oleh kemasan. Sebagai contoh, air yang seharusnya dimiliki oleh publik berubah kepemilikannya di tangan korporasi yang memproduksi dan mengemasnya dalam botol-botol plastik. Pertambahan nilai inilah yang menyebabkan harga air menjadi jauh lebih mahal ketimbang nilai aslinya.

Rantai produksi-konsumsi manusia pun semakin panjang. Pola ini mengingatkan kita bahwa dunia telah bergeser dari paradigma *kosmosentris* ke paradigma antroposentris. *Kosmosentris* memandang alam sebagai sesuatu yang sakral. Kosmos yang sakral membuat hidup manusia tidak terpisah dari alam. Dengan demikian, pada paradigma ini, manusia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan karena alam merupakan bagian tidak terpisahkan dari dirinya dan berada dalam pola relasi yang sederajat. Dalam paradigma antroposentrisme, manusia menjadi pusat segala sesuatu. Manusia sangat mengandalkan rasionalitas dan subjektivitas yang individualis. Hal ini berdampak pada pola relasi manusia dan alam. Pola relasinya menjadi *subordinatif* dan *dominatif*. Alam tidak lagi dipandang sakral dan tidak menjadi bagian dari dirinya sendiri. Alam dianggap sebagai benda mati yang bisa diatur. Akibatnya, manusia seenaknya melakukan eksploitasi terhadap alam untuk kepentingan diri sendiri. Ujungnya, sistem ekonomi pun menjadi terbalik. Semula orang memproduksi untuk memenuhi kebutuhan, sementara sekarang sistem ekonomi berfokus menciptakan kebutuhan konsumsi (yang perlu atau tidak perlu)



dan produksi pun mengikutinya. Akibat dorongan konsumsi yang selalu diciptakan dan produksi yang terus digenjut maka bumi kita pun menjadi korban. Bumi dieksploitasi habis-habisan. Kapitalisme neoliberal diamini meski bencana ekologis mengintip dan perlahan pasti datang.

Hari-hari ini manusia tengah menuai bencana itu. Sejak Desember 2019, pelan tapi pasti, dunia memasuki *retreat* yang panjang. Aktivitas berhenti, pemerintahan di seluruh dunia menghadapi virus Covid-19 yang belum ditemukan vaksinnnya. Alam menunjukkan taringnya, mengurung manusia untuk tidak serakah. Manusia kemudian menjadi resah: ekonomi, agama, teknologi, birokrasi terkendala luar biasa. Negara-negara yang sebelum Covid-19 memberi jarak pada pengaturan ekonomi dan memberikan tempat seluas-luasnya kepada peran swasta melalui kapitalisme neoliberal kini kembali memainkan kendali penuh meski akhirnya tampak keteteran dan merapuh. Birokrasi yang menjadi kaki tangan negara macet. Semua orang frustrasi dan kecewa dengan gerak negara yang cenderung lamban berhadapan dengan Covid-19<sup>1</sup>.

Di Indonesia, sejak pertengahan Maret 2020, seluruh pekerja kantor mengubah ritme kerjanya menjadi *work from home* (WFH). Kondisi ini menjadi pukulan telak di berbagai sektor kehidupan. Kelas menengah yang biasanya sibuk beraktivitas di berbagai tempat kini berdiam di rumah. Sektor informal bubar karena sepihnya aktivitas akibat pembatasan sosial berskala besar. Pekerja warteg, buruh bangunan, pedagang kecil, tukang parkir serabutan,

---

1 Wibowo, A. Setyo. 2020. "Covid 19: Meditasi Heideggerian". Dalam Majalah Basis, Nomor 05-06, Tahun ke 69 2020, hlm. 11.



pengemudi ojol dan taksi, sampai mal, kafe, gedung bioskop, hotel dan ruang-ruang diskusi serta seminar mengalami hibernasi. Saat roda ekonomi berhenti, risiko yang dihadapi ke depan semakin menyieramkan. Sebanyak 1,2-2 juta pekerja terkena PHK<sup>2</sup>.

Angka kemiskinan yang sejak reformasi bergulir coba dikurangi, dalam sekejap naik berkali-kali lipat. Mereka yang sempat terangkat dari kemiskinan, akibat Covid-19 akhirnya kembali ke jurang kemiskinan. Bantalan dan jaring pengaman sosial diturunkan. Dana 110 triliun direlokasi menjadi bantuan sosial bagi masyarakat. Hingga 8 Mei 2020, 479 daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD. Dari laporan ini, komposisi belanja daerah mengalami perubahan, yaitu adanya penurunan belanja barang/jasa dari 24,87% menjadi 20,86% dan modal dari 18,16% menjadi 12,89%. Di sisi lain, ada kenaikan belanja lainnya, yaitu dari 24,63% menjadi 30,33% yang ditujukan untuk bansos dan belanja tidak terduga. Total belanja yang direalokasi dan *refocusing* sebesar Rp51,09 triliun, yang ditujukan untuk bidang kesehatan (Covid-19) sebesar Rp22,34 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp18,88 triliun, dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp9,88 triliun<sup>3</sup>.

Selain dampak ekonomi, Covid-19 juga membawa dampak lain dalam kehidupan sosial masyarakat. Timbul rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang di seputar kita, juga pada orang yang kita belum kenal. Sebagai contoh, saat membeli makanan, baik di rumah makan maupun warung kaki lima, ada

2 Wibowo, A. Setyo. 2020. Ibid. Lihat pula <http://www.cnbcindonesia.com/news/20200408213040-4-150737/bikin-merinding-12-juta-pekerja-kena-phk-dirumahkan>.

3 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi-dan-refocusing-anggaran-untuk-penanganan-covid-19-di-indonesia/>.



kecurigaan yang muncul. Apakah pelayan bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak, apakah pekerja warung mencuci tangan pada saat mengolah makanan yang dipesan atau tidak, dan seterusnya. Keraguan pun muncul. Prasangka dan diskriminasi terus terjadi, bukan hanya karena apakah seseorang menderita Covid-19, melainkan juga karena identitas yang sudah melekat padanya. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Relasi berubah, perilaku pun demikian.

Di sektor pendidikan, sekolah dan kampus lumpuh. Seluruh proses pendidikan dilakukan dari rumah. Covid-19 menyadarkan kita bahwa pendidikan yang selama ini sepenuhnya ditanggungkan pada sekolah telah berubah dan dikembalikan pada intinya, yaitu pendidikan keluarga. Orang tua diajak kembali memperhatikan pendidikan anak. Anggapan bahwa sekolah sebagai penanggung jawab tunggal atas pengajaran kini direvisi total. Kondisi ini membuat seluruh tatanan keluarga berbenah. Mau tidak mau, keluarga diharapkan menjadi tangguh karena ia satu-satunya ruang yang dianggap aman secara fisik maupun secara psikologis dari Covid-19.

Wabah ini telah merenggut ribuan nyawa manusia dan membuat dunia panik, takut, dan cemas. Orang tak lagi mampu menguasai serta mengendalikan diri dengan menciptakan situasi yang kondusif. Orang cenderung responsif terhadap penyebaran wabah ini sampai-sampai melupakan orang di sekitarnya. Bahkan berita-berita hoaks oleh berbagai media pun akan dibenarkan karena setiap pribadi dihalusinasi oleh keadaan.



Pada bagian lain, tata kelola dan perlakuan kita terhadap alam harus direfleksikan ulang. Proyek modernitas yang menurut Immanuel Kant merupakan proses “pendewasaan manusia” harus dikritik agar proyek ini tidak terus-menerus merusak alam yang artinya merusak dirinya sendiri (manusia). Salah satu pendapat kritis muncul dari filsuf Fritjof Capra yang mengungkapkan keberadaan dan makna kehidupan manusia dalam segala tingkatan, baik pada level biologis sampai ke level ekonomis dan spiritual, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan alam semesta dan seluruh isinya. Berdasarkan pandangan Capra, pandemi Corona adalah bentuk pembalasan alam terhadap manusia yang telah mengingkari dirinya sendiri. Dalam terminologi Jawa, kita mengenal *sapa nandur bakal ngunduh* ‘siapa yang menanam akan menuai’.

Covid-19 telah membuat peradaban manusia modern dikoyak-koyak menjadi tak berharga. Kehidupan manusia modern yang dibangun berdasarkan pada kecepatan gerak, *linearitas* berpikir, ketajaman rasio, kemenangan cara pandang individualis, dan perang teknologi kini lumpuh total di hadapan virus yang tak kasat mata. Kita baru sadar bahwa manusia modern adalah manusia-manusia rapuh. Peradaban politik, ekonomi, sosial di bawah bendera modernisme kini berada di titik nadir dan layak untuk kembali dipertanyakan ulang. Mau dibawa ke manakah kehidupan manusia dan bumi ini? Apakah kita sudah berada di arah membangun yang benar? Mungkin inilah waktu yang diberikan kepada manusia untuk mempertanyakan apa yang telah mereka jalani selama ini. Mungkinkan manusia sedang berada pada ujung kepunahannya?



## **Pandemi yang Mendekonstruksi dan Upaya Merumuskan Tatanan Baru**

Fakta dan data virus Corona membuka sudut pandang bahwa ketidakpastian kognitif berhubungan dengan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan kepercayaan dan sikap. Dalam situasi ini, satu sama lain tidak mampu diatasi oleh perusahaan industri kesehatan. Setidaknya sejauh ini positivisme juga fenomenologi belum mampu menjawabnya.

Covid-19 menyadarkan kita bahwa manusia dan sistem pemikirannya sangat rapuh dan rentan. Kapitalisme sebagai buah gagasan manusia telah menghancurkan dirinya sendiri. Konsepsi neoliberalisme luluh lantak oleh Covid-19. Ideologi sistem ekonomi pasar kapitalisme dan sistem demokrasi dunia mengindikasikan kegagalan dalam membangun industri kesehatan untuk menghormati martabat manusia yang dibuktikan dengan langkanya alat-alat kesehatan. Di beberapa negara, industri tradisional mulai dilibatkan untuk menanggulangi kondisi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas basis ideologi pembangunan ekonomi tidak dapat menjamin martabat manusia dan keadilan sosial. Sementara sosialisme juga tak mampu menawarkan apa pun dalam kondisi semacam ini.

Kesimpulannya, ideologi ekonomi dan paradigma pembangunan kesehatan manusia dengan fakta empiris data wabah virus Corona sama dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Bell dalam buku *The End of Ideology* (1960). Ia menuturkan bahwa ideologi *grand-humanistik* yang lebih tua, yang berasal dari abad ke-19 dan awal



abad ke-20 telah habis, dan ideologi baru yang lebih baik akan segera muncul. Daniel Bell berpendapat bahwa ideologi ekonomi, demokrasi, dan sistem politik telah menjadi tidak relevan di antara orang-orang yang “masuk akal”, dan pemerintahan masa depan akan didorong oleh penyesuaian dekonstruksi tatanan baru.

Maka perlu upaya dekonstruksi atas isme-isme dan instrumen pelaksanaannya. Tatanan baru pun mesti dirumuskan. Meminjam konsep filsafat analitik pascamodern yang dipopulerkan oleh Jacques Derrida (1930-2004), *dekonstruksi* ditujukan kepada upaya pembongkaran terhadap kemapanan pemaknaan simbol dan bahasa (analitik) yang melekat kesadaran manusia. Dekonstruksi istilah gerak sosial dalam konteks bencana wabah justru membatasi gerak persinggungan fisik yang bermuara pada jalinan sosial dan bertentangan dengan pemaknaan yang selama ini melekat kesadaran masyarakat umum sebagaimana aktivitas jabatan, berpelukan, atau aktivitas fisik lain. Gerak sosial tersebut kemudian dapat diarahkan kepada aktivitas akal budi yang melibatkan segenap instrumen *rubiyah* meliputi rasa, karsa, dan cipta, untuk memproduksi konsep gerak sosial baru.

Selama ini, Covid-19 sering kali dinilai dari sisi negatif sebagai sebuah ancaman, tetapi satu hal yang luput dari kesadaran kita adalah bahwa wabah ini mendekonstruksi semua tatanan. Berangkat dari kenyataan bahwa pemerintah tidak membangun perencanaan yang baik dan selalu bergerak lambat, tata ruang itu kemudian diambil alih oleh swasta dan kekuatan modal. Tebersit di pikiran, “Apakah Covid-19 diciptakan bukan bebas nilai? Apakah ada



sebuah gelombang baru pasca-Covid-19? Apakah ada sebuah upaya dekonstruksi dan konstruksi lain yang sudah disiapkan?”

## Hipotesis

Dalam kondisi ini penting untuk setidaknya membangun gagasan alternatif dan konstruksi baru dalam relasi-relasi sosial kebudayaan. Selama 3-4 bulan bercengkerama dengan Covid-19 telah menyadarkan banyak hal. *Pertama*, kita tidak bisa hidup sendiri. Institusi sekolah dan agama tidak lagi penting dan keluarga menjadi sandaran akhir sekaligus juga awal dari segalanya. Nilai utama relasi sosial berasal dari keluarga hingga melahirkan etik baru dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya.

Covid-19 mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Maka hipotesis yang perlu dibuktikan adalah apakah puncak dari relasi sosial adalah gotong royong? Apakah puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama? Apakah puncak dari relasi politik adalah musyawarah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin diuji dan dibuktikan dari serangkaian agenda Kongres Kebudayaan Desa. Dan kesemuanya itu tentu saja membutuhkan kesetaraan yang oleh Habermas dinamai sebagai *demokrasi deliberatif*. Rebut kesempatan untuk membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*. Dan hal ini tidak lepas dari nilai-nilai luhur nusantara, sehingga gagasan alternatif ini bercorak khas nusantara. Kita tidak lagi mengadopsi gagasan dari luar yang berjarak dengan konteks kita. Kita punya gagasan gotong royong, selain sosialisme dan kapitalisme.



## **Kongres Kebudayaan Desa**

Kita telah mencermati, mengalami, dan berjibaku dengan Covid-19 dan kenyataannya hingga hari ini kita belum bisa keluar darinya. Namun, tidak ada kata menyerah di dalamnya. Perjuangan harus berumur panjang. Maka siasat-siasat kebudayaan perlu dirumuskan untuk mengelak dari kehancuran dan kehilangan nyawa yang lebih banyak lagi, mengelak dari kepunahan manusia. Pandemi memberikan sisi positif bahwa manusia dengan segala daya, akal budi, dan kreativitasnya harus mencari ruang “perlawanan” yang lebih baik. Menyerah berarti mengantarkan kematian dan hancurnya kemanusiaan. Maka tidak ada kata lain selain terus berjuang. Dan perjuangan itu harus dimulai dari desa, sebuah entitas negara yang paling dekat dengan warganya. Tidak ada jenjang pemerintahan yang lebih dekat dengan warga selain desa.

Karena itulah perlu disusun serangkaian upaya untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru bernegara dan bermasyarakat di era pandemi dan sesudahnya. Sekali lagi, dimulai dari desa. Apa dan bagaimana tatanan baru itu? Kongres Kebudayaan Desa (KKD) yang akan menjawabnya.

Kongres Kebudayaan Desa adalah pertemuan antara para pemangku desa (pemerintah desa, lembaga, komunitas, dan warga desa), para pemikir, akademisi yang memiliki ketertarikan terhadap isu desa ataupun bisa jadi lahir dan tumbuh dalam ekosistem desa, para praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan pekerja media yang berupaya merumuskan kembali arah tatanan Indonesia baru dari desa.



Kongres ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang meliputi ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community, government, finance*, dan media. Kesemuanya akan berkontribusi untuk bersama-sama dengan warga desa merumuskan tatanan Indonesia baru dari desa. Kongres ini bergerak pada dua ranah sekaligus. *Pertama*, tataran konseptual dengan menggali pemikiran-pemikiran dari para akademisi, pemikir, peneliti, praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan media yang menghasilkan dokumen-dokumen konseptual hasil olah pikir dan nalar budi. *Kedua*, tatanan praksis dengan menghasilkan dokumen panduan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang memberi pola tata kelola pemerintahan dan tata hidup baru warga desa untuk desa-desa di Indonesia.

## **Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara**

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa. Dua bagian ini menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Kongres Kebudayaan Desa sebagai bagian dari upaya serius untuk merumuskan kembali tatanan Indonesia baru dari desa, sedangkan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari perayaan kebudayaan, perayaan gagasan, rekognisi desa-masyarakat adat di Indonesia. Perayaan nusantara. Kongres adalah perayaan kebudayaan itu sendiri.

Maka tepat di sini jalinan dan upaya saling melengkapi antara bentuk kongres dan festival mewujudkan. Istilah *kongres* yang selama ini lekat dengan kesan serius dan penuh khidmat diubah menjadi sebuah perayaan. Pengertian *kongres* yang biasa dipahami sebagai



bentuk pertemuan tertinggi, eksklusif, dan terpusat dari organisasi-organisasi sosial dan politik, kini dikembangkan menjadi semacam perhelatan dari ruang-ruang partisipasi masyarakat.

Maka festival kebudayaan ini didorong untuk merayakan dua hal sekaligus. *Pertama, culture experience*. Pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat lestari. *Kedua, culture knowledge* yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri.

## **Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa**

Desa adalah tempat di mana sebagian besar kita berasal. Karenanya kita lebih fasih membaca desa *tinimbang* Indonesia. Faktanya, desa lebih dulu ada dibandingkan Indonesia. Bahkan hingga hari ini kita masih selalu saja terbata-bata membaca Indonesia. Artinya kita perlu mengeja ulang Indonesia. *Reason d'etre* agenda ini adalah desa maka yang harus dieja ulang adalah Indonesia yang sudah sengkabut. Apakah Indo-nesia, Indon-esia, Ind-one-sia, In-do-nesia ataukah akan kita sebutkan dalam satu tarikan napas: Indonesia? Artinya, tanpa (huruf) D-E-S-A, kata Indonesia tak akan sempurna.

Bagaimana cara kita mengeja ulang sangat tergantung dari kemampuan kita membaca desa sebagai ibu bumi. Desa menjadi



sosok ibu yang *nuturing, ngopeni, ngrumat, ngemonah, nggulowentah, murakabi* semua anggota keluarga.

Lihatlah di masa pandemik seperti ini. Orang-orang desa yang merantau ke kota mengalami kecemasan. Ia yang papa tak diterima di lingkungan kota dan terusir darinya. Kota menjadi tidak ramah. Lihatlah bagaimana orang mencuri-curi cara agar tetap pulang kampung ketika kota tak lagi menyediakan kerja dan orang-orang kelas menengahnya mengurung diri di rumah. Mereka pulang ke desa.

Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi tempat kembalinya para petarung kehidupan yang harus rela meninggalkan desa untuk bekerja di ibu kota dan karena kondisi saat ini harus kembali pulang. Kembalilah ke pangkuan ibu bumi, selayaknya ibu. Desa akan menerima kehadiran kembali, apa pun adanya kita saat ini. Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi, tempat kembali dan berbagi.

Tema ini ingin menguatkan Indonesia dari desa. Dan tampaknya ungkapan “masa depan Indonesia adalah desa” semakin relevan. *Merdesa* berasal dari kata *desa* dalam bahasa Jawa Kuno, artinya ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa, suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat. Dalam rumus *otak-atik gathuk*, ada persamaan antara *paradise* (surga) dengan *paradesa*, *para* (tertinggi), maka kedudukan desa diletakkan dalam *maqam*, derajat, dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian pembangunan surga di dunia nyata, yakni ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya,



layak secara politik. Itulah sejahtera. Sedangkan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik: adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, *komunalitas*, berjemaah, tidak mudah mengumbar keserakahan dan eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, *dur-angkara*. Semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: “Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, tetapi tidak cukup untuk keserakahan satu manusia.”<sup>4</sup>

Karenanya, upaya menuju kemandirian desa menjadi bagian penting dari Kongres Kebudayaan Desa. Terwujudnya kedaulatan politik dan pemerintahan desa, kedaulatan perekonomian desa, kedaulatan data desa, adalah syarat desa sebagai “*paradise*”. Tata kelola pemerintahan dan warga desa dalam tatanan baru Indonesia dengan sendirinya harus memastikan tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial warga yang bersih dan antikorupsi, sejahtera lahir dan batin, pendidikan yang merdeka, dan seterusnya.

Penekanan kongres ini selain mengkaji tata kelola pemerintahan dan aspek-aspek kehidupan warga desa juga mengarusutamakan isu-isu antikorupsi. Membangun pemerintahan yang bersih dan politik yang bermartabat sangat mungkin didorong dari ruang negara yang lebih kecil, yaitu desa. Dan desa jauh lebih memungkinkan untuk menerapkan praktik tata kelola dan implementasi negara yang bebas dari korupsi.

---

4 Raharjo, T. 2013. “Menyambut Buku Indonesia Bagian dari Saya”. <https://www.caknun.com/2013/menyambut-buku-indonesia-bagian-dari-desa-saya/>.



Langkah yang lebih jauh, kongres ini berupaya memberikan tawaran alternatif untuk membangun kembali tatanan yang lebih setara, lebih adil, bermartabat, dan antikorupsi, serta model kehidupan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Tawaran alternatif tentang “*new normal*” akan mengisi ruang-ruang kosong tentang reproduksi pengetahuan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang selama ini seolah direduksi hanya pada tataran tata cara teknis kehidupan (cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Tawaran ini juga menyediakan seperangkat panduan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang bisa diadopsi oleh sebanyak mungkin desa di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah desa-desa adat beserta masyarakat adat di seluruh nusantara.

## **Kongres Kebudayaan Desa dalam Angka**

Dua setengah bulan persiapan dan pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa (Juni-Agustus), memberikan gambaran-gambaran angka partisipasi berbagai *stakeholder* dalam KKD. Pertama, riset kondisi dan imajinasi masyarakat desa tentang arah tatanan Indonesia baru dari desa. Riset ini merespons pandemi dan harapan warga desa. Sebanyak 1.231 responden telah terlibat dan memberikan pandangannya. Rentang responden bergerak dari berbagai provinsi dari Aceh hingga Papua. Pengambilan data yang menggunakan Google Form cukup mampu menjangkau jumlah responden, warga, dan pemangku pemerintahan desa. Dilihat dari komposisi gender, responden cukup seimbang.



Kedua, *call for papers* Kongres Kebudayaan Desa. Menyadari bahwa tidak semua gagasan dan keterwakilan bisa diringkus dalam 20 seri webinar, KKD membuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat desa, akademisi, peneliti, warga desa, birokrat, aktivis sosial, mahasiswa, dan siapa pun yang memiliki ikatan serta pemikiran tentang desa untuk *urun rembuk* tentang tatanan Indonesia baru. Sebanyak 57 naskah masuk melalui *call for papers* KKD. Jumlah tersebut tentu saja diseleksi secara ketat untuk bisa masuk dalam buku yang diterbitkan sebagai bagian dari *output* KKD. Hasilnya, sebanyak 31 naskah lolos kurasi dan berhak masuk dalam buku yang diterbitkan.

Ketiga, seri webinar KKD yang dilaksanakan dalam rentang 10 hari berturut-turut (1-10 Juli 2020), 100 jam webinar dengan 20 tema dan 20 *term of reference*, melibatkan 20 moderator di berbagai tempat di Indonesia serta 100 narasumber dari berbagai perspektif keilmuan dan keahlian.

Dua puluh tema webinar tersebut adalah: Seri 1. Arah Tatanan Baru Indonesia: “New Normal” Apa dan Bagaimana Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya; Seri 2. Ekonomi Berkeadilan: Perekonomian Desa dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 3. Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban; Seri 4. Kesehatan Semesta: Menghadirkan Kembali Kesehatan yang Setara untuk Semua dari Desa; Seri 5. Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Pelindungan dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Perempuan untuk Masa Depan Desa dan Arah Tatanan Indonesia Baru yang Inklusif; Seri 7. Kedaulatan Pangan

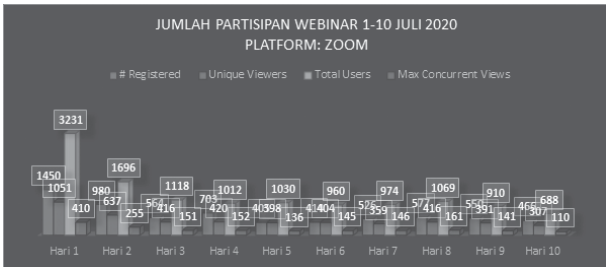


dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan, dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 8. Pemuda Desa: Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda Desa di dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 9. Agama: Dari Ritus ke Substansi (Transformasi Peran Agama dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru); Seri 10. Kebudayaan: Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru; Seri 11. Tata Ruang Desa dan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman: Menegosiasikan Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman Desa; Seri 12. Reformasi Birokrasi: Merumuskan Tata Birokrasi Desa yang *Compatible* untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 13. Hukum dan Politik Desa: Membangun Habitus Politik dan Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 14. Prinsip Antikorupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Membangun Sistem dan Habitus Antikorupsi dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 15. Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Berbasis Data Menuju Tatanan Indonesia Baru; Seri 16. Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 17. Kewarganegaraan: Merumuskan Pola Relasi Baru Warga Desa dan Negara untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 18. Komunikasi, Media, dan *Influencer*: Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa Menuju Indonesia Baru; Seri Khusus Inklusi Sosial: Mewujudkan Masyarakat Inklusif dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri Khusus Revitalisasi Desa: Merajut Desa Membangun sebagai Bagian Gerakan Global.



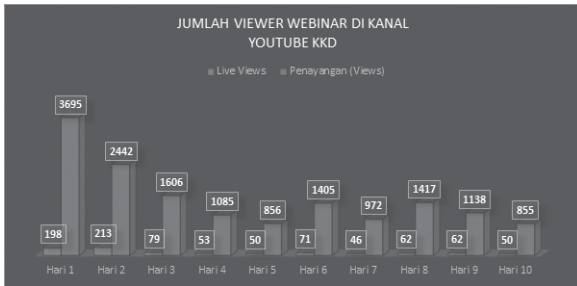
Dari sisi partisipan seri webinar KKD menunjukkan angka partisipasi yang cukup besar. Dilihat dari data yang ditarik langsung dari aplikasi Zoom dan merupakan gambaran partisipan webinar dalam satu hari, tabel berikut menggambarkan jumlah partisipasi webinar melalui kanal Zoom.

**Tabel 1** Jumlah Peserta Webinar Melalui Aplikasi Zoom



Selain melalui kanal Zoom, peserta juga bisa mengikuti keseluruhan seri webinar melalui kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa, baik secara *live* atau tayang ulang. Sampai tanggal 18 Juli 2020, berikut data penayangan video webinar Kongres Kebudayaan Desa:

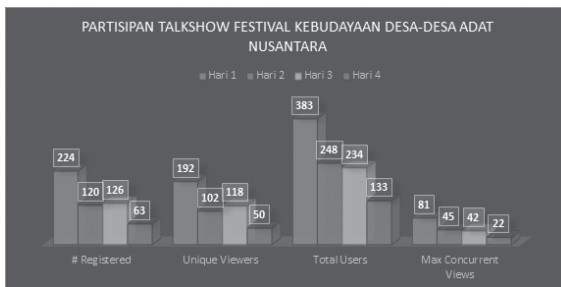
**Tabel 2** Jumlah Peserta Webinar KKD Melalui YouTube



Selain ditayangkan melalui kanal resmi Kongres Kebudayaan Desa, serial webinar juga ditayangkan melalui kanal YouTube suara.com, *live* Facebook kata desa, bumdes.tv, Gatra.tv, kanal YouTube wiradesa dengan perkiraan *audience* lebih dari 10 ribu.

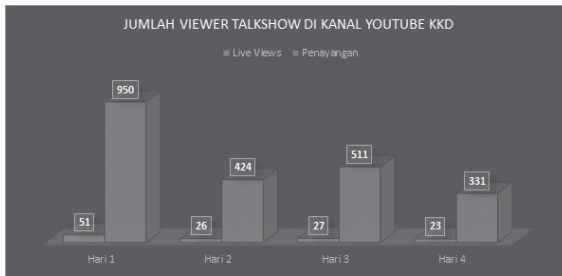
Keempat, Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara. Festival ini membicarakan secara khusus gagasan dan pemikiran tentang arah tatanan Indonesia baru dari perspektif desa-masyarakat adat di Indonesia. Ada 13 desa-masyarakat adat yang ambil bagian dalam seri *talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, yaitu: Desa Adat Boti, NTT; Desa Adat Papua; Desa Adat Sigi, Sulawesi Tengah; Desa Adat Baduy, Banten; Desa Adat Aceh; Desa Adat Minang; Desa Adat Melayu; Desa Adat Batak; Desa Adat Tidore; Desa Adat Dayak; Desa Adat Bajo; dan Desa Adat Sasak. Desa adat menyampaikan gagasan, pemikiran, serta praktik-praktik hidup dan penghidupan dalam konteks sehari-hari, misalnya tentang bagaimana membangun desanya masing-masing untuk memberi perspektif yang lebih besar bagi tatanan Indonesia baru. Ada 34 narasumber yang berasal dari 13 desa-masyarakat adat di Indonesia dan 8 moderator serta 8 video yang diproduksi untuk tiap-tiap *talkshow*.

**Tabel 3** Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via Zoom



Sama halnya dengan serial webinar Kongres Kebudayaan Desa, *talkshow* Festival Kebudayaan Desa juga ditayangkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kongres Kebudayaan Desa selama *talkshow* berlangsung. Selain itu, video *talkshow* juga diunggah ke kanal YouTube tersebut untuk memfasilitasi peserta yang tidak dapat mengikuti *talkshow* secara langsung. Berikut gambaran dari penayangan video *talkshow* Festival Kebudayaan Desa di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa sampai tanggal 18 Juli 2020.

**Tabel 4** Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via YouTube



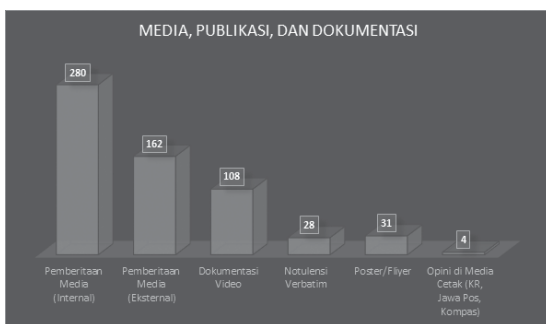
Kelima, penerbitan buku. Rangkaian KKD ini menghasilkan 21 buku, terdiri dari 19 buku dari seri webinar, 1 buku bunga rampai strategi pemajuan kebudayaan nusantara, dan 1 buku putih (berisi hasil riset KKD dan panduan penyusunan RPJMDesa). Desain buku ini menggambarkan keseluruhan hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa. Sampul tiap-tiap buku adalah bagian dari peta Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, yang menggambarkan kekayaan endemik satwa dan tetumbuhannya. Salah satunya seperti yang tengah Anda baca sekarang ini.



Keenam, buku putih Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa: Panduan Penyusunan RPJMDesa. Buku ini secara khusus merangkai hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa dan rekomendasi-rekomendasi yang selama pelaksanaan kongres terekam dengan baik. Selain itu buku ini juga merumuskan gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan dari pembacaan atas diskusi/tanya jawab selama webinar, *call for papers*, maupun hasil riset.

Ketujuh, publikasi dan media. Ada 280 berita yang diproduksi oleh tim media KKD di laman [www.kongreskebudayaandesa.id](http://www.kongreskebudayaandesa.id); 162 berita yang tayang di media nasional, baik *online* maupun cetak; 108 video dokumentasi yang diproduksi dan terunggah di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa; 35 poster untuk tiap-tiap agenda kongres; dan ada 4 opini yang dimuat di koran *Kedaulatan Rakyat*, *Jawa Pos*, dan *Kompas*. Keseluruhan agenda webinar kongres dan *talkshow* festival juga didokumentasikan dalam *notulensi* verbatim sejumlah dua puluh delapan. Dan sebanyak 35 poster publikasi mengantarai semua agenda kongres.

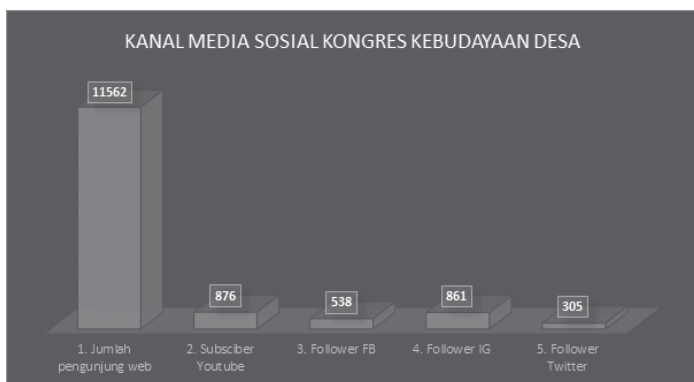
**Tabel 5** Jumlah Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi KKD



Seluruh aktivitas pemberitaan dimulai dari 22 Juni hingga 27 Juli (ketika naskah ini dituliskan), artinya rerata dalam 1 hari ada sedikitnya 12 berita, baik yang diproduksi oleh tim internal KKD maupun media-media nasional, baik cetak maupun *online*.

Hampir keseluruhan rangkaian Kongres Kebudayaan Desa menggunakan platform *online*. Karena itu kanal-kanal informasi juga berbasis *online*. KKD menggunakan *landing page* utama web, diseminasi juga didesain menggunakan media sosial. Berikut jumlah jangkauan dari web utama dan media sosial yang digunakan selama pelaksanaan kongres. Catatan ini diambil tepat ketika epilog ini ditulis.

**Tabel 6** Gambaran Jangkauan Melalui Kanal Media Sosial KKD



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung [www.kongreskebudayaandesas.id](http://www.kongreskebudayaandesas.id) sejumlah 11.562 kunjungan, jumlah *subscriber* kanal YouTube 876, *follower* FB 538, *follower* IG 861, dan *follower* Twitter sebanyak 305. Angka itu dibukukan sejak 20 Juni 2020.

Kedelapan, dua kali “syukuran”. Di sela-sela pelaksanaan rangkaian kongres, penyelenggara menggelar dua *event offline*, yaitu Andrawina Budaya dan Suluk Kebudayaan. Andrawina Budaya dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta sekjen; Kiai Jadul Maula; serta berbagai jaringan pendukung kongres. Kedua, Suluk Kebudayaan yang digelar untuk memungkasi agenda Festival Desa-Desa Nusantara dan menghadirkan budayawan Wani Dharmawan, Irfan Afifi, Nanang Garuda, dan lain-lain. Seluruh pelaksanaan agenda *offline* ini tetap menjalankan protokol kesehatan.

Kesembilan, jaringan kerja dan kepanitiaan. Kerja-kerja Kongres Kebudayaan Desa ini melibatkan 90 orang panitia penyelenggara yang terbagi dalam bagian-bagian kerja, mulai dari *steering committee*, tim LO, tim IT, tim festival, tim riset, tim *call for papers*, tim media, tim dokumentasi, tim buku, tim acara, tim perumus, tim administrasi dan keuangan, tim desain visual, tim medsos, tim konsumsi, tim *runner*, dan lain-lain. Selain itu pelaksanaan kongres juga didukung oleh 51 jaringan dan lembaga, dengan pendukung utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan GIZ. Secara umum kolaborasi



dari berbagai *stakeholder* ini dirumuskan ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community*, *government*, *finance*, dan media.

Kesepuluh, deklarasi arah tatanan Indonesia baru dari desa. Agenda deklarasi dibacakan Presiden Joko Widodo dua hari menjelang peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan para kepala desa dan seluruh rakyat Indonesia.

## Mengintip Hasil Kongres

Hingga epilog ini ditulis, tim perumus hasil-hasil kongres masih bekerja. Tim mencermati seluruh proses webinar, *notulensi*, makalah narasumber, naskah-naskah *call for papers*, hasil penelitian, hingga melihat ulang tayangan yang tersimpan di YouTube KKD. Semua itu akan menjadi bagian dari buku putih arah tatanan Indonesia baru dari desa yang disusun dalam panduan penyusunan RPJMDesa. Buku ini terdiri dari analisis kebijakan terkait desa, *review* RPJMN, *problematika*, dan isu-isu strategis kemandirian desa; visi Indonesia baru, asas, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta indikator-indikator arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Dari sekian banyak rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Kebudayaan Desa, klaster utama rekomendasi adalah mewujudkan kemandirian desa melalui tiga pilar: *pertama*, kedaulatan politik dan pemerintahan desa; *kedua*, kedaulatan perekonomian desa; *ketiga*, kedaulatan data desa. Tiga pilar kemandirian desa inilah yang akan diintrodusir untuk bersama-sama membangun gerakan kemandirian desa. Jika 75 ribu desa bergerak untuk membangun kemandiriannya maka gelombang ini akan dengan sendirinya mampu memperbaiki



kondisi negara. Masa depan Indonesia adalah desa. Detail hasil-hasil kongres bisa Anda simak di buku *Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa* (Panduan Penyusunan RPJMDesa).

\*\*\*

Pada bagian akhir epilog panjang ini, kami hendak *menghaturkan* terima kasih *kagem* Bapak Dr. (H.C). Drs. H Abdul Halim Iskandar, M.Pd., Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta jajaran Kemendesa yang telah memberikan dukungan penuh terhadap Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJ KAKI) KPK, untuk dukungan yang luar biasa. Rasa terima kasih kami sampaikan pula kepada Bapak Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Mbak Meta Yanti mewakili GIZ untuk semua diskusi dan dukungannya. Juga kepada segenap jaringan kerja Kongres Kebudayaan Desa dengan segenap dukungan dan bentuknya. *Matur nuwun*.

Ucapan terima kasih sungguh-sungguh pula kami sampaikan kepada seluruh moderator, narasumber, dan tentu saja sobat Kongres Kebudayaan Desa yang selama pelaksanaan kongres terus terlibat secara aktif, baik sebagai responden riset, *call for papers*, maupun sobat kongres yang mengikuti webinar dan *talkshow* festival.

Rasa bangga disertai ucapan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, inisiator Kongres Kebudayaan Desa, Lurah



Desa Panggunharjo, beserta jajaran pemerintah desa yang terus *ngesuhi* dan *ngemong* seluruh tim penyelenggara. Dan tentu saja kepada seluruh panitia penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa yang telah bekerja keras dan bekerja cerdas untuk bersama-sama menyelenggarakan KKD serta mengemas gagasan arah tatanan Indonesia baru dari desa. Sungguh sebuah kerja yang menyejarah. Untuk itu *matur nuwun*, terima kasih.

Akhirnya, semoga Kongres Kebudayaan Desa yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini memberi sumbangan yang besar kepada sebanyak mungkin desa juga kepada Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan *sakalangkong, matur nuwun, hatur nuhun, matur suksme, amanai, muliate, tampiaseh, tarimo kasi, kurusumanga'epanngawang*, terima kasih. Salam budaya desa. Panjang umur perjuangan!

Senin, 28 Juli 2020

Desa Panggunharjo, Bantul, Yogyakarta





# Deklarasi

## ARAH TATANAN INDONESIA BARU DARI DESA

**M**engingat kekuatan tatanan kehidupan masyarakat desa merupakan hasil pergulatan nenek moyang dalam menggeluti pengalaman kosmologis, *epistemologis*, dan ontologis sehingga filosofi desa adalah filosofi yang mewujud dalam budi pekerti, perilaku, dan tindakan; serta mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 maka kekuatan desa harus dijadikan modal sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi arah tatanan baru masyarakat.

Pandemi membuat manusia harus terus berjuang mencari ruang kehidupan yang lebih baik. Dan perjuangan itu telah dimulai melalui Kongres Kebudayaan Desa yang mengajak desa-desa Indonesia bergerak dan bangkit dengan kesadaran *kebhinekaan* dalam merumuskan tatanan baru bangsa Indonesia. Bahwa desa-desa yang membentuk ke-Indonesia-an harus membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*.

Bahwa tatanan itu lahir dari kekayaan sejarah panjang pengetahuan nusantara dan cara pandang jauh ke depan dengan kesadaran bahwa puncak dari relasi sosial adalah gotong royong, puncak dari relasi politik adalah musyawarah, dan puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama. Bahwa semua itu bersumber dari kekayaan kebudayaan desa dari Aceh hingga Papua.

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur maka desa menyatakan cita-cita tatanan Indonesia baru dari desa adalah terselenggaranya politik pemerintah desa yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, emansipatif, tenggang rasa, berdaya tahan, mandiri, serta memuliakan kelestarian semesta ciptaan melalui pendayagunaan datakrasi yang ditopang oleh cara kerja pengetahuan dan pengamalan lintas ilmu bagi terwujudnya distribusi sumber daya yang setara untuk kesejahteraan warga.

Bahwa perwujudan tatanan Indonesia baru dari desa tersebut ditempuh dengan cara menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik, menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan



ekonomi dan *pemberkuasaan* desa melalui aktualisasi pengetahuan warga sebagai wujud kedaulatan data.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kemandirian dan inovasi desa yang mampu mengelola kewenangan dan hak atas asal-usulnya, yang mampu memberikan *pemberkuasaan* pada warga desa. Kita berdoa memohon rahmat, hidayah, kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, menyongsong Tatanan Indonesia Baru dari Desa.

Salam budaya desa. Panjang Umur Perjuangan.

Yogyakarta, 15 Agustus 2020



## KERABAT KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020

### Dewan Pengarah

1. Wahyudi Anggoro Hadi (Ketua)
2. Rumakso Setyadi
3. FX Rudy Gunawan
4. Andreas Budi Widyanta
5. Eko Pambudi
6. Ilham Yuli Isdiyanto
7. Achmad Musyaddad
8. Ryan Sugiarto

### PANITIA KONGRES KEBUDAYAAN DESA

#### Ketua: Ryan Sugiarto

#### A. Strategis Business Unit: Sholahuddin Nur'azmy

##### Administrasi dan Keuangan

1. Ahmad Arief Rohman  
(Koordinator)
2. Any Sundari
3. Rindy Widya Rasmono
4. Cintya Raffa Fathiya

##### Tim Media

1. Edy SR (Koordinator)
2. Ahmad Za'im Yunus
3. Ashilly Achidsti
4. Elyvia Inayah
5. Endah Sulistyorini
6. Gunawan Wibisono
7. Lutfi Retno Wahyudyanti
8. Vitus Kevinda Bramantya Viastra

##### Tim Humas

1. Muhammad Zidny Kafa  
(Koordinator)
2. Aina Ulfah
3. Lina Listia

4. Nava Anggita Ardiana

5. Yesseta Novi Sukma

##### Tim Dokumentasi

1. Akhmad Nasir (Koordinator)
2. Amirul Mukmin
3. Annisa Suryantari
4. Ari Aji Heru Suyono
5. Khoirul Azmi
6. Shavira L. Phinahayu
7. Syaiful Choirudin
8. Veronika Yasinta
9. Windi Meilita W.

##### Tim IT

1. Muhammad Hanif Rifai  
(Koordinator)
2. Ahmad Mizdad Hudani
3. R. Nurul Fitriana Putri
4. Adam Hanafi Syafrudin
5. Damar Saksomo Jati



## **B. Program: Aditya Mahendra Putra**

### **Tim Webinar**

1. Ambar Sari Dewi (Koordinator)
2. Angga Kurniawan
3. Emira Salma
4. Farhan Al Faried
5. Johan Visky Catur Aga
6. Okky Yayan Putra Armanda
7. Robi Setiyawan
8. Ruliyanto
9. Satrio Yoga Rachmanto
10. Tommy Destryanto
11. Toni Fajar Ristanto
12. Tri Muryani
13. Yusan Aprilianda

### **Tim Festival**

1. Eko Nuryono (Koordinator)
2. Gundhi Aditya
3. Hardiansyah Ay
4. Linggar Ajikenco
5. Mona Kriesdinar
6. Nanang Garuda
7. Nandar Hutadima Idamsik
8. Nurohmad
9. Raliyanto Bw
10. Saptaji Prasetyo
11. Siska Aprisia
12. Very Hardian Kirnanda
13. Warsono

### **Tim Buku dan Call Of Papers**

1. Faiz Ahsoul (Koordinator)
2. Arif Gunawan
3. Ageng Indra Sumarah
4. Agus Teriyana
5. Ahmad Yasin
6. Amanatia Junda Solikhah
7. Asy Syaffa Nada Amatullah
8. Berryl Ilham
9. Chusna Rizqati
10. Citra Maudy Mahanani
11. Rheisnayucyntara
12. Dadang Ari Murtono
13. Diah Rizki Fitriani
14. Dwi Cipta
15. Dyah Permatasari
16. Fawaz
17. Fitriana Hadi
18. Fiqih Rahmawati
19. Gregorius Ragil Wibawanto
20. Irfan Afifi
21. Iswan Heriadjie
22. Ketjilbergerak
23. Kusharditya Albihafifzal
24. Prima Hidayah
25. Rio Anggoro Pangestu
26. Rofi Ali Majid
27. Suhairi Ahmad
28. Yona Primadesi









**KPK**  
KEMENTERIAN PENELITIAN DAN  
TEKNOLOGI



KEMENTERIAN PENELITIAN DAN TEKNOLOGI

